LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2024

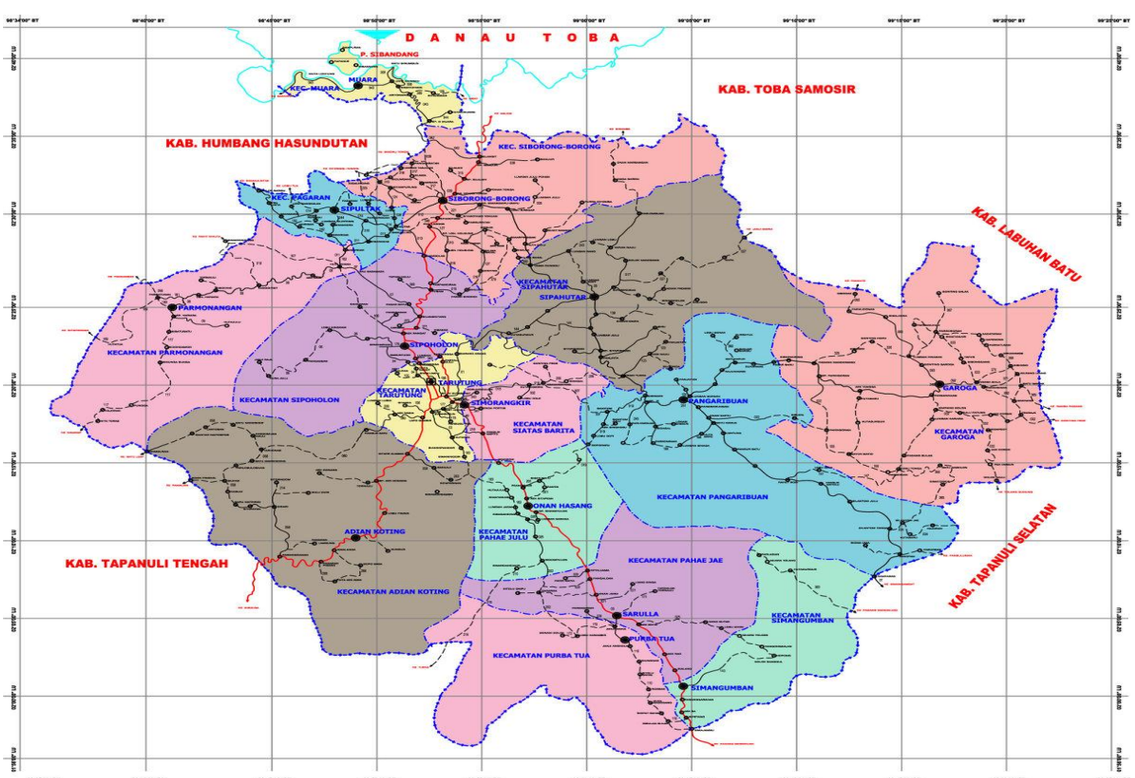

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dan telah sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data-data capaian yang tertuang dalam laporan ini telah disesuaikan dengan hasil reviu yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 dalam laporan ini merupakan laporan *un-Audited*. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Atasan untuk pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun yang akan datang. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat berjalan dengan baik dan senantiasa mendapat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekian dan terimakasih

Horas....Horas...Horas

Tarutung, 29 Maret 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dr. JONIUS T.P. HUTABARAT, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- i
DAFTAR ISI ---------- ii
DAFTAR TABEL ---------- iv
DAFTAR GRAFIK ---------- ix
BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
1.1 Latar Belakang ---------- 1
1.1.1 Penjelasan Umum ---------- 1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah ---------- 36
1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah - 36
1.2.2 Visi dan Misi ---------- 41
1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah --- 45
1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan ---------- 53
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ---------- 54
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ---------- 70
2.1 Capaian Kinerja Makro ---------- 70
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ---------- 76
2.2.1 Indikator Kinerja Hasil ---------- 77
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ---------- 109
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah --------- 120
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ---------- 220
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten ---------- 221
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten ---------- 227

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ---------- 234
4.1 Urusan Pendidikan ---------- 236
4.2 Urusan Kesehatan ---------- 252
4.3 Urusan Pekerjaan Umum ---------- 283
4.4 Urusan Perumahan Rakyat ---------- 291
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ---------- 299
4.6 Urusan Sosial ---------- 326
BAB V PENUTUP ---------- 347
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara	6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Tahun 2024	13
Tabel 1.3	Data PNS Menurut Jabatan	15
Tabel 1.4	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Golongan	18
Tabel 1.5	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	22
Tabel 1.6	Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	23
Tabel 1.7	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	45
Tabel 1.8	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara	55
Tabel 1.9	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	64
Tabel 2.1	Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara	71
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	76
Tabel 2.3	Rekapitulasi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Perubahan	121
Tabel 2.4	Target Perjanjian Kinerja	122
Tabel 2.5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	126
Tabel 2.6	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja	126
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun 2023 -	129
Tabel 2.8	Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan	131
Tabel 2.9	Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*	132

Tabel 2.10 Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ---------- 133
Tabel 2.11 *Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan---------- 133
Tabel 2.12 Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Daerah Rentan Pangan ---------- 134
Tabel 2.13 Desa/Kelurahan Rentan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ---------- 135
Tabel 2.14 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Diversifikasi Pangan ---------- 138
Tabel 2.15 Susunan Pola Pangan Harapan Nasional ---------- 139
Tabel 2.16 Susunan Pola Pangan Harapan Kabupaten Tapanuli Utara 139
Tabel 2.17 Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ---------- 142
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023---------- 143
Tabel 2.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi 145
Tabel 2.20 Kinerja Investasi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024---------- 146
Tabel 2.21 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian ---------- 148
Tabel 2.22 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020-2024 ---------- 149
Tabel 2.23 Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian 2020-2024 149
Tabel 2.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan ---------- 151
Tabel 2.25 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ---------- 152
Tabel 2.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Koperasi Berkualitas---------- 153
Tabel 2.27 Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Sistem Pendidikan Daerah ---------- 155
Tabel 2.28 Pengukuran Kinerja Sasaran Memenuhi Standar Pendidikan ---------- 156

Tabel 2.29 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ---------- 160
Tabel 2.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Layanan Kesehatan Yang Berkualitas ---------- 161
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024 ----- 162
Tabel 2.32 Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM ---------- 164
Tabel 2.33 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja ---------- 165
Tabel 2.34 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ---------- 166
Tabel 2.35 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Tahun 2024 167
Tabel 2.36 Realisasi TPAK Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ---------- 168
Tabel 2.37 Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Jumlah Wisatawan ---------- 169
Tabel 2.38 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ---------- 169
Tabel 2.39 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata ---------- 171
Tabel 2.40 Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah ---------- 173
Tabel 2.41 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan ---------- 174
Tabel 2.42 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 176
Tabel 2.43 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi ---------- 178
Tabel 2.44 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ---------- 179
Tabel 2.45 Kepemilikan KIR Tahun 2024 ---------- 180

Tabel 2.46 Angkutan Perdesaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ---------- 181
Tabel 2.47 Angkutan Perdesaan Yang Memiliki Kartu Pengawasan Tahun 2024 ---------- 181
Tabel 2.48 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air ---------- 182
Tabel 2.49 Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Penataan Ruang Yang Terpadu dan Berkelanjutan ---------- 183
Tabel 2.50 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Penataan dan Pengendalian Tata Ruang---------- 184
Tabel 2.51 Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ---------- 186
Tabel 2.52 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ---------- 186
Tabel 2.53 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif---------- 193
Tabel 2.54 Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kapasitas Desa 195
Tabel 2.55 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Status Desa - 196
Tabel 2.56 Daftar Desa Kabupaten Tapanuli Utara Naik Status Tahun 2024 ---------- 197
Tabel 2.57 Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ---------- 200
Tabel 2.58 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja ---------- 201
Tabel 2.59 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024---------- 202
Tabel 2.60 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan ---------- 204
Tabel 2.61 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Daerah ---------- 206
Tabel 2.62 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik---------- 207
Tabel 2.63 Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik ---------- 208

Tabel 2.64 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas ASN Yang Profesional dan Berintegritas---------- 209
Tabel 2.65 Penghitungan IP ASN Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024---------- 210
Tabel 2.66 Pengukuran Kinerja Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Nyaman ---------- 211
Tabel 2.67 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat---------- 212
Tabel 2.68 Pengukuran Kinerja Sasaran Terhadap Kinerja Anggaran Tahun 2024 ---------- 215

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara----------	71
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2024 ----------	72
Grafik 2.3	Perkembangan TPT Tahun 2020-2024 ----------	74

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang Residen Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Saat itu, Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi 4 (empat) Afdeling (Kabupaten), salah satu diantaranya adalah *Afdeling Batak Landen* dengan Ibukotanya Tarutung, dan 5 (lima) *Onder Afdeling* (wilayah) yang meliputi yaitu :

1. *Onder Afdeling* Silindung (Wilayah Silindung) ibukotanya Tarutung;
2. *Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba* (Wilayah Humbang) ibukotanya Siborongborong;
3. *Onder Afdeling* Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige;
4. *Onder Afdeling* Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan;
5. *Onder Afdeling Dairi Landen* (Kabupaten Dairi) ibukotanya Sidikalang.

Tiap-tiap *Onder Afdeling* mempunyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin seorang *Distrikchoolfd* bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa *Onder Distrikten* (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang. Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan, para Asisten Demang yang ada di kantor Demang tersebut ditetapkan menjadi Asisten Demang di *Onder* Distrik bersangkutan. Kemudian tiap Onder Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Negeri *Hoofd*.

Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang Kepala Kampung yang disebut Kampung *Hoafd* dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri *Hoofd*. Negeri dan Kampung *Hoofd* statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Tugas utama Negeri dan Kampung *Hoof*d ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak/blasting/rodi dari

penduduk Negeri/Kampung masing-masing. Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

- Asisten Resident diganti dengan nama *Gunseibu* dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyo.
- Demang-demang *Terbeschiking* menjadi *Guntyome* memimpin masing-masing yang disebut *Gunyakusyo*.
- Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama *Huku Guntyo* dan kecamatannya diganti dengan nama *Huku Gunyakusyo*.
- Negeri dan Kampung *Hoofd* tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala Kampung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinan Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam Daerah Tapanuli. Afdeling Tanah Batak dirubah menjadi Luhak Tanah Batak, dan sebagai Kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing (Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Utara, beliaulah dianggap sebagai Bupati pertama Tapanuli Utara.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah Propinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Utara untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara yang diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5 Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2003.

1.1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.1.3 Data Geografis Daerah

Data geografis Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi,

hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1º20'- 2º 41' Lintang Utara dan 98º05' - 99º16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
I	**Parmonangan**	**257.3**	**6,7**
1	Desa Manalu Purba	18.70	7,2
2	Desa Manalu Dolok	30.75	11,9
3	Desa Manalu	7.90	3,0
4	Desa Huta Julu	30.95	12,0
5	Desa Aek Raja	19.75	7,6
6	Desa Huta Tinggi	29.00	11,2

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
7	Desa Lobu Sunut	12.35	4,8
8	Desa Sisordak	12.45	4,8
9	Desa Hutatua	19.60	7,6
10	Desa Pertengahan	21.60	8,3
11	Desa Huta Julu Parbalik	16.50	6,4
12	Desa Horisan Ranggitgit	14.20	5,5
13	Desa Purba Dolok	12.30	4,7
14	Desa Batuarimo	11.30	4,3
II	**Adiankoting**	**502.9**	**13,2**
1	Desa Pagaran Lambung I	30.37	6,0
2	Desa Sibalanga	40.37	8,0
3	Desa Pagaran Lambung II	13.40	2,6
4	Desa Pagaran Lambung III	15.50	3,0
5	Desa Pagaran Pisang	26.87	5,3
6	Desa Adian Koting	31.50	6,2
7	Desa Dolok Nauli	62.75	12,4
8	Desa Banuaji IV	17.87	3,5
9	Desa Banuaji I	31.25	6,2
10	Desa Banuaji II	16.26	3,2
11	Desa Pansur Batu	36.42	7,2
12	Desa Pardomuan Nauli	48.00	9,5
13	Desa Siantar Naipospos	39.68	7,8
14	Desa Pagaran Lambung IV	56.25	11,1
15	Desa Pansur Batu II	24.27	4,8
16	Desa Pansur Batu I	12.14	2,4
III	**Sipoholon**	**189.2**	**4,9**
1	Desa Rura Julu Toruan	26.10	13,7
2	Desa Rura Julu Dolok	11.89	6,2
3	Desa Simanungkalit	13.35	7,0
4	Desa Hutauruk	6.92	3,6
5	Kel. Situmeang Habinsaran	17.49	9,2
6	Desa Situmeang Hasundutan	18.41	9,7
7	Desa Lobu Singkam	36.77	19,4
8	Desa Pagar Batu	17.49	9,2
9	Desa Sipahutar	3.19	1,6
10	Desa Hutaraja	3.57	1,8
11	Desa Tapian Nauli	5.19	2,7
12	Desa Hutaraja Hasundutan	18.42	9,7
13	Desa Hutaraja Simanungkalit	3.53	1,8
14	Desa Hutauruk Hasundutan	6.88	3,6
IV	**Tarutung**	**107.6**	**2,8**
1	Desa Siandor-Andor	8.50	7,8
2	Desa Hutapea Banuarea	8.25	7,6
3	Desa Parbubu Pea	1.25	1,1
4	Desa Parbubu II	4.50	4,1
5	Desa Parbubu Dolok	7.94	7,3
6	Desa Hutatoruan VIII	3.50	3,2
7	Desa Parbubu I	4.75	4,4
8	Desa Hutatoruan I	2.00	1,8
9	Desa Sosunggulon	2.62	2,4

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
10	Desa Parbaju Toruan	4.55	4,2
11	Desa Hapoltahan	1.44	1,3
12	Desa Hutatoruan IV	0.87	0,8
13	Desa Aek Siansimun	4.56	4,2
14	Kelurahan Hutatoruan V	1.50	1,3
15	Kelurahan Hutatoruan VI	3.25	3,0
16	Kelurahan Hutatoruan XI	0.20	0,1
17	Kelurahan Hutatoruan IX	0.85	0,7
18	Kelurahan Hutatoruan X	1.04	0,9
19	Kelurahan Hutatoruan VII	2.00	1,8
20	Kelurahan Partali Toruan	0.62	0,5
21	Desa Parbaju Tonga	3.50	3,2
22	Desa Simamora	3.40	3,1
23	Desa Hutagalung Siwaluompu	3.20	2,9
24	Desa Siraja Oloan	3.75	3,4
25	Desa Hutauruk	2.19	2,0
26	Desa Parbaju Julu	3.50	3,2
27	Desa Partali Julu	2.00	1,8
28	Desa Sitampurung	7.75	7,2
29	Desa Jambur Nauli	8.76	8,1
30	Desa Sihujur	5.00	4,6
31	Desa Hutatoruan III	0.44	0,4
V	**Siatas Barita**	**92.92**	**2,4**
1	Desa Simorangkir Julu	3.00	3,2
2	Desa Simorangkir Habinsaran	2.00	2,1
3	Desa Enda Portibi	2.70	2,9
4	Desa Sitompul	3.50	3,7
5	Desa Sangkaran	3.00	3,2
6	Desa Lumban Siagian Jae	1.50	1,6
7	Desa Lumban Siagian Julu	0.70	0,7
8	Desa Pansurnapitu	9.95	10,7
9	Desa Sidagal	9.88	10,6
10	Desa Lumban Siagian Jae	27.97	30,1
11	Desa Lumban Siagian Julu	26.77	28,8
12	Desa Siraja Hutagalung	1.95	2,1
VI	**Pahae Julu**	**165.9**	**4,3**
1	Desa Pangurdotan	6.54	3,9
2	Desa Lumban Gaol	9.54	5,7
3	Desa Lumban Tonga	8.38	5,0
4	Desa Sitolu Ama	6.00	3,6
5	Desa Simanampang	8.04	4,8
6	Desa Lobu Pining	13.29	8,0
7	Desa Hutabarat	6.34	3,8
8	Desa Lumban Dolok	9.15	5,5
9	Desa Simardangiang	8.59	5,1
10	Desa Sibaganding	8.79	5,3
11	Desa Lumban Garaga	9.64	5,8
12	Desa Janji Matogu	8.55	5,1
13	Desa Lumban Laean	8.75	5,2

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
14	Desa Onan Hasang	7.83	4,7
15	Desa Pantis	7.51	4,5
16	Desa Lontung Dolok	8.54	5,1
17	Desa Simataniari	8.28	4,9
18	Desa Simasom Toruan	7.52	4,5
19	Desa Simasom	14.62	8,8
VII	**Pahae Jae**	**203.2**	**5,3**
1	Desa Suka Maju	19.76	9,7
2	Desa Sitolu Ompu	45.00	22,1
3	Desa Siopat Bahal	8.00	3,9
4	Kelurahan Pasar Sarulla	3.00	1,4
5	Desa Nahornop Marsada	8.50	4,1
6	Desa Setia	34.00	16,7
7	Desa Parsaoran Samosir	14.00	6,8
8	Desa Pardomuan Nainggolan	4.00	1,9
9	Desa Parsaoran Nainggolan	6.00	2,9
10	Desa Pardamean Nainggolan	6.00	2,9
11	Desa Sigurunggurung	4.00	1,9
12	Desa Silangkitang	12.54	6,1
13	Desa Tadolok Nauli	38.40	18,9
VIII	**Purbatua**	**191.8**	**5,0**
1	Desa Bonani Dolok	25.75	13,4
2	Desa Selamat	32.00	16,6
3	Desa Purbatua	16.00	8,3
4	Desa Pardomuan Janji Angkola	5.00	2,6
5	Desa Parsaoran Janji Angkola	31.00	16,1
6	Desa Janji Nauli	34.00	17,7
7	Desa Sitolu Bahal	14.00	7,3
8	Desa Robean	12.00	6,2
9	Desa Huta Nagodang	6.80	3,5
10	Desa Sidua Bahal	7.00	3,6
11	Desa Sibulan-Bulan	8.25	4,3
IX	**Simangumban**	**150.0**	**3,9**
1	Desa Silosung	10.00	6,6
2	Desa Simangumban Jae	32.00	21,3
3	Desa Dolok Sanggul	30.00	20,1
4	Desa Aek Nabara	13.00	8,6
5	Desa Simangumban Julu	35.00	23,3
6	Desa Lobu Sihim	14.00	9,3
7	Desa Dolok Saut	10.00	6,6
8	Desa Pardomuan	6.00	4,0
X	**Pangaribuan**	**459.2**	**12,1**
1	Desa Parlombuan	23.25	5,0
2	Desa Lumban Sinaga	20.00	4,3
3	Desa Pansur Natolu	21.00	4,5
4	Desa Silantom Julu	29.00	6,3
5	Desa Silantom Tonga	12.20	2,6
6	Desa Rahut Bosi	18.50	4,0

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
7	Desa Batu Nadua	20.00	4,3
8	Desa Sampangul	10.50	2,2
9	Desa Harianja	12.00	2,6
10	Desa Batu Manumpak	39.00	8,4
11	Desa Pariksabungan	7.00	1,5
12	Desa Pakpahan	9.00	1,9
13	Desa Najumambe	25.00	5,4
14	Desa Purbatua	21.00	4,5
15	Desa Lumban Sormin	11.00	2,4
16	Desa Sibingke	12.00	2,6
17	Desa Godung Borotan	14.30	3,1
18	Desa Parratusan	22.00	4,7
19	Desa Sigotom Julu	14.30	8,7
20	Desa Silantom Jae	22.00	2,6
21	Desa Padang Parsadaan	40.00	2,6
22	Desa Parsorminan I	10.63	2,3
23	Desa Rahut Bosi Onan	18.50	4,0
24	Desa Hutaraja	10.50	2,2
25	Desa Sigotom Timur	14.30	3,1
26	Desa Sigotom Dolok Nauli	14.30	3,1
XI	**Garoga**	**567.5**	**14,9**
1	Desa Sibaganding	20.25	5,1
2	Desa Padang Siandomang	69.25	12,2
3	Desa Parinsoran Pangorian	54.25	9,5
4	Desa Aek Tangga	49.25	8,6
5	Desa Simpang Bolon	69.83	12,3
6	Desa Garoga Sibargot	74.25	13,0
7	Desa Gonting Garoga	29.25	5,1
8	Desa Sibalanga	49.25	8,6
9	Desa Parsosoran	28.04	4,9
10	Desa Lontung Jae I	39.25	6,9
11	Desa Lontung Jae II	34.25	6,0
12	Desa Gonting Salak	30.25	5,3
13	Desa Parmanuhan	11.21	1,9
XII	**Sipahutar**	**408.2**	**10,7**
1	Desa Onan Runggu I	30.50	7,4
2	Desa Sipahutar III	11.50	2,8
3	Desa Siabal-Abal I	17.91	4,3
4	Desa Siabal-Abal II	12.82	3,1
5	Desa Aek Nauli II	4.32	1,0
6	Desa Aek Nauli III	6.65	1,6
7	Desa Aek Nauli I	10.40	2,5
8	Desa Sabungan Nihuta V	27.47	6,7
9	Desa Siabal-Abal III	14.00	3,4
10	Desa Sipahutar II	6.00	1,4
11	Desa Sipahutar I	11.00	2,6
12	Desa Onan Runggu III	30.50	7,4
13	Desa Onan Runggu II	30.50	7,4
14	Desa Onan Runggu IV	6.50	1,5
15	Desa Sabungan Nihuta I	7.00	1,7

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
16	Desa Sabungan Nihuta II	17.00	4,1
17	Desa Sabungan Nihuta III	16.00	3,9
18	Desa Sabungan Nihuta IV	39.60	9,7
19	Desa Tapian Nauli II	20.50	5,0
20	Desa Tapian Nauli III	44.25	10,8
21	Desa Tapian Nauli I	10.50	2,5
22	Desa Siabal - Abal IV	7.50	1,8
23	Desa Aek Nauli IV	6.03	1,4
24	Desa Aek Nauli VI	12.59	3,0
25	Desa Siabal -Abal V	7.18	1,7
XIII	**Siborongborong**	**279.9**	**7,3**
1	Desa Lumban Tonga-Tonga	8.90	3,1
2	Desa Paniaran	9.70	3,4
3	Desa Bahal Batu III	14.40	5,1
4	Desa Bahal Batu II	15.40	5,5
5	Desa Bahal Batu I	11.30	4,0
6	Desa Sitabo-Tabo	6.97	2,4
7	Desa Siborongborong I	10.00	3,5
8	Desa Siaro	6.40	2,2
9	Desa Sitampurung	13.50	4,8
10	Kel. Pasar Siborongborong	5.00	1,7
11	Desa Pohan Tonga	14.70	5,2
12	Desa Lobu Siregar II	16.10	5,7
13	Desa Hutabulu	14.30	5,1
14	Desa Lobu Siregar I	22.30	7,9
15	Desa Pohan Jae	27.30	9,7
16	Desa Pohan Julu	31.50	11,2
17	Desa Parik Sabungan	17.51	6,2
18	Desa Siborongborong II	14.63	5,2
19	Desa Sigumbang	8.50	3,0
20	Desa Sitabotabo Toruan	4.43	1,5
21	Desa Silait-Lait	7.07	2,5
XIV	**Pagaran**	**138.0**	**3,6**
1	Desa Sibaragas	8.80	6,3
2	Desa Lumban Motung	7.45	5,4
3	Desa Banualuhu	7.40	5,3
4	Desa Lumban Julu	9.70	7,0
5	Desa Lubis	5.80	4,2
6	Desa Lumban Ina-Ina	9.70	7,0
7	Desa Pagaran	8.90	6,4
8	Desa Parhorboan	9.50	6,8
9	Desa Sipultak	6.03	4,3
10	Desa Dolok Saribu	19.00	13,7
11	Desa Lumban Silintong	15.00	10,8
12	Desa Simamora Hasibuan	12.14	8,7
13	Desa Sipultak Dolok	6.32	4,5
14	Desa Hasibuan	12.31	8,9
XV	**Muara**	**79.75**	**2,1**
1	Desa Huta Lontung	9.60	12,0

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
2	Desa Bariba Niaek	3.59	4,5
3	Desa Silali Toruan	3.75	4,7
4	Desa Hutana Nagodang	4.96	6,2
5	Desa Unte Mungkur	4.59	5,7
6	Desa Batu Binumbun	2.78	3,4
7	Desa Simatupang	4.20	5,2
8	Desa Aritonang	4.36	5,4
9	Desa Dolok Martumbur	4.37	5,4
10	Desa Sitanggor	4.99	6,2
11	Desa Huta Ginjang	11.74	14,7
12	Desa Silando	8.88	11,1
13	Desa Papande	4.40	5,5
14	Desa Sibandang	4.61	5,7
15	Desa Sampuran	2.93	3,6
	JUMLAH.....	**3,793.71**	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km^2 atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km^2 atau 2,10 persen, sementara Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga menjadi desa terluas yaitu sekitar 74,25 Km^2 dan Kelurahan Hutatoruan III Kecamatan Tarutung merupakan desa terkecil dengan luas 0,44 Km^2. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

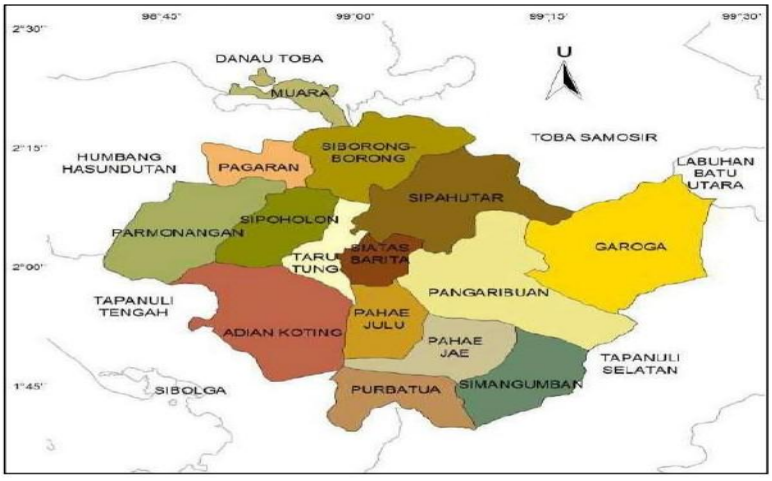

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

1.1.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah 331.475 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 164.338 jiwa dan perempuan sejumlah 167.137 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siborongborong dengan penduduk sebanyak 54.324 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Purbatua dengan penduduk sebanyak 8.535 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	L+P
1	Tarutung	21.999	22.807	44.806
2	Siatas Barita	7.693	7.821	15.514
3	Adiankoting	7.671	7.755	15.426
4	Sipoholon	12.779	13.069	25.848
5	Pahae Julu	7.045	7.279	14.324
6	Pahae Jae	6.016	6.329	12.345
7	Simangumban	4.234	4.296	8.530
8	Purbatua	4.172	4.363	8.535
9	Siborongborong	27.062	27.262	54.324
10	Pagaran	9.920	10.118	20.038
11	Parmonangan	7.795	7.630	15.425
12	Sipahutar	14.877	14.857	29.734
13	Pangaribuan	15.628	16.056	31.684
14	Garoga	9.835	9.560	19.395
15	Muara	7.612	7.935	15.547
Jumlah		**164.338**	**167.137**	**331.475**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

1.1.5 Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai turunannya, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021, Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 berjumlah 44 unit yang terdiri dari :

Perangkat Daerah	**:**	**Jumlah**	**Dasar Hukum**
Sekretariat Daerah Kabupaten	:	1	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021
Sekretariat DPRD	:	1	
Inspektorat Daerah Kabupaten	:	1	
Dinas	:	20	
Badan	:	6	
Kecamatan	:	15	
Jumlah	**:**	**44**	
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Tapanuli Utara :	:	50	
UPTD Dinas PUPR	*:*	*5*	
UPTD Dinas Ketenagakerjaan	*:*	*1*	
UPTD Dinas Ketahanan Pangan	*:*	*4*	
UPTD Dinas Lingkungan Hidup	*:*	*4*	
UPTD Dinas Perhubungan	*:*	*2*	
UPTD Dinas Perpustakaan	*:*	*3*	
UPTD Dinas Pariwisata	*:*	*2*	
UPTD Dinas Pertanian	*:*	*2*	
UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	*:*	*4*	
UPTD Dinas Kesehatan	*:*	*22*	
UPTD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	*:*	*1*	

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

1.1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan, dan fungsi pendukung urusan pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah.

1.1.6.1 Jumlah PNS Menurut Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara yang terdata sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 4.236 orang, dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Data PNS Menurut Jabatan

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SELURUH PEGAWAI			
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	16	17	73	106
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	7	9	24	40
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	6	4	16	26
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	7	3	17	27
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	12	-	12	24
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	14	1	12	27
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	8	9	17	34
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	13	-	12	25
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	6	3	21	30
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	6	4	20	30
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	12	3	12	27
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	8	6	10	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	27	8	49	84
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	11	5	44	60

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SELURUH PEGAWAI			
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
	Perdagangan Kab. Tapanuli Utara				
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	9	8	17	34
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	17	-	22	39
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	7	5	11	23
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	9	2	8	19
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	13	32	36	81
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	5	5	6	16
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	6	3	7	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	15	10	60	85
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	13	3	101	117
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	12	3	21	36
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	8	7	9	24
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	6	7	9	22
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	9	6	31	46
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	6	2	12	20
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	12	-	18	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	9	8	35	52
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	5	-	5	10
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	5	-	9	14
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	9	-	6	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	7	-	7	14
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	7	-	12	19
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	8	-	19	27
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	8	-	7	15
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	5	-	4	9

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SELURUH PEGAWAI			
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	4	-	6	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	9	-	8	17
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	14	-	19	33
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	3	-	7	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	8	-	12	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	9	-	10	19
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	37	-	31	68
TOTAL		**447**	**173**	**904**	**1524**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

1.1.6.2 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara 31 Desember 2024 sebanyak 2.957 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Golongan

No	PD / Unit Kerja	Golongan																	Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	12
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / Unit Kerja	Golongan																	Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	561	-	42	10	-	-	-	-	-	-	-	623
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	18	-	3	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	104
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

No	PD / Unit Kerja	Golongan																	Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	10	-	1845	-	-	-	-	-	-	-	-	1855
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	13
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	70	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	79
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	-	-	-	-	173	-	4	16	-	-	-	-	-	-	-	193
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

No	PD / Unit Kerja	Golongan																	Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**-**	**782**	**-**	**2051**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.957**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

1.1.7 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Capaian Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4 = (3 / 2) * 100*
Pendapatan Asli Daerah	**141.556.738.834,00**	**133.379.842.184,40**	**94,22**
Pajak Daerah	30.050.000.000,00	27.663.738.746,01	92,06
Retribusi Daerah	86.317.290.000,00	93.784.976.878,78	108,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.211.867.299,00	8.451.510.307,00	63,97
Lain-Lain PAD yang Sah	11.977.581.535,00	3.479.616.252,61	29,05
Pendapatan Transfer	**1.324.579.290.597,00**	**1.281.410.622.741,00**	**96,74**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.235.542.689.000,00	1.235.714.217.108,00	100,01
Dana Perimbangan	1.028.851.584.000,00	1.029.716.994.908,00	100,08
Dana Insentif Daerah	6.867.270.000,00	6.867.270.000,00	100,00
Dana Desa	199.823.835.000,00	199.129.952.200,00	99,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.036.601.597,00	45.696.405.633,00	51,32
Bagi Hasil Pajak Provinsi	87.036.601.597,00	45.696.405.633,00	52,50
Bantuan Keuangan Provinsi	2.000.000.000,00	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**27.463.741.837,00**	**22.214.114.931,00**	**80,89**
Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	13.463.233.459,00	8.818.078.129,00	65,50
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.000.508.378,00	13.396.036.802,00	95,68
Belanja Daerah	**1.442.561.794.484,00**	**1.375.858.189.855,41**	**95,38**
Belanja Operasi	1.062.938.481.200,00	1.014.674.115.403,47	95,46
Belanja Modal	102.975.845.013,00	99.079.324.655,94	96,22
Belanja Tidak Terduga	3.531.157.371,00	3.454.947.220,00	97,84
Belanja Transfer	273.116.310.900,00	258.649.802.576,00	94,70
Surplus/Defisit	**51.037.976.784,00**	**61.421.850.868,99**	**120,35**
Pembiayaan Daerah	**(51.037.976.784,00)**	**(51.017.199.959,13)**	**99,96**
Penerimaan Pembiayaan	18.272.950.857,00	18.264.856.637,87	99,96
Pengeluaran Pembiayaan	**69.310.927.641,00**	**69.282.056.597,00**	**99,96**
Pembiayaan Netto	**(51.037.976.784,00)**	**(51.017.199.959,13)**	**99,96**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**10.404.650.909,86**	**0,00**

Sumber : LRA LKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, un-audited

1.1.8 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.6
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	355.940.802.854,00	327.450.013.570,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	87.012.591.473,00	87.128.188.651,50
		Program Pengembangan Kebudayaan	130.000.000,00	129.735.600,00
2	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97.717.051.182,00	92.553.415.834,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61.593.303.779,00	58.582.477.845,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.898.900.950,00	1.762.861.730,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	316.329.000,00	239.205.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.749.053.000,00	1.739.703.000,00
3	Rsu Daerah Tarutung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.004.457.025,00	34.017.507.181,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78.975.132.000,00	90.435.278.823,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.232.901.638,00	8.955.095.961,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.797.325.000,00	9.251.502.842,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	44.284.436.893,00	41.050.644.820,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20.000.000,00	19.564.700,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.319.937.000,00	15.137.086.570,47
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.062.400.000,00	8.050.142.244,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.424.361.720,00	1.323.037.810,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.973.748.382,00	9.830.056.252,00
		Program Pengembangan Perumahan	125.070.000,00	118.458.000,00
		Program Kawasan Permukiman	64.955.000,00	62.113.300,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.693.902.580,00	1.684.103.200,88
		Program Penatagunaan Tanah	209.761.810,00	194.440.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.707.867.562,00	9.370.713.158,00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.775.443.150,00	6.759.440.800,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	210.000.000,00	210.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.302.807.998,00	3.103.492.826,00
		Program Penanggulangan Bencana	241.092.000,00	233.805.050,00
8	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.721.475.135,00	2.516.711.461,00
		Program Pemberdayaan Sosial	42.544.000,00	42.413.800,00
		Program Rehabilitasi Sosial	169.276.000,00	112.805.770,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	58.944.700,00	58.244.700,00
		Program Penanganan Bencana	56.000.000,00	54.010.000,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	28.177.400,00	28.062.000,00
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
9	Dinas Ketenagakerjaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.980.894.187,00	2.235.460.051,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	169.999.800,00	168.499.100,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	40.000.000,00	38.222.937,00
		Program Hubungan Industrial	281.699.550,00	76.408.310,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	142.420.700,00	132.006.600,00
		Program Perlindungan Perempuan	71.835.800,00	62.520.304,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	75.743.500,00	73.015.800,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100.000.000,00	99.627.900,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	90.000.000,00	87.881.900,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.180.326.091,00	5.050.851.353,00
		Program Pengendalian Penduduk	349.999.900,00	347.740.881,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.828.112.550,00	3.642.550.668,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.371.791.700,00	2.304.476.297,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.583.707.513,00	4.301.979.831,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	320.000.000,00	314.826.700,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000,00	49.774.400,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	9.779.400,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	250.000.000,00	246.968.200,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.600.000.000,00	1.565.977.765,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	120.000.000,00	115.310.750,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
12	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.237.755.765,00	7.103.287.563,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.530.982.000,00	1.519.544.100,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	31.550.900,00	31.023.100,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	54.131.200,00	51.327.200,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.152.475,00	8.278.800,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.448.375,00	24.630.800,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.069.325.525,00	1.049.937.425,24
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.062.867.545,00	2.968.440.591,00
		Program Pendaftaran Penduduk	552.981.300,00	551.068.069,00
		Program Pencatatan Sipil	27.099.000,00	27.089.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.054.400,00	12.033.600,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1.605.900,00	1.595.900,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.364.157.328,00	3.218.436.232,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	85.899.625,00	80.756.550,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	147.499.900,00	144.419.555,00
15	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.309.371.769,00	4.159.860.843,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	243.799.000,00	231.338.200,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Pengelolaan Pelayaran	7.480.000,00	5.463.300,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.431.505.716,00	3.287.296.637,00
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	350.537.500,00	347.303.800,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	40.255.325,00	34.839.090,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	69.936.050,00	66.977.800,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.157.632.708,00	6.651.585.155,00
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25.000.000,00	19.743.500,00
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	231.068.500,00	231.068.500,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	346.551.500,00	344.126.184,00
		Program Pengembangan Umkm	545.496.000,00	542.879.157,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.666.949.381,00	2.571.636.214,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.175.000,00	23.823.650,00
		Program Promosi Penanaman Modal	7.030.000,00	901.300,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	59.999.900,00	45.028.600,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	569.981.000,00	493.235.300,00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.000.000,00	69.884.500,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.504.338.761,00	2.361.575.600,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	70.000.000,00	-
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	770.000.000,00	729.724.900,00
20	Dinas Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.170.834.189,00	2.989.437.323,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Pembinaan Perpustakaan	250.070.825,00	212.099.491,86
		Program Pengelolaan Arsip	20.000.000,00	17.811.100,00
Urusan Pilihan				
21	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.904.513.947,00	4.640.652.913,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.495.356.000,00	7.568.532.623,00
		Program Pemasaran Pariwisata	39.195.825,00	39.165.225,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	21.624.000,00	20.278.200,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.277.545.600,00	1.222.994.968,00
	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	795.193.648,00	790.877.400,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	66.699.850,00	59.769.700,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	116.324.450,00	112.351.300,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	139.999.950,00	139.122.100,00
	Dinas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.598.826.000,00	10.304.266.630,10
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	305.000.000,00	299.141.120,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	60.000.000,00	59.341.150,00
		Program Penyuluhan Pertanian	1.067.100.000,00	1.011.028.300,00
Urusan Administrasi Pemerintahan				
23	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.422.112.198,00	22.276.251.637,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.372.760.575,00	3.329.129.589,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	650.715.325,00	645.925.164,00
24	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.585.295.912,00	25.849.516.418,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.085.117.100,00	15.026.361.176,00
Urusan Perencanaan				
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.382.596.401,00	4.086.156.458,00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	759.334.400,00	737.486.191,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	271.827.775,00	255.868.800,00
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	39.855.000,00	31.893.500,00
Urusan Keuangan				
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.565.517.342,00	5.633.735.668,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	281.522.636.391,00	266.056.390.028,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	295.913.775,00	234.403.886,90
27	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.191.064.126,00	3.925.279.947,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	802.000.000,00	783.890.655,00
Urusan Kepegawaian				
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.440.909.973,00	3.299.170.715,00
		Program Kepegawaian Daerah	440.628.150,00	399.281.816,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.510.900,00	31.744.900,00
Urusan Pengawasan				
29	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.811.565.225,00	7.489.780.717,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.494.630.000,00	1.457.979.300,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	255.974.000,00	237.984.900,00
Urusan Kewilayahan				
30	Kantor Kecamatan Tarutung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.574.313.303,00	6.420.006.600,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.765.000,00	7.970.500,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.507.764.787,00	1.433.418.673,46
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.999.700,00	4.861.500,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.599.850,00	25.925.800,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.050,00	3.382.800,00
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.277.835.042,00	1.743.235.501,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.609.000,00	5.283.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.110.000,00	15.663.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.400.000,00	-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.607.500,00	3.336.000,00
32	Kantor Kecamatan Adiankoting	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.301.659.050,00	1.227.279.491,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.708.000,00	28.491.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.400.000,00	7.760.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.010.000,00	-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.310.000,00	9.242.000,00
33	Kantor Kecamatan Sipoholon	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.034.005.236,00	1.919.929.363,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.936.925,00	46.966.540,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.003.300,00	192.467.100,00
34	Kantor Kecamatan Pahae Julu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.583.419.975,00	2.506.757.527,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	47.348.000,00	47.348.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199.999.600,00	188.531.200,00
35	Kantor Kecamatan Pahae Jae	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.960.246.941,00	1.919.033.944,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	54.382.000,00	53.546.200,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.850.000,00	2.850.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199.999.814,00	199.044.700,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
36	Kantor Kecamatan Purbatua	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.134.838.221,00	1.076.825.030,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.520.000,00	39.082.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.850.000,00	11.850.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
37	Kantor Kecamatan Simangumban	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.064.442.363,00	1.036.147.147,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.344.000,00	17.766.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.539.750,00	13.325.500,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.474.000,00	8.080.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.696.800,00	34.281.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.668.000,00	12.923.000,00
38	Kantor Kecamatan Sipahutar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.048.361.683,00	1.974.207.374,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.351.750,00	6.136.500,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.025.000,00	18.000.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.924.000,00	6.224.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.250.000,00	24.460.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.700.000,00	1.150.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
39	Kantor Kecamatan Pangaribuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.505.288.386,00	1.460.446.433,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	64.340.000,00	64.215.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.400.000,00	10.400.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	4.784.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.960.000,00	8.950.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.220.000,00	3.200.000,00
40	Kantor Kecamatan Garoga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.588.043.399,00	1.532.572.257,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	44.970.000,00	43.910.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.000.000,00	14.565.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	8.800.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.120.000,00	40.275.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.430.000,00	17.245.000,00
41	Kantor Kecamatan Siborongborong	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.289.286.766,00	3.170.858.992,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	44.386.500,00	33.500.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	217.497.200,00	192.566.438,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	500.000,00	-

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.800.000,00	28.800.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.070.000,00	-
42	Kantor Kecamatan Pagaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.518.413.046,00	1.476.347.403,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.987.500,00	17.879.500,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.509.400,00	19.203.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.641.000,00	1.641.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.741.000,00	21.600.000,00
43	Kantor Kecamatan Parmonangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.155.932.895,00	1.093.241.450,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.952.800,00	30.982.800,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.972.200,00	18.355.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00
44	Kantor Kecamatan Muara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.790.208.329,00	1.595.308.240,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	63.550.000,00	39.142.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.988.980,00	13.530.400,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	21.600.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
Urusan Pemerintahan Umum				
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.851.226.946,00	2.764.184.464,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	466.865.600,00	440.201.500,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	55.369.658.069,00	55.369.658.067,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.135.000,00	32.995.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	304.000.000,00	300.808.800,00

Sumber data : LRA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini *(existing)* dengan kondisi yang diharapkan *"gap expectation"*. Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Tapanuli Utara Tahun 2014-2019). Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dearah dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019), isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya terdiri dari beberapa sektor/lapangan usaha yang membentuknya, begitu pula PDRB Tapanuli Utara yang dibentuk oleh 17 sektor/lapangan usaha. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 kontribusi sektor-sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara cenderung menurun dan fluktuatif, yaitu pada sektor pertanian, perdagangan, dan sektor konstruksi. Pertanian merupakan sektor kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Tapanuli Utara, pada tahun 2018 tercatat kontribusinya sebesar 45,28 persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,97 persen, dan naik melambat pada tahun 2020 sebesar 43,31 persen. Sektor perdagangan juga merupakan sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara. Pada tahun 2018 kontribusi dari sektor ini tercatat

sebesar 14,48 persen, kemudian meningkat engan kontribusi sebesar 15,26 persen pada tahun 2019 dan terus mengalami mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,68 persen di tahun 2020.

2. Permasalahan Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 sebesar 9,37 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,82 persen dan lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (8,75 persen) dengan jumlah pendapatan perkapita per bulan sebesar Rp. 406.813. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu belum terjangkau secara optimal;
b. Masih rendahnya ketrampilan/keahlian yang dimiliki sebagian masyarakat;
c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan
d. Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah.

Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap permasalahan pengangguran. Tingginya angka pengangguran bukan semata-mata karena ketiadaan lapangan pekerjaan namun juga karena rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada dan tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja.

3. Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Beberapa permasalahan bidang Pendidikan antara lain fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, akses menuju fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih kurang, masih

kurangnya tenaga kesehatan, masih terbatasnya fasilitas pelayanan Kesehatan, masih adanya permasalahan balita gizi buruk, masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa

Ketersediaan pangan pokok semakin menurun akibat alih fungsi lahan pertanian dan penurunan produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat namun dalam keterkaitannya dengan penyediaan pangan dan keamanan cadangan pangan, ini menjadi masalah karena luas tanam menjadi berkurang, dan produksi pangan pun akan menurun, sedangkan kebutuhan pangan selalu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagai upaya mempertahankan produksi pangan, telah ditetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang masih perlu pengawalan dari sisi teknis pelaksanaan supaya tujuan dari ditetapkannya Perda itu dapat diwujudkan. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang dan aman/B2SA). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tapanuli Utara belum mencapai 100%.

5. Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Hingga tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 50,95 persen dan irigasi masih 67,42 persen. Pemenuhan sistem penyediaan air minum yang layak juga belum maksimal, masih ada nya sumber air yang tidak terlindungi. Pipanisasi air minum belum menjangkau seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Bahkan cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya masih 21,06 persen. Rendahnya

daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pertumbuhan daerah.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup harus tetap ditingkatkan guna mencegah dan mengendalikan kerusakan sumber daya alam dari dampak aktivitas sosial dan perekonomian. Mengembangkan bina lingkungan lestari antara lain dengan

a. mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya dalam pengolahan limbah rumah tangga;
b. meningkatkan daya dukung kawasan lindung;
c. mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air.

7. Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya

Permasalahan pada bidang Pariwisata dapat dilihat dari :

a. Penurunan Jumlah Wisatawan dari yang semula berjumlah 172.010 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 141.350 orang di tahun 2020, dan
b. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 sebesar Rp. 225.367.000.

Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu :

a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan
b. Amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);

c. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota;
d. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata masih kurang profesional, dan
e. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan kebijakan pembatasan di berbagai daerah, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan sosial distancing di tempat umum menyebabkanturunnya jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

8. Perkembangan desa yang lambat

Desa tidak berkembang akibat pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal desa yang belum optimal, kurangnya partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam perencanaan desa.

9. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Hal ini dapat dilihat dari :

1) Pengelolaan keuangan daerah, dimana belum teritegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat. Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan rata-rata selama tahun 2014-2018 mencapai 60,30 persen (belanja tidak langsung) dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Rendahnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga menjadi masalah. Permasalahan berikutnya terkait dengan tertib

administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

2) Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi. Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi masih perlu mendapatkan perhatian. Penempatan pegawai belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, keadilan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindah tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

3). Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain :

1. Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, efektif, efesien dan akuntabel;
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah, profesional, cepat, tepat dan terpercaya;
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta
5. Belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS.

1.2.2 Visi dan Misi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang *(clarity of direction)*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu :

"**Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata "**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tapanuli Utara **:** adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Lumbung Pangan **:** bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan;

Lumbung Sumber Daya Manusia : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur);

Berkualitas : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah;

Daerah Tujuan Wisata : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government.*

1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.7
Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi I		
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infra struktur kemandirian pangan yang di fasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Dinas Pertanian
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Pembudidaya Ikan 2. Luas Lahan Budidaya 3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan pangan	Jumlah Desa/Kelurahan rentan pangan yang ditangani	Dinas Ketahanan Pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah 2. Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 2		
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negari	Cakupan pelaksanaan event promosi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pemberdayaan dan pelindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi 3		
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpatisipasi dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar 2. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan RSUD Tarutung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan Minuman yang dibidang agar memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak Terlayani (Unmeet Need)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Misi 4		
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan	Dinas Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing Persentase pembinaan organisasi kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5		
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata		

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dibenahi	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Event/promosi dan pemasaran kepariwisataan yang diikuti dan dilaksanakan	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
Misi 6		
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kondisi Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUTR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	
Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni Persentase kawasan pemukiman kumuh	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 3. Persentase Kepemiliksan Kartu Pengawasan	Dinas Perhubungan

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Angkutan Pedesaan	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	Dinas PUTR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ketersedian Dokumen Tata Ruang	Dinas PUTR
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3. (IKTL) 4. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana 2. Respon Time mencapai lokasi Bencana 3. Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	BPBD
Misi 7		
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri		
Program Penataan Desa	Cakupan fasilitasi penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
Misi 8		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Level maturitas SPIP 2. Level Kapabilitas APIP	Inspektorat
Program Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan administrasi umum	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan program perekonomian dan pembangunan	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
Program Pengembangan Aparatur	Capaian pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase aparatur mengikuti diklat struktural 2. Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase agenda kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD 2. Persentase penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretariat DPRD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data asset yang akurat	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase capaian penerimaan pajak daerah 2. Persentase capaian retribusi daerah 3. Persentase capaian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Persentase capaian pendapatan lain-lain yang sah	Badan Pendapatan Daerah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan aplikasi e-goverment yang terintegrasi	
Program Perlindungan dan jaminan Sosial	1. Persentase Fakir Miskin dan orang tidak mampu 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Dinas Sosial
Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Kepemilikan Kartu Indetitas Anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun 2. Cakupan Penerbitan Akta Kawin 3. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi 2. Persentase hasil monitoring terhadap	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pencapaian prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah 2. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian dan tingkat kelengkapan data informasi kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan SDM	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang ditangani	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelaksanaan penegakan Perda	

1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun tema Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 masih mengacu pada tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yaitu "Sinergitas Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara" yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ke- empat yaitu memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi dengan fokus :
    a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum SPAM, sistem pengolahan air limbah/ SPAL, peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
    b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM
    c. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata
    d. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan
    e. Perlindungan sosial
2. Peningkatan ketahanan pangan dengan fokus :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya
c. Peningkatan diversfikasi pangan

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan fokus :
   a. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular)
   b. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
   c. Meningkatkan layanan pendidikan
   d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan fokus :
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Materi muatan SPM mencakup :

1. Jenis Pelayanan Dasar;
2. Mutu Pelayanan Dasar; dan
3. Penerima Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas :

Tabel 1.8
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Bidang SPM	Dasar	PD Pelaksana
1	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
4	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Perumahan Rakyat		

No	Bidang SPM	Dasar	PD Pelaksana
6	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 – 2025;
5. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1) SPM Bidang Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu. Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP. Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan.

2) SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah merupakan mandat yang harus dilakukan daerah. Pelaksanaan SPM ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai ditiap wilayah.

3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum dan penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai jaminan pelayanan sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur selain fasilitasi juga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa, sehingga infrastruktur merupakan unsur penting dalam mendukung terciptanya keberhasilan

pembangunan. Infrastruktur juga merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, pembukaan daerah terisolasi serta mempersempit kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, saluran irigasi dan jaringan air minum yang dikelola secara baik dengan memperhatikan perencanaan tata ruang akan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka utama pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi disamping juga memperhatikan infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bertujuan untuk pemerataan pembangunan di kabupaten yang mencakup sejumlah hal, salah satunya adalah hunian layak. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ekonomi akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang transportasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan akan berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang di perkotaan, seperti pipa air minum dan sanitasi serta pengolahan dan pengelolaan limbah. Keseluruhan dari pembangunan infrastruktur ini akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, investasi serta sosial budaya dengan harapan kehadiran infrastruktur ini akan memudahkan aliran arus barang dari dan ke dalam daerah. Selain itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik.

dan jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa untuk pelayanan dasar pada SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik merupakan tugas pokok Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten tidak dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

4) SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Manajemen pemerintahan yang efektif dilakukan dengan melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui

penyediaan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disiagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara dalam hal bencana berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan.

Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan

kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

5) SPM Bidang Sosial

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Sedangkan kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
SPM PENDIDIKAN							
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	44,62%	48,21%	Dinas Pendidikan	-
2.	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (D/MI, SMP/MTs)	85,91%	73,62%	Dinas Pendidikan	-
3.	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah WN usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi Dan Pendidikan kesetaraan	100%	100%	Dinas Pendidikan	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
SPM KESEHATAN							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	75,7%	68,67%	Dinas Kesehatan	-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	66,8%	63,43%	Dinas Kesehatan	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	70,01%	99,91%	Dinas Kesehatan	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	85,46%	73,07%	Dinas Kesehatan	-
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	99,66%	Dinas Kesehatan	-
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	57%	23,84%	Dinas Kesehatan	-
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	80,22%	Dinas Kesehatan	-
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	14,33%	Dinas Kesehatan	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita DM yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	90,34%	Dinas Kesehatan	-
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita ODGJ Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN dengan Ganguan Jiwa Berat yang yang terlayani kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	-
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN terduga TBC yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	-
12.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Resiko teinfeksi Virus yang melemah kan daya tubuh manusia (HIV))	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	-
PEKERJAAN UMUM							
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum kabupaten	Program Penyediaan SPAM	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	28,83	34,28	Dinas PUPR	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten	Program Pengelolaan SPAL	Jumlah WN yang memperoleh layanan air limbah domestic	79,5	89,32	Dinas PUPR	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
PERUMAHAN							
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permuki man	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikatego rikan bencana Kabupaten
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permuki man	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikatego rikan bencana Kabupaten
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.	Pelayanan Ketentra man Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	Dinas SATPOL PP	-
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggu Langan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	BPBD	-
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggu langan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	BPBD	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
4.	Pelayanan Penyelama tan dan evakuasi Korban Bencana	Program Penanggu Langan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	100%	BPBD	-
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Dinas SATPOL PP	-
SOSIAL							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	5 Orang	Dinas Sosial	-
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	1 Orang	Dinas Sosial	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	0	Dinas Sosial	-
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN/Gelandan gan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi sosial dasar	n/a	24 Orang	Dinas Sosial	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		PD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
			tuna sosial diluar Panti				
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten	Program Penanganan Bencana	Jumlah WN korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	140 KK (60,6%)	Dinas Sosial	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

Komitmen yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 adalah :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
2. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Secara ringkas dapat diuraikan beberapa capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Utara tahun 2024 mencapai 77,48, meningkat 0,62 poin (0,81 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (76,86). Selama 2021–2024, IPM Sumatera Utara rata-rata meningkat sebesar 0,47 persen per tahun. Peningkatan IPM Tapanuli Utara 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,36 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,73 menjadi 13,74 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,22 tahun, dari 10,09 tahun menjadi 10,31 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 267 ribu rupiah (2,20 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,48	73,85	74,10	74,36
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,70	13,72	13,73	13,74
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,99	10,00	10,09	10,31
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	11,710	11,892	12,115	12.382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,06	76,43	76,86	77,48

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

Grafik 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara

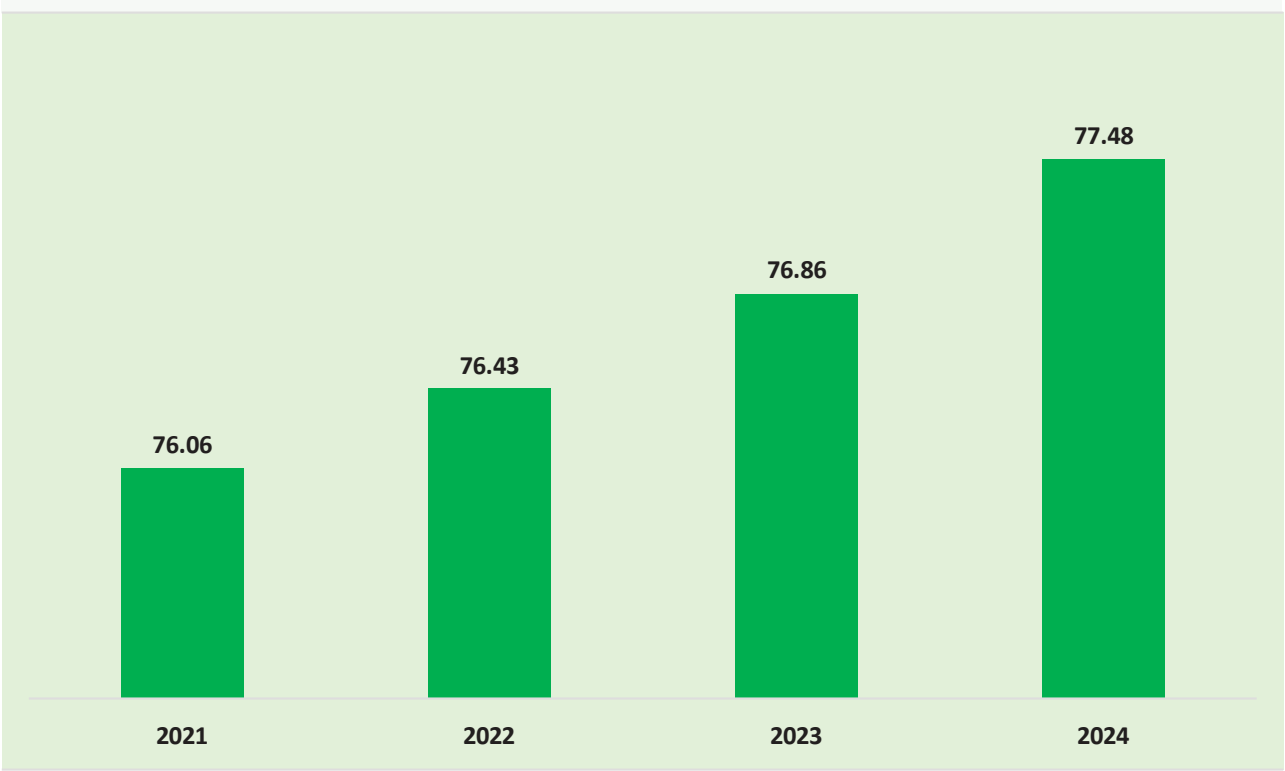

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

2. Angka kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan didefenisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan sebesar 0,33 poin persen, yaitu dari 8,54 persen (26,39 ribu jiwa) tahun 2023 menjadi 8,21 persen (25,51 ribu jiwa) tahun 2024.

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2016 – 2024

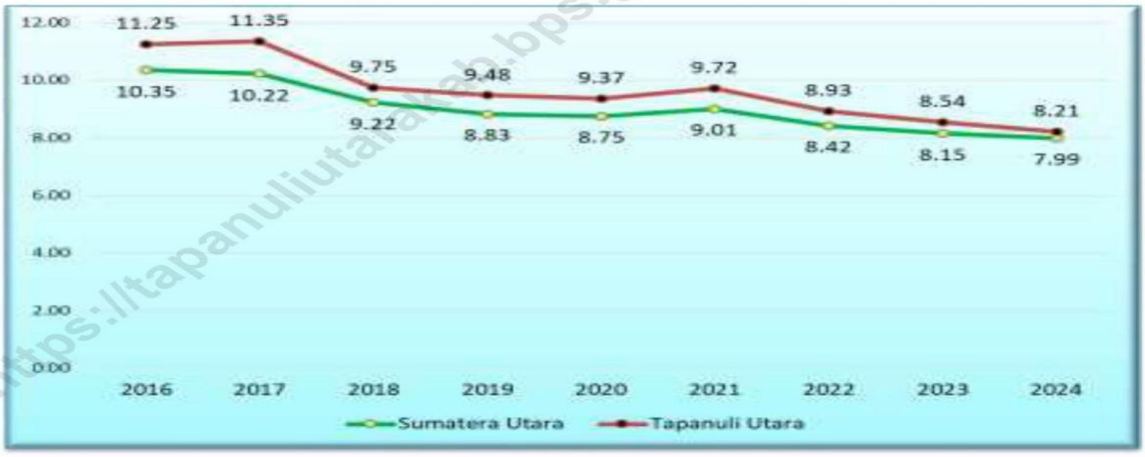

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

Turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, sejatinya tidak lepas dari intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mewujudkan salah satu visi Kabupaten Tapanuli Utara di tahun terakhir periode 2019-2024 yaitu "Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas". Secara ringkas, program dan kegiatan dimaksud yaitu :

1) Program pendidikan :
   a. Program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pendidikan;

b. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yaitu minimal S1/DIV. Guru dengan kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SD direalisasikan sebesar 89,25 persen atau sebanyak 3.237 orang guru SD; Guru dengan kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMP direalisasikan sebesar 95,69 persen atau sebanyak 1.467 orang guru SMP.

2) Program kesehatan :
   a. Melaksanakan intervensi serentak penanganan stunting, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah gizi;
   b. Melaksanakan pelayanan minimal kesehatan kepada masyarakat disetiap pusksmas;
   c. Menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam hal proteksi kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Dan pada tahun 2024, Kabupaten Tapanuli Utara telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan semesta adalah sistem jaminan kesehatan yang memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu kepada seluruh warga terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
3) Program infrastruktur, yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, berupa pembangunan baru maupun rehabilitasi jaringan perpipaan.
4) Program sosial, yaitu pemberian bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk tahun 2024, TPT di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan 0,18 persen poin dibandingkan pada tahun 2023. Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2024, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2.386 orang dengan rincian Pernah Bekerja sebesar 672 orang (meningkat 263 orang dibandingkan pada tahun 2023) dan Tidak Pernah Bekerja sebesar 1.714 orang (meningkat 190 orang dibandingkan pada tahun 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan TPT adalah :

1. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan Angkatan Kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
2. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sehingga sulit untuk mencari pekerjaan ataupun berwirausaha.
3. Terjadinya PHK atau kontrak kerja yang telah berakhir.
4. Berhenti bekerja atas kemauan sendiri *(resign)* karena faktor tertentu.

Pada tahun 2024, pencari kerja yang dapat difasilitasi pelatihan berbasis kompetensi baik melalui APBD Kabupaten maupun instansi lainnya jumlahnya sangat terbatas oleh karena keterbatasan anggaran. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu bertambahnya jumlah pengangguran terbuka khususnya yang Tidak Pernah Bekerja. Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 mengalami kenaikan, tetapi masih jauh dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan juga Nasional.

Grafik 2.3
Perkembangan TPT Tahun 2020-2024

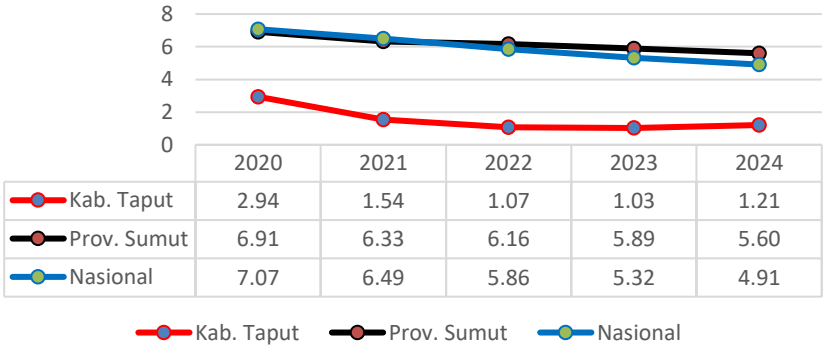

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Taput	2.94	1.54	1.07	1.03	1.21
Prov. Sumut	6.91	6.33	6.16	5.89	5.60
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan dan tetap oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menurunkan TPT yaitu melaksanakan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja (pencari kerja dan tenaga kerja) melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk tahun 2024, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 8 paket dengan masing-masing paket berjumlah 16 orang peserta sehingga total peserta yang dilatih sebanyak 128 orang.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 meningkat sebesar 0,02 poin persen dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 4,75 persen tahun 2023 menjadi 4,77 persen tahun 2024. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2024 sebesar 11,279.15 milyar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 10.489,70 milyar rupiah, sedang PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Tahun 2023 sebesar 6.615,95 milyar rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 6.931,24 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara jika dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2024 sebesar 4,77 persen dan tahun 2023 sebesar 4,75 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2024 kontribusi sektor tersebut sebesar 44.85 persen, yang diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16.29 persen, dan Lapangan Usaha Konstruksi sebagai kontributor terbesar ketiga yaitu sebesar 13.89 persen. Sedangkan sisanya sebesar 34,97 persen disumbangkan oleh empat belas lapangan usaha lainnya.

5. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang diukur dengan Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,020 poin dibanding tahun 2023, yaitu dari 0,262 menjadi 0,242 tahun 2024, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 relatif lebih merata dibandingkan dengan tahun 2023.

Secara ringkas dapat kami sampaikan tabel capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,86	77,48	Nilai
2	Angka Kemiskinan	8,54	8,21	Persen
3	Angka Pengangguran	1,03	1,21	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,75	4,77	Persen
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah/perkapita/tahun)	32.466*	34.494**	(ribu rupiah/ perkapita/ tahun)
6	Ketimpangan Pendapatan	0,262	0,242	Persen

Ket. : * : Angka Sangat Sementara
** : Angka Sangat Sangat Sementara

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	**Pendidikan**	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar ----------X 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan = $\frac{9.810}{11.539}$ x 100% = 85,01%	**85,01%**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar ----------X 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan = $\frac{40.155}{41.481}$ x 100% = 96,80%	**96,80%**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----------X 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan = $\frac{21.138}{22.332}$ x 100% = 94,65%	**94,65%**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----------X 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan = 283/283 x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	**Kesehatan**	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----------X 100% Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 275/331.475 x 100% = 0,82%	**0,82%**	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi ----------X100% Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota = 2/2 x 100% = 100%	**100%**	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----------X 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota = 4.369/4.016 x 100% = 108,78%	**108,78%**	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----------X 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota = 3.775 / 4.016 x 100% = 93,99%	**93,99%**	Dinas Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota = 3.791 / 4.058 x 100% = 93,42%	**93,42%**	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah balita di kabupaten/kota = 18.264 / 19.815 x 100% = 92,17%	**92,17%**	Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 62.623 / 63.426 x 100% = 98,73%	**98,73%**	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 111.082 / 91.596 x 100% = 121,27%	**121,27%**	Dinas Kesehatan	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah warga negara usia 60 keatas di kabupaten/kota = 39.787 / 40.155 x 100% = 99,08%	**99,08%**	Dinas Kesehatan	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota = 10.712 / 10.720 x 100% = 99,92%	**99,92%**	Dinas Kesehatan	
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota = 2.284 / 2.284 x 100% = 100%	**100%**	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota = 734/624 x 100% = 117,62%	**117,62%**	Dinas Kesehatan	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----------X 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota = 4.827/4.827 x 100% = 100%	**100%**	Dinas Kesehatan	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar ----------X 100% Jumlah orang dengan dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota = 6.617/6.961 x 100% = 95,05%	**95,05%**	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----------X 100% Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) = 0/1 x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----------X 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) ----------X 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota = $\frac{2{,}1225 \text{ Ha}}{2.172 \text{ Ha}}$ x 100% = 0,09%	**0,09%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----------X 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota = $\frac{1.125}{70.601}$ x 100% = 1,59%	**1,59%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----------X 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota = $\frac{800}{71.559}$ x 100% = 1,11%	**1,11%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya ----------X 100% Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku = $\frac{108}{108}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----------X 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota = $\frac{507,600}{1.074,009}$ x 100% = 47,26%	**47,26 %**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		8. Rasio tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ----------X 100% Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = $\frac{0}{67}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----------X 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = $\frac{49}{49}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
4	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----------X 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Suket Kepala Dinas
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----------X 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Suket Kepala Dinas
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----------X 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = $\frac{20,98}{27,38}$ x 100% = 19,05%	**76,62%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni ----------X 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota = $\frac{438}{71.559}$ x 100% = 0,61%	**0,61%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----------X 100% Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota = $\frac{1.134}{71.559}$ x 100% = 1,58%	**1,58%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----------X 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = $\frac{10}{10}$ x 100% = 100%	**100%**	Satpol PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----------X 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = $\frac{3}{3}$ x 100% = 100%	**100%**	Satpol PP	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----------X 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = $\frac{155}{155}$ x 100% = **100%**	**100%**	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----------X 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 155 / 92.688 x 100% = 0,16%	**0,16%**	BPBD	
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----------X 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 538 / 538 x 100% = 100%	**100%**	BPBD	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan ----------X 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 38 / 38 x 100% = 100%	**100%**	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		7. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun ---------- jumlah seluruh kejadian kebakaran = $\frac{435}{38}$ menit = 11,4 menit	**11,4 menit**	Satpol PP	
6	**Sosial**	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti ----------X 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = $\frac{160}{160}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----------X 100% Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = $\frac{150}{150}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Sosial	
7	**Tenaga Kerja**	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----------X 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan = $\frac{10}{10}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Ketenaga kerjaan	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----------X 100% Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan = $\frac{207}{1.923}$ x 100% = 10,76%	**10,76%**	Dinas Ketenaga kerjaan	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) ----------X 100% Jumlah Tenaga Kerja = $\frac{6.931,24}{1.923}$ x 100% = 360,43%	**360,43%**	Dinas Ketenaga kerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak ----------X 100% Jumlah Perusahaan = $\frac{26}{26}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Ketenaga kerjaan	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan ----------X 100% Jumlah Pencaker yang terdaftar = $\frac{142}{222}$ x 100% = 63,96%	**63,96%**	Dinas Ketenaga kerjaan	
8	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD ----------X 100% Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD = $\frac{8.762.648.150}{248.482.903.818}$ x 100% = 3,52%	**3,52%**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----------X 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) = 33/33 x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan ----------X 100.000 Jumlah penduduk perempuan = 9/167.137 x 100.000 = 5,38	**5,38**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	**Pangan**	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota ----------X 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota = 48,85/100 x 100% = 45,85%	**45,85%**	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
10	**Pertanahan**	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----------X 100% Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = $\frac{38.823,50}{38.823,50}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum ----------X 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasiltasi umum = $\frac{126.099}{84.100.000}$ x 100% = 0,14%	**0,14%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ----------X 100% Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan = $\frac{38.823,50}{38.823,50}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha ----------X 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat (KKPR DARI PUTR)	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----------X 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan = $\frac{38.823,50}{38.823,50}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		6. Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----------X 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
11	**Lingkungan Hidup**	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapanuli Utara : IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) IKLH = (0,376x70,00) + (0,405x94,75) + (0,219x76,89) = 81,53	**81,53**	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total Volume Sampah yang ditangani ----------X 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota = 59.889 / 272.223,84 x 100% = 100%	**21,99%**	Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Ketetapan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----------X 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 0 / 38 x 100% = 0%	**0%**	Dinas Lingkungan Hidup	
12	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	1. Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----------X100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 228.824 / 228.870 x 100% = 99,97%	**99,97%**	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----------X100% Jumlah anak usia 0-17 tahun = 53.999 / 102.599 x 100% = 52,63%	**52,63%**	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----------X100% Jumlah anak usia 0-18 tahun = $\frac{105.208}{107.344}$ x 100% = 98,01%	**98,01%**	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		4. Jumlah Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----------X100% Jumlah PD = $\frac{4}{4}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
13	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	1. Persentase pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----------X 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n) = $\frac{25}{58}$ x 100% = 43,10%	**43,10%**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----------X 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = $\frac{17}{171}$ x 100% = 9,940%	**9,940%**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
14	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\,i$ $ASFRi = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = $\frac{5(5+48,7+149,9+193,2+125,4+38,7+5,5)}{1.000}$ = $\frac{5\ (566,4)}{1.000}$ = $\frac{2.832}{1.000}$ = 2,83	**2,83**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2. Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (MCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern ----------X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = $\frac{17.959}{34.810}$ x 100% = 51,59%	**51,59%**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----------X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 5.726 / 34.810 x 100% = 16,44%	**16,44%**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	**Perhubungan**	1. Rasio Konektivitas Kabupaten /kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	**13,96**	Dinas Perhubungan	
		2. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	**0,01**	Dinas Perhubungan	
16	**Komunikasi Dan Informatika**	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo ----------X 100% Jumlah PD = 2 / 44 x 100% = 4,54%	**4,54%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----------X 100% Jumlah layanan publik = 4 / 6 x 100% = 66,66%	**66,66%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya ----------X 100% Jumlah penduduk = $\frac{214.747}{214747}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----------X 100% Jumlah seluruh Koperasi = $\frac{24}{134}$ x 100% = 17,91%	**17,91%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha ----------X 100% Jumlah Usaha mikro = $\frac{157}{163}$ x 100% = 96,31%	**96,31%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
18	**Penanaman Modal**	1. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota) ----------X 100% Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota (354.077.277.714-1.760.401.918.404)x100% 1.760.401.918.404 = -79,88%	**-79,88%**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota ----------X 100% Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota = 3.277 / 85.407 x 100% = 3,83%	**3,83%**	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan ----------X 100% Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota = 545 / 85.407 x 100% = 0,63%	**0,63%**	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	**5 medali**	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
20	**Statistik**	1. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----------X 100% Jumlah PD = $\frac{44}{44}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----------X 100% Jumlah PD = $\frac{44}{44}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	**Persandian**	1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----------X 100% Jumlah area penilaian = $\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	**0%**	Dinas Komunikasi dan Informatika	Suket Kepala Dinas
22	**Kebudayaan**	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan ----------X 100% Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan = $\frac{13}{13}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	**Perpustakaan**	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	**68,96**	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM \times 100}{ALM} X100\%$	**30,11**	Dinas Perpustaaan	
24	**Kearsipan**	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kineja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 78,90% i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 70,02% s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 95,39% j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 9,75% T = (a + i + s + j)/4 T = $\frac{(78,90\% + 70,02\% + 95,39\% + 9,75\%)}{4}$ T = 63,51%	**63,51%**	Dinas Perpustaaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yangdigabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis danarsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis denganNSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = $\frac{(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)}{6}$ T = 0%	**0%**	Dinas Perpustaaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
25	**Kelautan Dan Perikanan**	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota ----------X 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 2.966,64 / 3.000 x 100% = 98,88%	**98,88%**	Dinas Ketahanan Pangan	
26	**Pariwisata**	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n – 1) ----------X 100% Jumlah wisatawan tahun n – 1 = 75 / 235 x 100% = 31,91%	**31,91%**	Dinas Pariwisata	
		2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n – 1) ----------X 100% Jumlah wisatawan tahun n – 1 = 10.751 / 180.000 x 100% = 6%	**5,97%**	Dinas Pariwisata	
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----------X 100% Jumlah kamar yang tersedia **Keterangan :** Jumlah Kamar yang tersedia x 365 hari = 0 / 1 x 100% = 0%	**0%**	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB ----------X 100% Total PDRB Berlaku $= \frac{174,32}{6,931} \times 100\% = 2,51\%$	**2,51%**	Dinas Pariwisata	
		5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata ----------X 100% Total realisasi PAD $= \frac{1.958.950.239}{133.484.287.678.400} \times 100\% = 0,00147\%$	**0,001%**	Dinas Pariwisata	
27	**Pertanian**	1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----------X 100% Luas panen $= \frac{370.122,10 \text{ Ton}}{73.945,60 \text{ Ha}} \times 100\% = 5,005 \text{ Ton/Ha}$	**5,005 Ton/Ha**	Dinas Pertanian	
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakir Hewan Menular	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) ----------X 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) $= \frac{290}{12.002} \times 100\% = 2,41\%$	**2,41%**	Dinas Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
28	**Kehutanan**	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	Suket Kepala Dinas
29	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----------X 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = $\frac{1}{1}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Lingkungan Hidup	
30	**Perdagangan**	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----------X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota = $\frac{22}{22}$ x 100% = 100%	**100%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----------X 100% RDKK = 14.443,85 / 27.121,97 x 100% = 53%	**53%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	
		3. Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan ----------X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 0 / 1 x 100% = 0%	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas
31	**Perindustrian**	1. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----------X 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 546-463 / 463 x 100% = 17,90%	**17,92%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	
		2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%.	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas
		4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas
		5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Keterkinian informasi industri : ✓ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) ✓ Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Kelengkapan informasi industri meliputi: ✓ Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) ✓ Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) ✓ Informasi bahan bakar/energi (10%) ✓ Informasi tenaga kerja (10%) ✓ Informasi investasi (10%)	**0%**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	SP Kepala Dinas
32	**Transmigrasi**	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	**1**	Dinas Ketenagakerjaan	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	**1**		
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	1	**1**		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	**Perencanaan Keuangan**	1. Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan ----------X100% Jumlah APBD = 153.053.376.746 / 1.375.858.189.855,41 x 100% = 11,12%	**11,12%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Rasio PAD	Jumlah PAD ----------X100% Jumlah Pendapatan pada APBD = 133.483.719.814,40 / 1.437.108.457.496,40 x 100% = 9,28%	**9,28%**	Badan Pendapatan Daerah	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	**Level 3**	Inspektorat	-
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	**Level 3**	Inspektorat	-
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures ----------X100% Jumlah Belanja APBD = 986.940.269.606 / 1.375.858.189.855 x 100% = 71,73%	**71,73%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	**10 kali**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
2	**Pengadaan**	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----------X100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 0/721 x 100% = 0%	**0%**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----------X100% Jumlah seluruh pengadaan = 612/721 x 100% = 84,88%	**84,88%**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ----------X100% Jumlah belanja operasi dan modal = 109.899.011.070/1.113.753.440.059,41 x 100% = 9,86%	**9,86%**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Makro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	(Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2024 - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023) ----------X100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 = -81.771.753.340/134.001.358.323 x 100% = -61,02%	**-61,02%**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
3	**Kepegawaian**	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas ----------X100% Seluruh jumlah pegawai = 1.049 / 1.524 x 100% = 68,83%	**68,83%**	BKPSDM	
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----------X100% Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 173 / 1.524 x 100% = 11,35%	**11,35%**	BKPSDM	
		3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----------X100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 11 / 173 x 100% = 6,35%	**6,35%**	BKPSDM	
4	**Manajemen Keuangan**	1. Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	[Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi] -1 ----------X100% Total belanja APBD = 1.375.858.189.855 / 1.479.139.183.733 x 100% = 6,98%	**6,98%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ---------- - 1 X 100% Total PAD dalam APBD = 133.484.287.678,40 / 202.083.203.558,00 x 100% = 33,94%	**33,94%**	Badan Pendapatan Daerah	
		3. Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	**Ya**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		4. Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----------X100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 10.404.650.909 / 1.459.049.211.258 x 100% = 0,71%	**0,71%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	**Transparansi Dan Partisipasi Publik**	1. Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan *(Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)*	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda ----------X100% Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda = 812.204.332.999 / 849.860.049.231 x 100% = 95,56%	**95,56%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah *(Public Access ti Fiscal Information)*	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda ----------X100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci = $\frac{10}{12}$ x 100% = 83,33%	**83,33%**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2024	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	**Tepat Waktu**	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2	2024	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : Ada/Tidak Ada 2. Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : Ada/Tidak Ada 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi : Ada/Tidak Ada	**Tepat Waktu**	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3	2024	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gunerbur dan Menteri Dalam negeri	Ada/Tidak Ada	**Ada**	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Produk Hukum Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2024	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat atau Tidak Tepat	**Tepat**	BKAD Kabupaten Tapanuli Utara
2	2024	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N ----------100% Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N = $\frac{4}{7}$ x 100% = 57%	**57%**	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2024	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	YA/TIDAK	**Ya, 1 Perkara**	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2024	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	YA/TIDAK	**YA,** Pemerintah Daerah telah menerbitkan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 2. Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3	2024	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda ----------100% Jumlah rekomendasi Mendagri $= \frac{267}{267} \times 100\% = 100\%$	**100%**	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4	2024	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	Jabatan Struktural yang terisi (Definitif) ----------100% Jabatan Struktural yang ada $\frac{447}{517} \times 100\% = 86{,}46\%$	**86,46%**	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	2024	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N	Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional ----------100% Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional $\frac{0}{173}$ x 100% = 0%	**0%**	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2024	Monitoring Center for Prevention Tahun N	Nilai MCP Tahun N	**51**	Inspektorat Daerah
2	2024	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	-	**45**	Bappelitbangda
3	2024	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N ----------x100% Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N = $\frac{812.204.332.999}{849.860.049.231}$ x 100% = 95,6%	**95,6%**	BKAD

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	2024	Persentase Penurunan SILPA	(Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N) ----------X100% Nilai SILPA Tahun –N = $\frac{10.404.650.909-8.272.950.856}{10.404.650.909}$ x 100% = -76%	**-76%**	BKAD
5	2024	Pertambahan Nilai Aset Tetap	(Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N) ----------X100% Nilai Aset Tetap Tahun –N $\frac{2.409.352.928.415,49 - 2.442.321.546.910,11}{2.409.352.928.415,49}$ x 100% = 1%	**-1%**	BKAD
6	2024	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2023	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2024 ----------X100% Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2024 $\frac{925}{1.009}$ x 100% = 91,67 %	**91,67%**	Inspektorat Daerah
7	2024	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	**3,47**	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8	2024	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada atau Tidak	**Tidak**	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
9	2024	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	**12**	Bappelitbangda
10	2024	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama yang masih berlaku dan Manfaatnya	**4**	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	2024	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	**10**	Badan Kesbangpol
12	2024	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu $\frac{1.492}{15.963}$ x 100% = 9,35%	**9,35%**	Dinas Kesehatan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perwujudan kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Kebijakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan SAKIP mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 memuat penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Perubahan

MISI	PERDA NO 10/2021			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan	1	1	2	2
Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal	1	1	6	6
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	2	5
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan	1	1	2	3
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	3	3	7	7
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*	2	2	7	8
	12	**12**	**28**	**33**

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Mempedomani Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/72/AA.05/2024 bahwa terdapat 2 sasaran strategis yang tidak sesuai menggambarkan kinerja kepala daerah (bupati) dan

indikator kinerjanya tidak cukup menjawab sasaran yakni sasaran meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga dengan indikator kinerja cakupan pembinaan pemuda dan cakupan pembinaan olahraga serta sasaran strategis meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan tidak diperjanjikan, sehingga Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2024 terdiri dari 25 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	5,16
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,00
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	430,00
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.907,10
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,43
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,95
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	14,00
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,78
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,834
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	74,15
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*Fertility Rate*)	Tahun	2,87
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,50
12	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00
13	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,71
14	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25
15	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	66,00
16	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70,00
17	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	78,00
18	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	112,00
19	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	35,00
20	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01
21	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
22	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	3,00
23	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51
24	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40,00
25	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut;
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan triwulanan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya.

   Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni :

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus;

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \; \boldsymbol{x}\,\textbf{100}\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *persentase desa/kelurahan rentan pangan*, digunakan rumus;

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{(\textbf{100} - \textbf{Realisasi})}{(\textbf{100} - \textbf{Target})} \; \boldsymbol{x}\,\textbf{100}\%$$

3. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya bukan dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)* dan *indeks risiko bencana*, digunakan rumus;

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{(\textbf{2 x Target}) - \textbf{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \; \boldsymbol{x}\,\textbf{100}\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian kriteria berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja lebih dari 100,00% maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % dengan kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00% didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	5,16	8,33	**38,57**	Sangat Rendah
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,00	89,80	**99,78**	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	430,00	354,07	**82,34**	Tinggi
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.907,10	3.122,22	**100,00**	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,43	2,18	**89,71**	Tinggi
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,95	16,29	**100,00**	Sangat Tinggi
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	14,00	14,29	**100,00**	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,31	**98,54**	Sangat Tinggi
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,78	13,74	**99,71**	Sangat Tinggi
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,834	1,033	**100,00**	Sangat Tinggi
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	74,15	74,36	**100,00**	Sangat Tinggi
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	2,87	2,85	**100,00**	Sangat Tinggi
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29	83,68	**100,00**	Sangat Tinggi
11	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,50	40,25	**99,38**	Sangat Tinggi
12	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00	68,17	**84,16**	Tinggi
13	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	87,15	**99,42**	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25	67,76	**100,00**	Sangat Tinggi
15	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	66,00	66,18	**100,00**	Sangat Tinggi
16	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70,00	70,00	**100,00**	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,00	81,53	**100,00**	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
18	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	112,00	115,33	**97,03**	Sangat Tinggi
19	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	35,00	41,00	**100,00**	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01	63,14	**90,19**	Tinggi
21	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	**100,00**	Sangat Tinggi
22	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	3,00	2,58	**86,00**	Tinggi
23	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,47	**98,86**	Sangat Tinggi
24	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40,00	77,60	**100,00**	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	**100,00**	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	5,00	**100,00**	Sangat Tinggi

**) realisasi tahun 2023*

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tapanuli Utara tahun 2024. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 94,61%, dihitung dari rata-rata capaian 25 sasaran strategis. Berdasarkan capaian 25 sasaran strategis pada tabel diatas diketahui bahwa 19 sasaran strategis kriteria capaiannya sangat tinggi, 5 sasaran strategis kriteria capaiannya tinggi dan 1 sasaran strategis capaian kinerjanya sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada grafik.

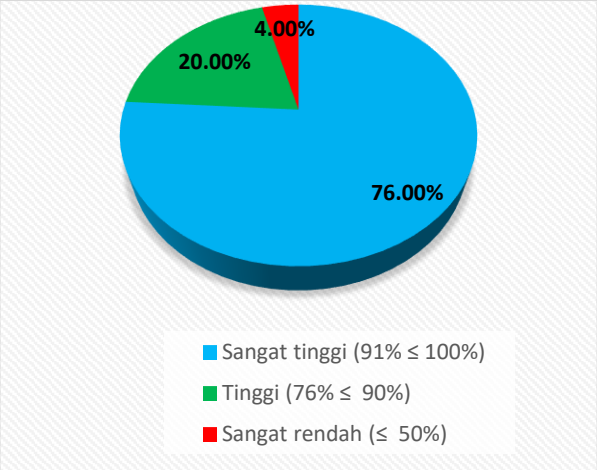

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	9,52	8,73	**100,00**	5,16	8,33	**38,57**
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,00	89,10	**100,00**	90,00	89,80	**99,78**
Nilai investasi	Milliar Rupiah	175,00	1.076,401	**100,00**	430,00	354,07	**82,34**
PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.845,24	3.032,61	**100,00**	2.907,10	3.122,22	**100,00**
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,40	2,20	**91,67**	2,43	2,18	**89,71**
Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,85	15,81	**99,75**	15,95	16,29	**100,00**
Persentase koperasi berkualitas	Persen	9,00	13,39	**100,00**	14,00	14,29	**100,00**
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,24	10,09	**98,54**	10,28	10,31	**100,00**
Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,73	**99,64**	13,78	13,74	**99,71**
Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,46	0,81	**100,00**	0,834	1,033	**100,00**
Angka harapan hidup	Tahun	69,07	74,10	**100,00**	74,15	74,36	**100,00**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	3,60	2,87	**100,00**	2,87	2,85	**100,00**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,25	81,07	**98,57**	82,29	83,68	**100,00**
Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	39,00	38,97	**99,92**	40,50	40,25	**99,38**
Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	79,73	69,43	**87,08**	81,00	68,17	**84,16**
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,71	86,60	**99,87**	87,66	87,15	**99,42**
Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	58,50	57,83	**98,85**	61,25	67,76	**100,00**
Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	62,00	63,56	**100,00**	66,00	66,18	**100,00**
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	40,00	20,00	**50,00**	70,00	70,00	**100,00**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,75	76,78	**100,00**	78,00	81,53	**100,00**
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	116,00	118,00	**98,28**	112,00	115,33	**97,03**
Jumlah desa naik status	Desa	26,00	52,00	**100,00**	35,00	41,00	**100,00**
Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01	62,56	**89,36**	70,01	63,14	**90,19**
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	**100,00**	WTP	WTP*	**100,00**
Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,50	3,18	**100,00**	3,00	2,58	**86,00**
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,43	**97,72**	3,51	3,47	**98,86**
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,00	60,30	**100,00**	40,00	77,60	**100,00**
Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	**100,00**
Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	5,00	**100,00**	5,00	5,00	**100,00**

**) realisasi tahun 2023*

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pengukuran capaian (realisasi) kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tidak dianalisis karena tahun 2024 merupakan tahun akhir RPJMD.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Sebelum dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, maka terlebih dahulu diuraikan analisis atas capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis.

Misi 1	***Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan***

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan kunci menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih dan pengembangan *food estate* oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu *meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan* maka ditetapkan tujuan *meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan,* hasil capaiannya diukur melalui indikator *Indeks Ketahanan Pangan.*

Tabel 2.8
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	76,95	77,29	**100,00**	77,95	78,14	**100,00**

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 sebesar 100,00% melampaui target kinerja dengan kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi IKP tahun 2024 sebesar 78,14 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah dan memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program penguatan ketahanan pangan.

IKP secara nasional disusun Badan Pangan Nasional setiap tahunnya, dengan menggunakan pembobotan terhadap 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan provinsi sebagai turunan dari 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
	Sub Total	**0,30**
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran	0,075
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
	Sub Total	**0,30**
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Prevalensi balita stunting	0,05

No	Indikator	Bobot
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
	Sub Total	**0,40**

Sumber : *Badan Pangan Nasional*

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, diperoleh skor IKP Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 78,14 berada peringkat 206 dari 416 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. IKP tahun 2024 ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan skor 77,29 dan berada pada peringkat 204 nasional. Terjadinya peningkatan skor IKP ini secara umum disebabkan peningkatan indeks ketersediaan dan indek aspek pemanfaatan pangan. Realisasi IKP Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2020-2024

Aspek	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan (IK)	94,45	95,94	95,48	95,45	96,05
Indeks Keterjangkauan (IA)	74,57	76,97	75,04	75,25	75,15
Indeks Pemanfaatan (IP)	67,85	64,57	62,87	65,19	66,96
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	**77,84**	**77,70**	**76,30**	**77,29**	**78,14**
Peringkat Kab (Nasional)	**183**	**180**	**203**	**204**	**206**

Sumber : *Badan Pangan Nasional, diolah*

Mempedomani realisasi Indeks Ketahanan Pangan dan berdasarkan *cut off point* IKP, bahwa sejak tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Utara tergolong ke dalam wilayah yang paling tahan pangan atau memiliki ketahanan pangan.

Tabel 2.11
***Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan**

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96

5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Upaya mewujudkan tujuan *meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan* ditetapkan 2 sasaran strategis yakni menurunnya daerah rentan pangan dan meningkatkan diversifikasi pangan.

Sasaran 1

Menurunnya daerah rentan pangan

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar 78,14 Kabupaten Tapanuli Utara tergolong ke dalam wilayah yang paling tahan pangan atau memiliki ketahanan pangan paling baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat desa/kelurahan yang tergolong rentan pangan. Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan ditetapakan sasaran menurunnya daerah rentan pangan.

Tabel 2.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Daerah Rentan Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	9,52	8,73	**100,00**	5,16	8,33	**38,57**

Sasaran menurunnya daerah rentan pangan diukur melalui pencapaian indikator persentase desa/kelurahan rentan pangan, capaian tahun 2024 sebesar 38,57% kriteria realisasi kinerja sangat rendah. Indikator ini bermakna negatif artinya jika semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya dan sebaliknya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya.

Realisasi persentase desa/kelurahan rentan pangan sebesar 8,33% atau sebanyak 21 desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara, diperoleh dari jumlah desa/kelurahan rentan pangan dibagi jumlah desa dan kelurahan. Angka tersebut diperoleh dari Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang disusun Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data BPS dan Data Pusat Data Informasi (Pusdatin). Desa/kelurahan rentan pangan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13
Desa/Kelurahan Rentan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PRIO KOMP
1	ADIANKOTING	PAGARAN LAMBUNG IV	1	4	2	4	5	1	57,09	3
2	GAROGA	GAROGA SIBARGOT	3	5	4	2	3	2	53,48	2
3	GAROGA	LONTUNG JAE II	3	2	1	2	5	1	46,63	2
4	GAROGA	PARINSORAN PANGORIAN	4	3	3	2	3	3	54,66	2
5	GAROGA	PARSOSORAN	6	3	3	4	1	1	61,50	3
6	GAROGA	SIMPANG BOLON	4	4	3	2	1	1	41,76	1
7	MUARA	PAPANDE	1	1	5	4	2	4	61,51	3
8	MUARA	SAMPURAN	1	1	2	4	2	5	61,33	3
9	MUARA	SILANDO	4	1	3	4	2	2	61,28	3
10	PAGARAN	LUMBAN MOTUNG	5	4	5	4	1	4	57,22	3
11	PAHAE JAE	SUKAMAJU	5	3	3	4	4	1	61,96	3
12	PAHAE JULU	SIMARDANGIANG	4	3	2	2	6	2	53,65	2
13	PANGARIBUAN	PADANG PARSADAAN	3	3	3	4	2	1	57,37	3
14	PARMONANGAN	BATUARIMO	2	3	1	4	5	1	60,43	3
15	PARMONANGAN	HUTAJULU PARBALIK	3	6	3	2	1	1	51,06	2
16	PARMONANGAN	PERTENGAHAN	3	4	2	2	1	1	39,55	1
17	SIMANGUMBAN	AEK NABARA	5	6	2	4	1	3	60,78	3
18	SIMANGUMBAN	PARDOMUAN	5	6	1	4	1	2	58,55	3
19	SIPAHUTAR	SABUNGAN NIHUTA V	5	1	3	4	1	1	50,86	2
20	SIPAHUTAR	SIPAHUTAR III	3	1	4	4	2	3	61,86	3
21	SIPOHOLON	RURA JULU TORUAN	1	6	3	2	1	1	46,12	2

Keterangan :
Prioritas 1 : Sangat Rentan
Prioritas 2 : Rentan
Prioritas 3 : Agak Rentan

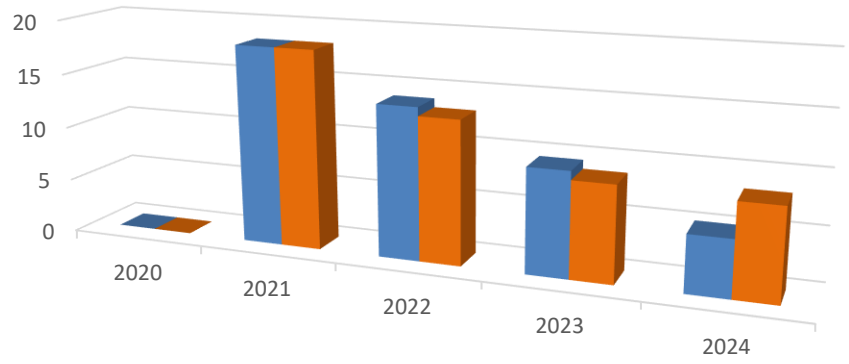

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	18.25	13.89	9.52	5.16
Realisasi	0	18.25	13.10	8.73	8.33

Rentan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif dengan indikator aspek ketersediaan pangan, aspek pemanfaatan pangan dan aspek keterjangkauan pangan. Daerah rentan pangan apabila tidak disupervisi/diintervensi dapat menjadi daerah rawan pangan. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan berdasarkan prioritas :

1. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh:
   a) Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan;
   b) Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah;
   c) Jumlah rumah tangga tanpa air bersih;
   d) Jumlah tenaga kesehatan kurang.
2. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh :
   a) Luas Lahan sawah yang kurang;
   b) Jumlah sarana dan prasaranan penyedia pangan;
   c) Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah;
   d) Jumlah rumah tangga tanpa air bersih;
   e) Jumlah tenaga kesehatan kurang
3. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh:

a) Luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk;
b) Jumlah sarana dan prasaranan penyedia pangan;
c) Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; dan
d) Jumlah tenaga kesehatan yang kurang.

FSVA kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator yang digunakan pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk dan desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

Sasaran 2

Meningkatkan diversifikasi pangan

Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, tetapi memiliki beragam pilihan alternatif terhadap berbagai bahan pangan. Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya kelembagaan dan budaya serta kearifan lokal. Upaya yang dilakukan dalam penganekaragaman konsumsi pangan diantaranya dengan meningkatkan jenis dan aneka ragam pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Sasaran meningkatkan diversifikasi pangan diukur melalui pencapaian indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan capaian tahun 2024 sebesar 99,78% kriteria realisasi kinerja sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja. Realisasi skor PPH Konsumsi tahun 2024 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023.

Tabel 2.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Diversifikasi Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,00	89,10	**100,00**	90,00	89,80	**99,78**

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. FAORAPA (1989) mendefenisikan Pola Pangan Harapan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor Pola Pangan Harapan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan atau dasar untuk penyusunan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan wilayah ke depan. Skor Pola Pangan Harapan ideal menunjukkan keberagaman (diversifikasi) pangan yang dikonsumsi. Target pencapaian skor Pola Pangan Harapan yang ideal untuk setiap wilayah diperoleh melalui perencanaan pangan dan gizi, salah satunya dengan menganalisis data Survei Pola Pangan Harapan (PPH) terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH (maksimal 100 poin), konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional dari aspek konsumsi diperjelas pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

Kelompok Pangan	Berat (g/kap/hr)	Energi (kkal/kap/hr)	% AKG	Bobot	Skor PPH
Padi-padian	275,0	1.000	50,0	0,5	25,0
Umbi-umbian	100,0	120	6,0	0,5	2,5
Pangan hewani	150,0	240	12,0	2,0	24,0
Minyak dan lemak	20,0	200	10,0	0,5	5,0
Buah/biji berminyak	10,0	60	3,0	0,5	1,0
Kacang-kacangan	35,0	100	5,0	2,0	10,0
Gula	30,0	100	5,0	0,5	2,5
Sayur dan buah	250	120	6,0	5,0	30,0
Lain-lain	-	60	3,0	0,0	0,
		2.000 (2.150)	100,0		100,00

Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 89,80 poin menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap semua bahan pangan masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang atau masih belum beragam, cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama setiap harinya. Realisasi skor PPH Konsumsi diperoleh dari penghitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan Survei Pola Pangan Konsumsi Aktual Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Susunan Pola Pangan Harapan Kabupaten Tapanuli Utara

KELOMPOK/JENIS BAHAN MAKANAN	Konsumsi Energi	Konsumsi Pangan		Konsumsi Ideal 2024	
	kkal/kap/hr	gr/kap/hr	kg/kap/th	gr/kap/hr	kg/kap/th
1. Padi-padian	**1142,2**	**317**	**115,705**	**291,6**	**106,4**
Beras giling	1044,2	290	105,85	259,6	94,8
Jagung Pipilan	3,4	1,1	0,4015	4,2	1,5
Tepung Terigu	94,6	25,9	9,4535	27,8	10,1
Padi-padian lainnya	0,0	0	0	0	0
2. Umbi-umbian	**41,3**	**40,0**	**14,6**	**95,9**	**35**
Ketela Pohon	29,0	26,5	9,6725	54	19,7
Ubi Jalar	5,6	5,2	1,898	22,7	8,3
Sagu	0,9	0,3	0,1095	12,5	4,6
Kentang	4,5	6,4	2,336	3,3	1,2
Umbi-Umbian lainnya	1,3	1,6	0,584	3,4	1,2
3. Pangan Hewani	**298,3**	**286,1**	**104,4265**	**126,1**	**46**
Daging Ruminansia	28,4	13,7	5,0005	4,8	1,7
Daging Unggas	16,7	9,6	3,504	20,2	7,4
Telur	49,6	34	12,41	25	9,1
Susu	6,9	11,2	4,088	8,2	3
Ikan	196,7	217,6	79,424	67,9	24,8

KELOMPOK/JENIS BAHAN MAKANAN	Konsumsi Energi	Konsumsi Pangan		Konsumsi Ideal 2024	
	kkal/kap/hr	gr/kap/hr	kg/kap/th	gr/kap/hr	kg/kap/th
4. Minyak dan Lemak	**473,5**	**52,5**	**19,1625**	**23,9**	**8,7**
Minyak Kelapa	5,0	0,6	0,219	2,3	0,8
Minyak Sawit	464,6	51,5	18,7975	21,1	7,7
Lemak	0,2	0	0	0,5	0,2
Minyak Lain	3,6	0,4	0,146	0	0
5. Buah/Biji Berminyak	**62,6**	**167,1**	**60,9915**	**11,9**	**4,4**
Kelapa	58,2	161,5	58,9475	10,1	3,7
Kemiri	2,3	0,4	0,146	1,8	0,7
Biji Jambu Mete	0,0	0	0	0	0
Buah Biji berminyak lainnya	2,1	5,2	1,898	0	0
6. Kacang-kacangan	**50,4**	**14,7**	**5,3655**	**38,3**	**14**
Kacang Tanah	5,6	1,2	0,438	1, 4	0,5
Kacang Kedelai	35,9	10,8	3,942	35,6	13
Kacang Hijau	5,6	1,6	0,584	1,3	0,5
Kacang-kacangan lainnya	3,3	1	0,365	0	0
7. Gula	**53,9**	**14,8**	**5,402**	**29**	**10,6**
Gula Pasir	48,3	13,3	4,8545	26,8	9,8
Gula Aren	5,6	1,5	0,5475	2,2	0,8
Gula Kelapa	0,1	0	0	0	0
8. Sayur dan Buah	**119,8**	**350,3**	**127,8595**	**267,9**	**97,8**
Sayur-Sayuran	73,6	288	105,12	170,8	62,4
Buah-Buahan	46,2	62,2	22,703	97,1	35,4
9. Lain-lain	**15,4**	**5**	**1,825**	**106,7**	**38,8**
Minuman	0,0	0	0	89	32,5
Bumbu	2,6	0,7	0,2555	17,3	6,3
Lainnya	12,8	4,3	1,5695	0	0
Total Kons. Energi	**2257,5**	**1247,5**	**455,3375**	**991,3**	**361,7**
Skor PPH	**89,8**			**94,0**	
Konsumsi Protein	**58,5**			**57**	
% AKE	**105,0%**			**100**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020. Grafik perbandingan target dan capaian Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020-2024 sebagai berikut :

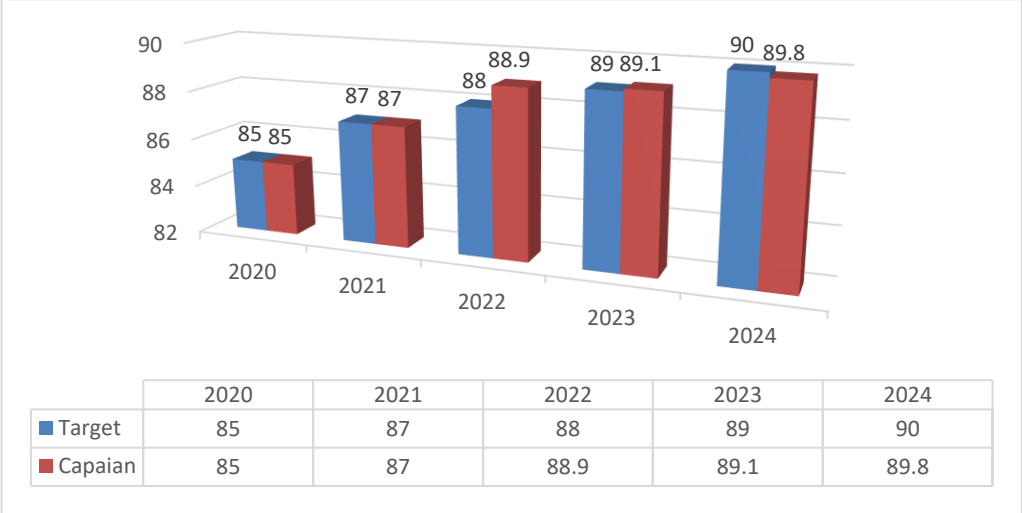

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85	87	88	89	90
Capaian	85	87	88.9	89.1	89.8

Realisasi Skor PPH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 di bawah realisasi nasional dan diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana grafik berikut:

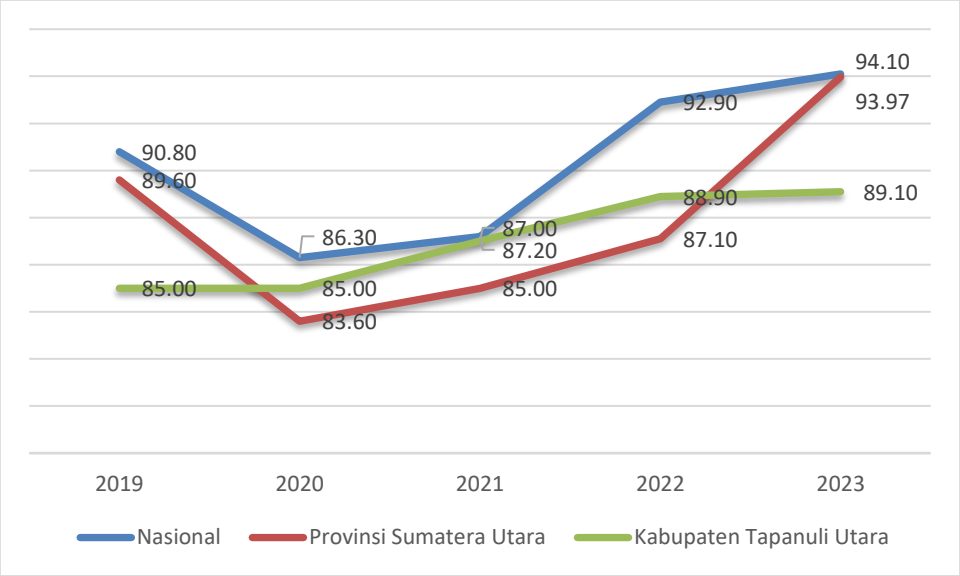

Penyebab kegagalan pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) disebabkan masyarakat cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama setiap hari dan masih kurang variasi terhadap menu yang disajikan. Konsumsi yang tidak beragam dapat menyebabkan masalah kesehatan karena kandungan gizi yang masuk ke dalam tubuh kurang / tidak lengkap sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang guna meningkatkan Skor PPH konsumsi masyarakat yakni pelaksanaan sosialisasi dan promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman secara berkesinambungan di berbagai kalangan masyarakat, pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan menu makanan supaya sumber bahan-bahan lokal dapat diolah lebih bermanfaat dan bernilai gizi tinggi dan pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal serta lahan pekarangan untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap beberapa komoditi tertentu, sekaligus meningkatkan konsumsi terhadap umbi-umbian dan pangan lainnya.

Misi 2 ***Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal***

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kedua *pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal* maka ditetapkan tujuan *meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,* hasil capaiannya diukur melalui indikator *pertumbuhan ekonomi*. Capaian indikator tahun 2024 sebesar 100% kriteria sangat tinggi. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 4,77% melampaui target kinerja. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,8	4,75	**100,00**	2,8	4,77	**100,00**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Apabila terjadi perubahan, baik peningkatan dan penurunan produksi maka akan tergambar melalui pertumbuhan ekonominya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda belahan dunia menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga terjadinya keterpurukan perekonomian suatu daerah/negara. Dampak Covid-19 di tahun 2020 berimbas pada semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Tapanuli Utara, ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi, terutama sektor konstruksi, transportasi dan perdagangan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan jasa lainnya.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,30	4,59	4,80	3,99	2,95
Pertambangan dan Penggalian	5,96	5,98	4,56	4,50	4,90
Industri pengolahan	2,10	3,31	3,96	5,41	4,43
Pengadaan listrik dan gas	9,84	5,79	2,31	3,38	0,86
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,37	5,43	4,52	4,91	1,32
Konstruksi	-0,81	3,22	4,00	4,64	3,85
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,79	3,94	4,50	6,50	7,76
Transportasi dan pergudangan	-3,85	2,77	7,53	7,15	7,29
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,29	2,40	7,14	7,04	9,66
Informasi dan komunikasi	8,51	4,82	4,83	3,67	6,83
Jasa keuangan dan asuransi	3,39	2,52	3,17	3,94	4,92
Real estate	1,01	0,39	4,85	3,72	3,20
Jasa perusahaan	5,02	2,73	6,55	4,40	7,07
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	-0,83	0,29	-0,88	4,54	7,89
Jasa pendidikan	5,11	2,87	4,52	4,99	5,23
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,97	0,38	5,57	4,96	5,11
Jasa lainnya	-0,86	2,75	7,18	4,93	7,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**1,50**	**3,54**	**4,25**	**4,75**	**4,77**

Pada awal pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perlambatan namun tidak sampai mengalami pertumbuhan negatif. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengurangi dampak Covid-19 yakni refocusing dan realokasi anggaran untuk jaminan perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara di masa pandemi tidak terlepas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka menyelamatkan perekonomian daerah yang terkena dampak Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan pinjaman PEN dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMF) senilai Rp 326.670.000.000,- yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan, SDA dan irigasi, perbaikan jalan lingkungan dan PSU Pasar, revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan kawasan objek wisata. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawah realisasi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah :

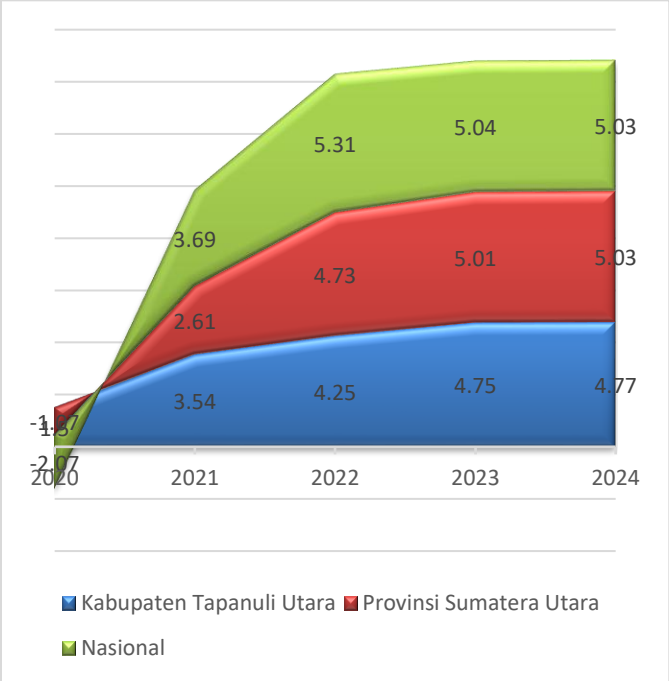

Upaya mewujudkan tujuan *meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah* ditetapkan 5 sasaran strategis yakni sasaran meningkatkan nilai investasi, meningkatnya PDRB sektor pertanian, meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan, meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan meningkatkan koperasi berkualitas.

Sasaran 3

Meningkatkan nilai investasi

Investasi merupakan salah satu motor penggerak yang dinamis terhadap pertumbuhan ekonomi dan ditempatkan sebagai kunci utama dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini mendorong setiap daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor melalui berbagai peraturan, kebijakan serta pengembangan infrastruktur fisik yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Sasaran meningkatkan nilai investasi diukur melalui pengukuran indikator kinerja nilai investasi, capaian tahun 2024 sebesar 82,34 % kriteria realisasi kinerja tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja dan. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai investasi	Milliar Rupiah	175,00	1.076,40	**100,00**	430,00	354,07	**82,34**

Realisasi indikator kinerja nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp 354.077.277.714,00 terdiri dari realisasi investasi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 21.985.594.478,00 dan realisasi investasi Penanam Modal Asing (PMA) senilai Rp 332.091.683.236,00. Detail realisasi investasi ini diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online yang dapat diakses melalui laman http://lkpmonline.bkpm.go.id. Penetapan target kinerja tahun 2024 sebesar Rp 430, 00 milliar merupakan hasil penyesuaian target dengan mengacu pada realisasi indikator kinerja nilai investasi tahun 2023 yang mencapai Rp 1.076,40 milliar. Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara umumnya dominan pada sektor konstruksi sentral telekomuniksi dan ketenagalistrikan yang dipengaruhi oleh geografis dan potensi alam Kabupaten Tapanuli Utara. Tabel 2.20 berikut menggambarkan kinerja

investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2022, yang menggambarkan adanya peningkatan realisasi investasi tahun 2022 setelah pandemi Covid 19.

Tabel 2.20
Kinerja Investasi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah investor PMDN (Perusahaan)	20	28	24	31	31
Realisasi Investasi PMDN	370.753.324.216	140.851.163.917	185.389.041.805	151.150.092.338	21.985.277.714
Jumlah investor PMA	2	2	3	11	11
Realisasi Investasi PMA	9.842.012.600	1.100.000.000	145.959.999.159	1.609.251.826.066	332.091.683.236

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Upaya meningkatkan nilai investasi dilaksanakan melalui kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan mempermudah pelayanan perizinan. Kegiatan penanaman modal untuk mendukung peningkatan nilai investasi diantaranya adalah, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai *master plan* bagi pengembangan investasi, keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal. Adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan meminimalisir hambatan perizinan untuk mencegah timbulnya masalah dalam kegiatan investasi.

Faktor keberhasilan pencapaian target meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya adalah :

1. Beberapa perusahaan yang sempat menunda proyek konstruksinya telah memulai kegiatan konstruksi dan telah melakukan peletakan batu pertama (*Groundbreaking*) untuk memulai kegiatan proyek. Pada umumnya investor bergerak di sektor ketenagalistrikan seperti

Pembangkit Tenaga Mini Hydro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

2. Ketaatan para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasinya pada LKPM *Online* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai realisasi investasi. Karena hanya melalui aplikasi LKPM *Online*-lah data realisasi investasi dapat diakui keabsahannya. Pemberian pendampingan dan bimbingan teknis/sosialisasi terhadap tata cara pelaporan untuk para pelaku usaha, dan adanya pengawasan terhadap ketaatan pelaporan meningkatkan data valid atas realisasi investasi di Kabupaten Tapanuli Utara, serta adanya fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya.

Sasaran 4

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian

Secara umum kemajuan suatu negara atau daerah biasanya diukur dari pertumbuhan pada sektor ekonominya. untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang. Sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sebagai penghasil nilai tambah dan

devisa maupun sumber penghasilan utama dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sub sektor pertanian yang paling dominan dibudidayakan masyarakat adalah sektor tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Sasaran strategis meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dengan pencapaian indikator kinerja PDRB sektor pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.783,38	2.916,34	**100,00**	2.854,24	3.032,61	**100,00**

Sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian diukur melalui capaian indikator PDRB sektor pertanian dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,00% melampaui target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Sesuai publikasi Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2024*, diperoleh bahwa pada tahun 2023, PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan 2010, sebesar 3.032,61 Milliar Rupiah (angka sangat sementara). Realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sekitar 3,99%. Tabel berikut menggambarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha :

Tabel 2.22
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020-2024

	Lapangan usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.660,74	2.782,75	2.916,34	3.032,61	3.122,22
B	Pertambangan dan penggalian	4,67	4,95	5,17	5,41	5,67
C	Industri pengolahan	124,81	128,94	134,04	141,29	147,55
D	Pengadaan listrik dan gas	7,54	7,98	8,17	8,44	8,51
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,07	6,40	6,69	7,02	7,11
F	Konstruksi	791,88	817,37	850,08	889,50	923,71
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	824,02	856,49	895,02	953,20	1.027,19
H	Transportasi dan pergudangan	274,44	282,05	303,28	324,98	348,68
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	135,38	138,63	148,52	158,97	174,32
J	Informasi dan komunikasi	57,33	60,09	62,99	65,30	69,76
K	Jasa keuangan dan asuransi	91,33	93,63	96,60	100,40	105,35
L	Real estate	123,00	123,47	129,46	134,27	138,57
M,N	Jasa perusahaan	16,72	17,17	18,30	19,11	20,46
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	580,30	581,96	576,85	603,07	650,64
P	Jasa pendidikan	102,10	105,03	109,78	115,26	121,29
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	43,46	43,63	46,06	48,34	50,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,60	7,80	8,37	8,78	9,40
Produk Domestik Regional Bruto		**5.851,40**	**6.058,35**	**6.315,72**	**6.615,95**	**6.931,24**

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Faktor keberhasilan pencapaian target PDRB sektor pertanian yakni karena kenaikan produksi pertanian baik komoditi pangan, hortikultura dan perkebunan, walaupun juga terdapat penurunan pada beberapa komoditi yang disebabkan petani mengganti jenis komoditi pertaniannya pada tahun 2024, ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.23
Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian 2020-2024

No	Komoditi	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Produksi Pertanian						
	Padi Sawah	Ton	118.205,75	118.258,98	118.426,70	118.911,40	120.853,75
	Padi Gogo	Ton	75.787,23	75.974,09	70.255,45	66.507,42	67.624,89
	Jagung	Ton	126.372,10	107.488,84	127.694,74	136.500,99	141.545,78
	Kacang Tanah	Ton	2.453,02	2.466,18	2.495,34	2.978,76	2.501,67
	Cabai Merah	Ton	6.222,40	7.769,08	7.853,60	7.979,96	8.500,24

No	Komoditi	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
	Bawang Merah	Ton	476,01	1.448,44	1.621,58	1.663,3	2.503,02
	Nenas	Ton	155.139,20	159.902,00	160.356,43	166.361,11	170.371,28
	Pisang	Ton	4.174,10	24.977,28	26.304,47	26.552,73	26.719,69
	Kopi Arabika	Ton	14.663,94	15.644,50	15.712,12	15.790,94	15.998,96
	Kakao	Ton	1.778,89	1.918,99	1.930,92	1.952,92	1.976,79
	Aren	Ton	178,81	181,13	191,48	203,23	205,74
2	Produktivitas Pertanian						
	Padi Sawah	Kw/Ha	49,61	51,95	52,65	52,68	52,70
	Padi Gogo	Kw/Ha	29,66	29,66	29,69	29,72	29,72
	Jagung	Kw/Ha	52,67	58,57	56,83	55,96	55,96
	Kacang Tanah	Kw/Ha	15,35	15,38	15,41	15,45	15,52
	Cabai Merah	Kw/Ha	45,62	56,37	55,15	55,15	23,73
	Bawang Merah	Kw/Ha	91,54	139,34	125,51	125,25	124,34
	Nenas	Kw/Ha	1.586,63	1.586,91	1.584,30	1.604,51	1.638,03
	Pisang	Kw/Ha	60,15	242,50	455,75	459,45	461,98
	Kopi Arabika	Kw/Ha	1.100,45	1.173,80	1.158,31	1.159,04	1.174,31
	Kakao	Kw/Ha	657,75	705,88	709,58	715,66	716,66
	Aren	Kw/Ha	509,72	592,70	608,68	619,75	627,41

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah kegiatan pemenuhan sarana pertanian berupa benih/bibit tanaman, alat dan mesin pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organik. Di samping itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pertanian berupa irigasi air tanah dalam dan jalan usaha tani. Juga dilakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian serta pendampingan petani oleh penyuluh pertanian sehingga permasalahan pertanian yang dihadapi petani dapat segera ditangani.

Sasaran 5

Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan

Sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan atau kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB bermaksud menggambarkan kinerja sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Tabel 2.24 menggambarkan capaian sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 89,71 % kriteria capaian kategori tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,40	2,20	**91,67**	2,43	2,18	**89,71**

Realisasi kontribusi PDRB sektor industri pengolahan senilai 2,18% tahun 2024 diperoleh dari data BPS dan merupakan angka sangat sementara. Industri Pengolahan oleh BPS didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Realisasi kontribusi sektor industri pengolahan menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara, sektor industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2018, dari 2,21% di tahun 2018; 2,23% tahun 2019; 2,27% tahun 2020; dan 2,31% tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022, 2023 dan 2024 dari 2,25% menjadi 2,20% dan menjadi 2,18%.

Sasaran 6

Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan

Sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan bermaksud menggambarkan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian.

Kontribusi sektor ini terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2018, dari 14,48% di tahun 2018; 15,26% tahun 2019; 15,68% tahun 2020; 15,84% tahun 2021, 15,79% tahun 2022, 15,91% di tahun 2023 dan 16,29% di tahun 2024. Capaian sasaran meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2024 sebesar 100,00% kriteria realisasi sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,85	15,91	**99,75**	15,95	16,29	**100,00**

Realisasi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 16,29 % diperoleh dari publikasi BPS. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran yakni penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang.

Sasaran 7

Meningkatkan koperasi berkualitas

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi mempunyai potensi yang strategis dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan

pendapatan sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Sasaran meningkatkan koperasi berkualitas diukur dengan pencapaian indikator persentase koperasi berkualitas, diperoleh capaian sebesar 100,00% kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi persentase koperasi berkualitas tahun 2024 sebesar 14,29% meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,39%.

Tabel 2.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Koperasi Berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase koperasi berkualitas	Persen	9,00	13,39	**100,00**	14,00	14,29	**100,00**

Koperasi berkualitas sebesar 14,29% diperoleh dari formula penghitungan yakni jumlah koperasi sehat tahun 2024 (19 koperasi) dibagi jumlah koperasi aktif tahun 2024 (133 koperasi). Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 522 koperasi, terdiri dari :

a. 506 koperasi bentuk primer kabupaten/kota;
b. 9 koperasi primer provinsi;
c. 1 koperasi sekunder provinsi; dan
d. 6 koperasi primer nasional

Dari sejumlah 522 koperasi tersebut, koperasi aktif berjumlah 133 koperasi. Koperasi aktif adalah koperasi yang terdaftar pada sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi, yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM, dalam rangka Reformasi Total Koperasi. Koperasi yang terdaftar pada aplikasi ODS Langsung Koperasi menggambarkan koperasi masih aktif beroperasional dan memiliki kepengurusan yang jelas.

Koperasi sehat adalah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dan melaporkan hasil RAT ke

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah daerah untuk selanjutnya oleh admin kabupaten menginput laporan RAT koperasi ke sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi untuk dilakukan penilaian kualitas oleh Kementerian Koperasi, dan UKM. Hasil penilaian oleh Kementerian Koperasi, UKM selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK) yang memuat grade atau nilai kualitas koperasi. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yakni terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan lembaga (pengurus) koperasi dalam upaya mewujudkan Reformasi Total Koperasi, guna mendorong koperasi berbasis IT dan berdaya saing tinggi.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sektor pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan merupakan upaya dalam pembangunan SDM unggul dan berkualitas. Dalam mewujudkan misi 3, ditetapkan 2 tujuan strategis yakni tujuan meningkatnya sistem pendidikan daerah dengan indikator indeks pendidikan dan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan. Dua komponen ini merupakan dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan meningkatnya sistem pendidikan daerah bermaksud bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem harus memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran meningkatnya sistem pendidikan daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Pendidikan, capaian tahun 2024 sebesar 100,00% kategori capaian sangat tinggi. Realisasi indeks pendidikan tahun 2024 sebesar 72,53% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,77%.

Tabel 2.27
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Sistem Pendidikan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	Persen	72,00	71,77	**99,68**	72,50	72,53	**100,00**

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan, dengan indikator pembentuk yakni Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah. Realisasi indeks pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sesuai formula disamping, diperoleh sebesar 0,7177 poin atau 71,77 %, rincian penghitungan sebagai berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pendidikan Kab Tapanuli Utara **0,7253** = $\frac{0{,}7633+0{,}6873}{2}$

IHLS Kab Tapanuli Utara **0,7633** = $\frac{13{,}74 - 0}{18{,}00 - 0}$

IRLS Kab Tapanuli Utara **0,6873** = $\frac{10{,}31 - 0}{15{,}00 - 0}$

Sasaran 8

Memenuhi standar pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP meliputi 8 komponen yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan komponen SNP digunakan

untuk penilaian akreditasi satuan pendidikan. Sasaran memenuhi standar pendidikan diukur dengan pencapaian 3 indikator kinerja diperoleh capaian tahun 2024 sebesar 99,90% kriteria capaian sangat tinggi sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Memenuhi Standar Pendidikan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,24	10,09	**98,54**	10,28	10,31	**100,00**
Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,73	**99,85**	13,78	13,74	**99,71**
Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,46	0,819	**100,00**	0,834	1,033	**100,00**

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang telah diselesaikan penduduk dalam menjalani seluruh jenjang pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2024 adalah 10,31 tahun diperoleh dari data BPS, Tapanuli Utara Dalam Angka 2024, artinya bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10 tahun atau telah bersekolah hingga kelas X SMA. Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dibandingkan tahun 2023.

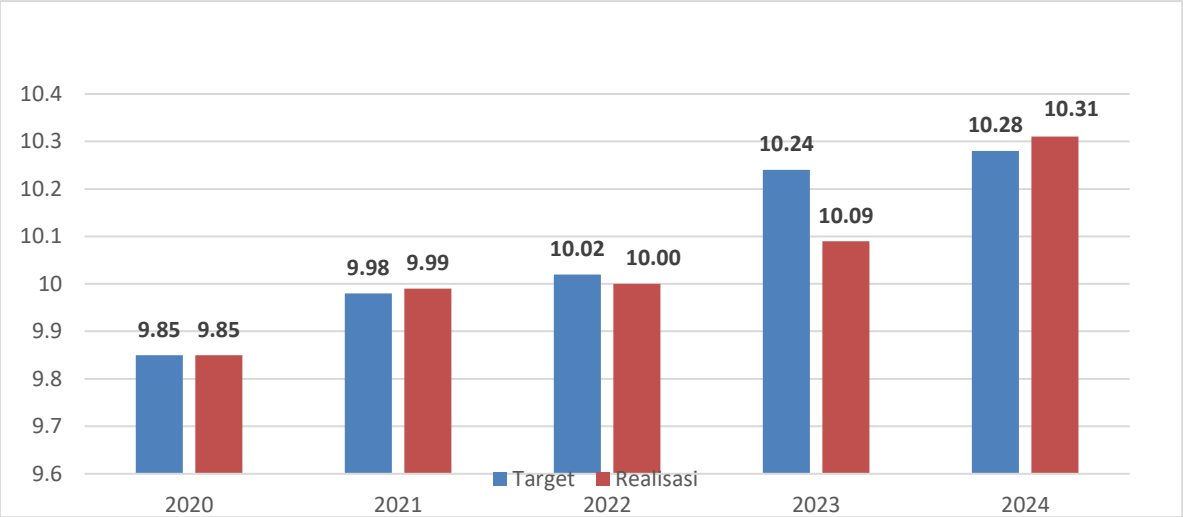

Berdasarkan grafik diatas diperoleh bahwa rata-rata lama sekolah semakin meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut :

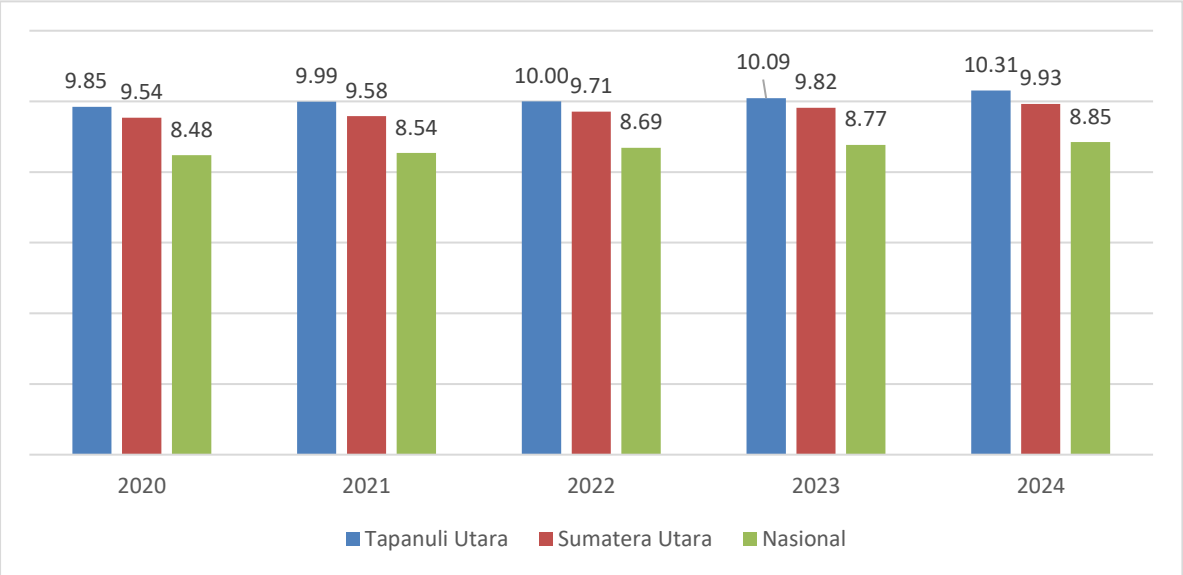

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Realisasi harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah 13,74 tahun, kriteria capaian sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja.

Realisasi kinerja tahun 2024 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023. Realisasi kinerja harapan lama sekolah menggambarkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,74 tahun atau setara dengan Diploma I.

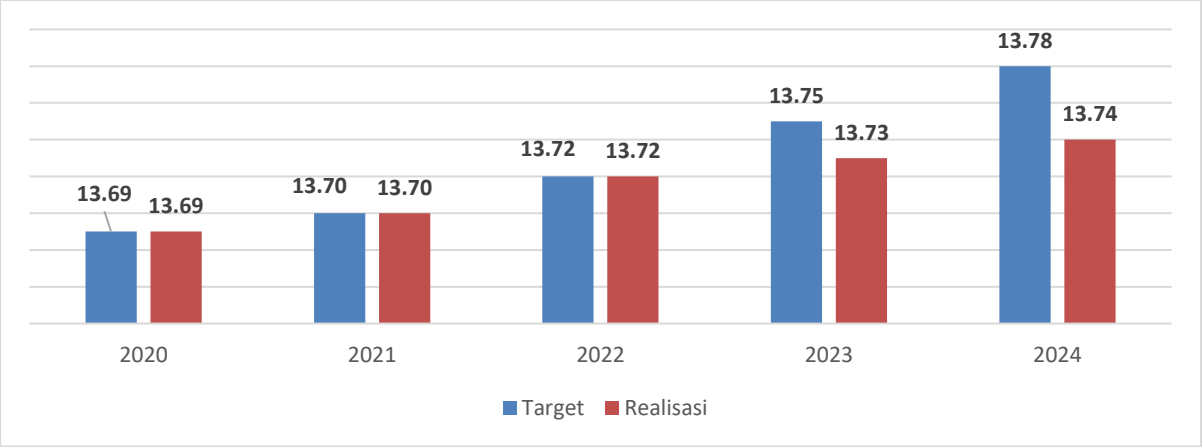

Harapan lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut :

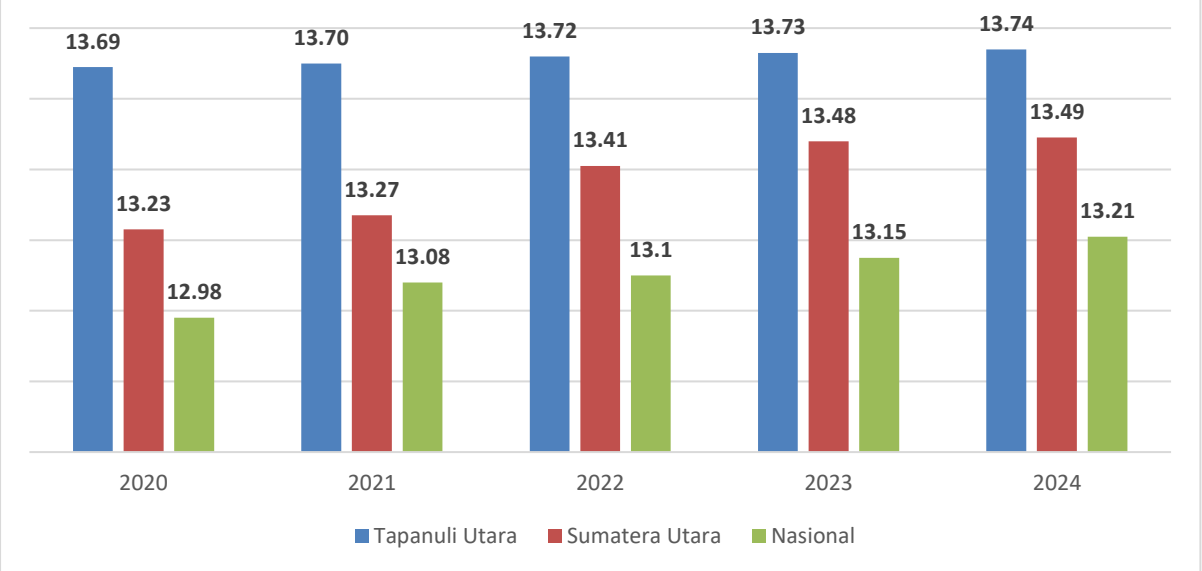

Realisasi indikator kinerja rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000) tahun 2024 sebesar 1,033 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi diperoleh dari jumlah perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sejumlah 329 perpustakaan dibagi jumlah

penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yaitu sebanyak 318.424 orang dikali 1.000.

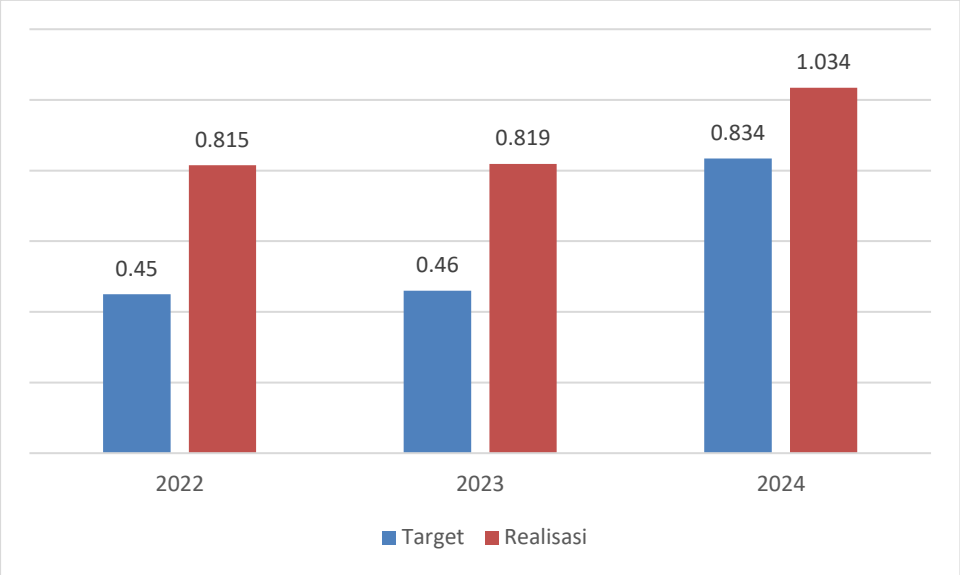

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh perangkat daerah terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dengan adanya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standard Sarana dan Prasarana SD, SMP dan SMA, yang mewajibkan adanya kriteria minimum setiap setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, sehingga seluruh SMP dan SMA rata-rata sudah memiliki perpustakaan dan kebanyakan SD juga sudah mengupayakan untuk memiliki ruang perpustakaan yang dilaporkan pada data pokok pendidikan (Dapodik). Namun di tengah keberhasilan angka yang tinggi ini, masih terdapat persoalan yakni ketika ruang perpustakaan yang dilaporkan tersebut, belum maksimal peruntukannya atau pemanfaatannya untuk layanan perpustakaan. Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja didukung pelaksanaankegiatan pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas perpustakaan pada tahun 2023, dengan melakukan pembinaan dan supervisi ke setiap perpustakaan sekolah yang terdapat pada 4 kecamatan yakni Pangaribuan, Garoga, Pahae Julu dan Siatas Barita, diharapkan dapat menghidupkan perpustakaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara untuk bergerak melaksanakan layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional.

Tujuan kedua misi 3 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui pencapaian indeks kesehatan. Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.

Tabel 2.29
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesehatan	Persen	75,50	83,23	**100,00**	75,70	83,63	**100,00**

Realisasi indeks kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 0,83 poin atau 83,63%, diperoleh sesuai formula, angka harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dikurang angka harapan hidup minimum dibagi hasil pengurangan angka harapan hidup maksimum dikurang angka harapan hidup minimum, atau dengan perhitungan sebagai berikut :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks Kesehatan Kab Tapanuli Utara **0,8363** = $\frac{74,36-20,00}{85,00-20,00}$

Sasaran 9

Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas

Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditetapkan sasaran meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas, keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 2 indikator kinerja yakni angka harapan hidup dan jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*fertility rate*). Capaian sasaran tahun 2024 sebesar 100,00% kriteria sangat tinggi dan realisasi kinerja melampaui target yang

diperjnajikan. Pengukuran capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.30
Pengukuran Kinerja Sasaran Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,07	74,10	**100,00**	74,15	74,36	**100,00**
Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*Fertility Rate*)	Jumlah Anak	3,60	2,87	**100,00**	2,87	2,85	**100,00**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berdasarkan publikasi BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 74,36 tahun melampaui target kinerja. Realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2023, menunjukkan bahwa semakin membaiknya kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Realisasi AHH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Perbandingan realisasi AHH Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ditunjukkan pada grafik berikut :

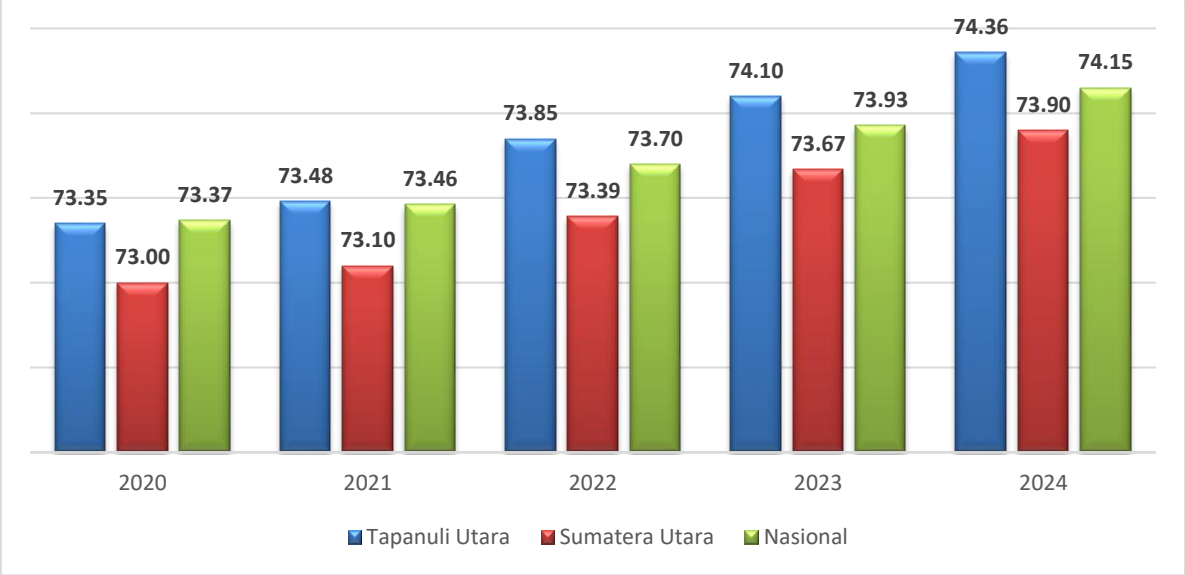

Berdasarkan grafik diatas, bahwa angka harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara semakin meningkat dari tahun 2020 – 2024 dan berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 73, 90 dan juga masih diatas Nasional yakni 74,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel berikut menggambarkan kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (kasus)	5	4	2	1
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	9,79	3,64	5,66	5,011
Angka Kesakitan	30,48	28,90	16,27	16,43
Prevalensi Balita Gizi Buruk	14	12	0,27	0,2
Universal Child Immunization (desa)	82,90	93,00	96,40	96,80
Rasio dokter umum (per 100.000 penduduk)	20,94	21,46	21,76	24,73
Rasio Fasyankes per satuan penduduk	69,79	68,73	72,96	69,48
Persentase penduduk memiliki JKN	82,30	69,70	89,05	97,95
Prevalensi stunting	26,70	27,40	27,40	27,40
Imunisasi Dasar Lengkap (bayi/balita)	56,20	93,90	92,20	97,70

Sumber: Dinas Kesehaan

Faktor keberhasilan tercapainya target kinerja adalah melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang diarahkan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan

prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita, penurunan angka kesakitan, peningkatan rasio dokter per satuan penduduk, rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes per satuan penduduk dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Indikator jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*Total Fertility Rate*) artinya rata-rata jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama usia reproduktifnya (umur 15-49 tahun). TFR digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan populasi dan potensi perubahan dalam struktur demografi daerah/wilayah. Indikator TFR merupakan indikator negatif yang artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Realisasi TFR Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 2,85 melampaui target yang diperjanjikan dan kriteria sangat tinggi. TFR 2,85 artinya bahwa secara rata-rata jumlah anak per perempuan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3 orang.

Realisasi TFR 2,85 orang berada pada kategori TFR sangat tinggi (≥ 2,4). Angka kelahiran total menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator TFR dibutuhkan untuk dapat membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, menigkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Berdasarkan angka TFR sangat tinggi maka arah pengendalian penduduk Kabupaten Tapanuli Utara harus berfokus pada penurunan angka fertilitas agar dapat segera menuju *replacement level* yakni TFR 2,1. Program pengendalian penduduk dapat dengan mengintensifkan penggunaan kontrasepsi, penurunan *unmeet need*, peningkatan KB pascapersalinan dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Misi 4 ***Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan***

Dalam pelaksanaan misi ke 4, bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas SDM yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian tahun 2023 sebesar 100,00% kategori sangat tinggi. Realisasi tahun 2024 meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2023.

Tabel 2.32
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,50	1,03	**100,00**	1,50	1,01	**100,00**

Realisasi TPT tahun 2024 sebesar 1,01% sesuai publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2025, Persentase TPT diperoleh dari hasil bagi jumlah penggangguran per jumlah tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengggangguran. Angka TPT dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). BPS mendefinisikan pengangguran terbuka yakni :

1. Seseorang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Seseorang yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Sasaran 10

Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Peranan tenaga kerja dalam pembangunan memiliki dua sisi yaitu sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan itu sendiri. Faktor terpenting dari tenaga kerja tidak hanya dari segi kuantitas melainkan juga kualitas. Dalam upaya terwujudnya peningkatan kualitas SDM ditetapkan sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja diukur melalui pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-65 tahun) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk usia kerja adalah adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2.33
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	82,25	81,20	**98,72**	82,25	83,69	**100,00**

Capaian indikator kinerja TPAK tahun 2024 sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi, realisasi kinerja melampaui target kinerja. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, diperoleh realisasi TPAK tahun 2024 sebesar 83,69% meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 81,20%. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di tahun 2024. Berikut ini disajikan data penduduk usia kerja di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 :

Tabel 2.34
Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024

KEGIATAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	**172.493**	**175.661**	**174.506**	**187.311**	**196.492**
Bekerja	167.428	172.950	172.636	185.378	194.106
Penganggur	5.065	2.711	1.870	1.933	2.386
Bukan Angkatan Kerja	**37.397**	**36.920**	**40.745**	**43.357**	**38.304**
Sekolah	12.164	9.841	15.861	19.554	11.633
Mengurus Rumah Tangga	14.217	16.989	16.441	12.891	17.052
Lainnya	11.016	10.090	8.443	10.912	9.619
Penduduk Usia Kerja	**209.890**	**212.581**	**215.251**	**230.668**	**234.796**
TPAK (%)	**82,18**	**82,63**	**81,07**	**81,20**	**83,69**

Berdasarkan definisi TPAK diatas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi nilai TPAK di suatu daerah yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Kedua faktor ini saling berbanding terbalik. Selain itu, TPAK juga bersifat fluktuatif setiap tahunnya tergantung dari kedua faktor tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat melakukan banyak hal untuk dapat mengendalikan nilai TPAK Kabupaten Tapanuli Utara. Semuanya bergantung pada perhitungan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja/pencari kerja/tenaga kerja agar memiliki skill/kemampuan sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga tercipta angkatan kerja/pencari kerja/tenaga kerja yang siap pakai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara, pemerintah atasan, maupun pihak-pihak lain yang memiliki anggaran pelatihan ketenagakerjaan. Selain itu, upaya yang telah dilaksanakan agar TPAK semakin meningkat yakni menerbitkan Instruksi Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam instruksi ini diharapkan agar perusahaan/pelaku usaha dapat mempekerjakan sebesar 70% tenaga kerja lokal yang telah memiliki sertifikat pelatihan kerja dari Balai Latihan Kerja. Guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan pada tahun 2024 dengan sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara dan bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tabel 2.35
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi tahun 2024

Jenis Pelatihan	Sumber Dana	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (Orang)
Pelatihan Menjahit (Paket 1)	APBN	19 April s/d 24 Mei 2024	16
Pelatihan Menjahit (Paket 2)	APBN	31 Mei s/d 05 Juli 2024	16
Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	APBN	31 Mei s/d 24 Juni 2024	16
Pelatihan Tata Kecantikan	APBN	31 Mei s/d 29 Juni 2024	16
Pelatihan Menjahit	APBD	08 s/d 31 Juli 2024	16
Pelathan Listrik	APBD	08 s/d 31 Juli 2024	16
Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	APBN	23 Okt s/d 12 Nov 2024	16
Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN	23 Okt s/d 30 Nov 2024	16
Total			**128**

Metode pelaksanaan pelatihan - pelatihan tersebut seluruhnya dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Silangkitang Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara. Harapannya setelah mengikuti pelatihan tersebut, pencari kerja telah memiliki *skill* yang mumpuni di bidangnya sehingga dapat bekerja secara mandiri (berwirausaha) maupun diterima bekerja di perusahaan. Dari sejumlah 128 orang peserta pelatihan,

yang mengikuti pelatihan dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 32 orang. Sedangkan yang yang mengikuti pelatihan dengan anggaran bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah sebanyak 96 orang melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Perbandingan realisasi TPAK Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Realisasi TPAK Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Tingkatan	Satuan	TPAK				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	82,18	82,63	81,07	81,20	83,69
Provinsi Sumatera Utara	Persen	68,67	69,10	69,53	71,06	71,36
Nasional	Persen	67,77	67,80	68,63	69,48	70,63

Misi 5 *Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata*

Misi 5 meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata bermaksud bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenitas, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Dalam mewujudkan misi ditetapkan tujuan meningkatnya jumlah wisatawan, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi jumlah wisatawan tahun 2024 sebesar 191.061 orang meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023, sebagai efek positif dari pelaksanaan Festival Toba Caldera Unesco Global Geopark di Pulau Sibandang dan beragam event pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.37
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Jumlah Wisatawan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Wisatawan	Orang	144.350	180.235	**100.00**	145.350	191.061	**100.00**

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata sangat potensial memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang ditentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tapanuli Utara. Banyaknya kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.38
Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Indonesia	Jumlah Total
2020	-	141.350	141.350
2021	-	142.356	142.356
2022	-	139.950	139.950
2023	235	180.000	180.235
2024	310	190.751	191.061

Dinas Pariwisata sebagai instansi terkait meyakini bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Tapanuli Utara dipengaruhi pelaksanaan kegiatan/event wisata yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Kegiatan tersebut antara lain

1. Penyelenggaraan Festival Toba Caldera Unesco Global Geopark dan Pesta Rakyat Pulo Sibandang

   Kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Sibandang Kecamatan Muara pada tanggal 30 Mei s/d 01 Juni 2024 dan merupakan hasil Kolaborasi dan sinergitas dari pihak terkait yakni @kemenparekraf

@disbudparekrafsumut @rumah_karya_indonesia @strive.ind @pulau_sibandang @dispar.taput sibandang @dispartaput @uggptobacaldera. Festival Caldera Toba Unesco Global Geopark dan Pesta Rakyat Pulo Sibandang ini melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal yang ada di kawasan Danau Toba khususnya Pulo Sibandang yang saat ini berhasil menembus 50 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Pada Kegiatan ini juga hadir di Pulau Sibandang Volunteer yang diprakarsai Oleh @strive.ind indonesia dengan mengahdirkan para dokter, tenaga medisi, praktisi kesehatan, ahli gizi, JCI, Atlet Basket, hingga Guru Yoga untuk memberikan edukasi kesehatan gizi kepada masyarakat. Para volunteer memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperbaiki kesehatan gizi sejak usia dini. Selain menikmati geosite pulau sibandang para volunteer strive juga mempelajari budaya dan berbaur dengan kearifan lokal di pulau sibandang.

2. Pesta Matumona Marga Siregar Tahun 2024.

   Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember – 18 Desember 2024 di Kecamatan Muara dengan beberapan rangkaian kegiatan seperti :

   a. Pesta Budaya Mamonamona
   b. Lomba lari Marathon
   c. Lomba Solu Bolon/Dragon Boat

Dampak kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dengan pendekatan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Diperoleh bahwa kontribusi sektor penyediaan akomodasi atas dasar harga konstan tahun 2020-2024, pertumbuhannya meningkat dan cukup signifikan sejak tahun 2022 sebagaimana pada grafik berikut :

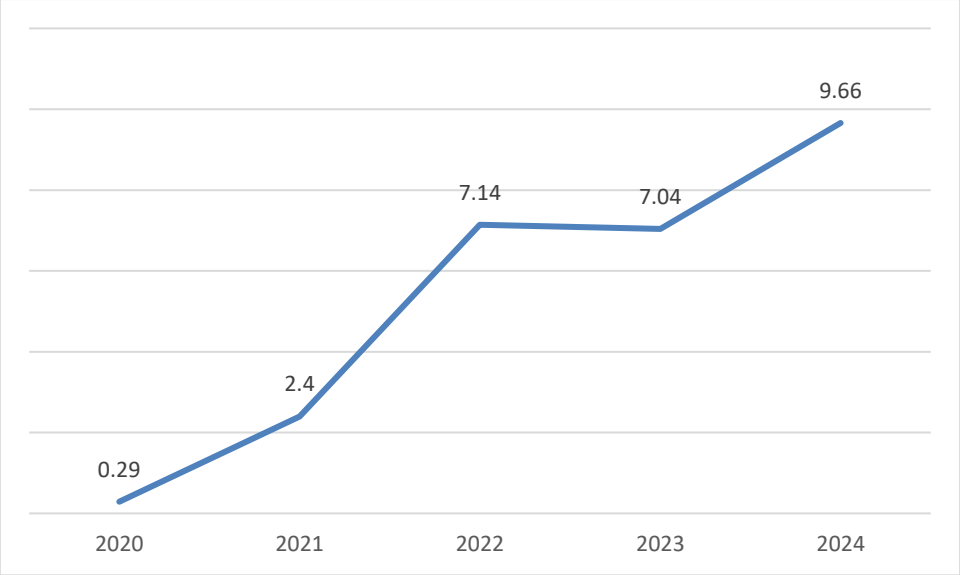

Sasaran 11

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata

Dalam mewujudkan tujuan meningkatnya jumlah wisatawan ditetapkan sasaran kinerja meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian sasaran meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan daya tarik wisata, capaian tahun 2024 sebesar 99,38% kriteria capaian sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.39
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	39,00	38,97	**99,87**	40,50	40,25	**99,38**

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Peningkatan daya tarik wisata maksudnya yakni pengembangan suatu obyek wisata misalnya dalam hal peningkatan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Realisasi Persentase peningkatan daya tarik wisata tahun 2024 sebesar 40,25% diperoleh sesuai formula penghitungan yakni jumlah daya tarik wisata yang dibenahi (35 objek wisata) dibagi jumlah daya tarik wisata (87 objek wisata) dikali 100,00%. Hal itu menggambarkan bahwa daya tarik wisata sudah mulai dibenahi dan dikembangkan melalui pembenahan sarana dan prasana objek wisata, pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pelaksanaan beberapa event pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara.

Misi 6 ***Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan***

Misi ke 6, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan bermaksud bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Dalam mewujudkan misi ke 6, ditetapkan 3 tujuan strategis yakni meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dengan indikator kinerja indeks infrastruktur daerah, tujuan terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator ketaatan terhadap RTRW/RDTR dan tujuan terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Tujuan strategis I

meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, capaian tahun 2024 sebesar 92,98% kriteria capaian sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja. Realisasi indeks infrastruktur daerah tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi tahun 2023.

Tabel 2.40
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	59,17	65,67	**100,00**	60,44	56,20	**92,98**

Infrastruktur merupakan salah satu elemen roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan meningkatkan kelancaran produktivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat. Berdasarkan data Bidang Perencanaan Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Indeks infrastruktur daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 56,20 poin.

Sasaran 12

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan

Sasaran meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan diukur melalui pencapaian indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap. Peran dan fungsi jalan sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten serta kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa, angkutan serta orang/penumpang. Capaian sasaran meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan tahun 2024 sebesar 84,16% kriteria capaian tinggi dan tidak memenuhi target kinerja. Realisasi kinerja sebesar 68,17% pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 79,23%.

Tabel 2.41
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan
Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	79,03	79,23	**100,00**	81,00	68,17	**84,16**

Realisasi persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 68,17% diperoleh dari hasil penambahan persentase panjang jalan kondisi mantap (47,26%) ditambah persentase jumlah jembatan kondisi baik (89,07 %) dibagi 2. Jalan kondisi mantap adalah jalan yang kondisinya baik dan sedang. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 47,26 % diperoleh dari hasil bagi panjang jalan kondisi baik (363,639 Km) ditambah kondisi sedang (143,961 Km) dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten (1.074,009 Km). Kondisi jalan Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Kondisi Jalan		**STATUS JALAN KABUPATEN**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
a.	Baik (m)	563,05	563,010	584,78	573,584	363,639
b.	Sedang (m)	158,16	165,939	154,46	172,10	143,961
c.	Rusak (m)	240,87	156,085	114,30	86,626	116,607
d.	Rusak Berat (m)	249,94	326,985	220,47	241,699	449,802
	JUMLAH	**1074,009**	**1074,009**	**1074,009**	**1074,009**	**1074,009**

Untuk melihat keberhasilan pembangunan jalan kondisi mantap yang semakin meningkat tahun ke tahun digambarkan pada grafik dibawah :

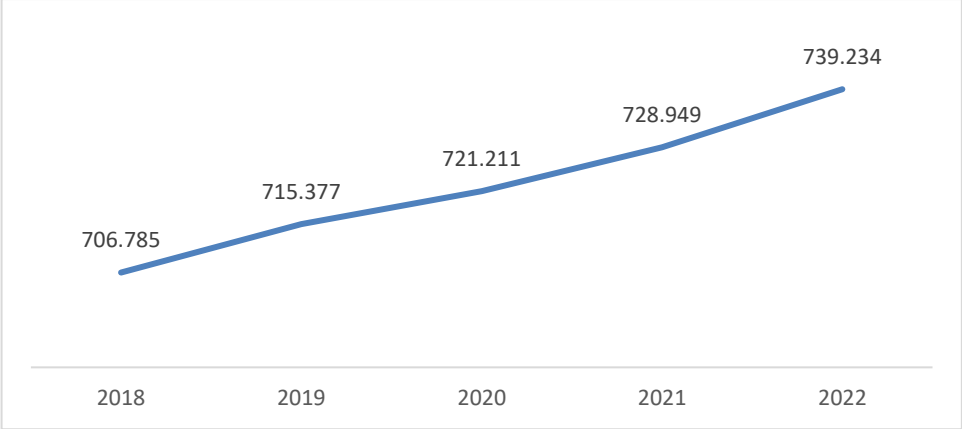

Realisasi jembatan kondisi mantap tahun 2024 sebesar 89,07 % adalah jumlah jembatan kondisi baik (111 unit) ditambah kondisi sedang (52 unit) dibagi total jembatan 183 unit.

Sasaran 13

Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Ketersediaan perumahan dan permukiman merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli utara untuk melindungi segenap masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak diukur dengan indikator kinerja cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	85,76	86,60	**99,88**	87,66	87,15	**99,42**

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,42 % kriteria capaian sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja. Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 87,15 %, diperoleh dari hasil bagi jumlah rumah layak huni yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 62.364 unit per total jumlah rumah sebanyak 71.559 unit. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan sebanyak 800 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 644 meter, 244 meter tembok penahan tanah, pendampingan pembangunan 28 titik pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU TS) yang bersumber dari dana APBN, peningkatan kualitas rumah menjadi rumah layak huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk RTLH sebanyak 438 unit.

Tidak tercapainya target kinerja tahun 2024 disebabkan pembangunan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum tidak berfokus pada penataan lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara peningkatan

kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni difokuskan pada lokasi kawasan permukiman kumuh, sehingga rumah layak huni tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umumnya.

Upaya yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun-tahun mendatang agar mencapai target yakni dengan memfokuskan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang diikuti dengan peningkatan rumah layak tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang didukung oleh PSU sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Program Kawasan Permukiman dan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar. Juga diperlukan evaluasi dan strategi yang harus dilakukan untuk kelurahan/desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan PSU di Kabupaten Tapanuli Utara agar dilakukan pemerataan pemenuhan PSU berdasarkan skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Sasaran 14

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Capaian sasaran meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi diukur melalui indikator kinerja cakupan pelayanan perhubungan, dengan capaian kinerja sebesar 100,00% kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja.

Tabel 2.43
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	58,50	57,83	**98,85**	61,25	67,76	**100,00**

Cakupan pelayanan perhubungan didefinisikan adalah rata rata persentase pelayanan urusan perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 67,76% meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 57,83%. Cakupan pelayanan perhubungan tahun 2023 dan 2024 digambarkan pada tabel berikut :

Indikator	**Satuan**	**Tahun 2023**			**Tahun 2024**		
		Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	23,00	18,92	82,26	25,00	16,67	66,67
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	49,00	30,28	61,80	51,00	32,15	63,04
Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan	Persen	19,00	5,59	29,42	21,00	15,45	73,56
Rata-rata capaian				**57,83**			**67,76**

1. Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

Adapun jumlah angka kecelakaan lalulintas di kabupaten Tapanuli utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara	kasus	142	154	170	142

Pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 25 %, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun n} - 1) - (\text{Jumlah angka Kecelakaan lalulintas Tahun n})}{\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun n} - 1} \text{ x } 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 adalah sebanyak 142 kasus, dengan uraian sebagai berikut : 102 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 15 kasus terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 25 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten, sementara pada tahun 2023 jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah sebanyak 170 kasus dengan uraian sebagai berikut : 115 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 25 Kasus terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 30 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2024 adalah 16,67% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, sehingga capaian kinerja pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2024 adalah sebesar 66,67%. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 25% adalah karena masih kurangnya kepedulian masayarakat untuk disiplin dan tertib dalam berlalu lintas khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten seperti kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya, belum mengedepankan keselamatan berlalulintas, ugal-ugalan, kendaraan yang tidak laik jalan, dan masih

adanya beberapa ruas jalan kabupaten dengan kondisi jalan yang kurang bagus.

Secara umum jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 25 kasus, jika dibandingkan dengan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten tahun 2023 sebanyak 30 kasus, maka mengalami penurunan sebanyak 5 kasus.

2. Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Daftar kendaraan yang uji berkala tahun 2024:

Tabel 2.45
Kepemilikan KIR Tahun 2024

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil Barang	519 Unit
2	Mobil Minibus	292 Unit
3	Mobil Bus	151 Unit
Total		**962 Unit**

Pada indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum dengan target sebesar 51%. Jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 adalah sebanyak 962 unit dan bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang wajib uji KIR yang terdata di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yaitu sebanyak 2.992 unit, realisasi yang dicapai adalah sebesar 32,15% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 51,00% sehingga capaian kinerja pada indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2024 adalah sebesar 63,04%. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 51,00% adalah karena Dinas Perhubungan KabupatenTapanuli Utara tidak dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor mulai bulan Januari s/d Juni 2024 yang disebakan oleh berakhirnya masa berlaku sertifikasi penguji kendaraan bermotor dan dalam proses pengurusan perpanjangan sertifikat penguji kendaraan bermotor. Serta kurangnya kepedulian para

pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala kendaraan mereka dan adanya kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

3. Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan

Jumlah angkutan perdesaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024:

Tabel 2.46
Angkutan Perdesaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Jumlah Armada
1	PO.Silindung	100 unit
2	PO. Aek Mual	75 unit
3	PO.Kompi Lima	50 unit
4	Koperasi Bintang Tapanuli	6 unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	15 unit
Jumlah		**246 unit**

Daftar angkutan perdesaan yang memiliki kartu pengawasan angkutan perdesaan tahun 2024:

Tabel 2.47
Angkutan Perdesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan Tahun 2024

No	Perusahaan Angkutan	Yang Memiliki Kartu Pengawasan
1	PO.Silindung	2 unit
2	KBT	1 unit
3	PO.Aek Mual	0 unit
4	PO. Kompi Lima	31 unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	4 unit
Jumlah		**38 unit**

Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 21,00%. Jumlah angkutan pedesaan yang mengurus kartu pengawasan angkutan

penumpang sebanyak 38 unit, realisasi yang dicapai sebesar 15,45% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 21,00% dengan capaian kinerja sebesar 73,56%. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan diakibatkan oleh kurangnya kesadaran para pemilik angkutan untuk melengkapi dokumen kartu pengawasan angkutan perdesaan.

Sasaran 15

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air

Pembangunan di bidang irigasi sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air diukur melalui pencapaian indikator indeks kondisi jaringan irigasi. Indeks kondisi jaringan irigasi adalah nilai yang menunjukkan kondisi jaringan irigasi, yang digunakan untuk menentukan tingkat pemeliharaan yang diperlukan, mulai dari pemeliharaan rutin hingga perbaikan berat atau penggantian. Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air sebesar 100,00% kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi indeks kondisi jaringan irigasi tahun 2024 sebesar 66,18%.

Tabel 2.48
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	64,00	63,56	**100,00**	66,00	66,18	**100,00**

Penghitungan indeks kondisi jaringan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi diperoleh dari penjumlah Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi dan P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kabupaten.

Realisasi kinerja Indeks Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2024 sebesar 66,18% diperoleh dari Jumlah Persentase Prasarana Fisik sebesar 32,40; Produktivitas sebesar 9,99; Sarana Penunjang sebesar 6,03; Organisasi Personalia sebesar 7,90; Dokumentasi sebesar 3,01; dan P3A/GP3A/IP3A sebesar 6,85 pada Daerah Irigasi Kabupaten. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan membangun saluran semen dan saluran talang sepanjang 5,55 km, melaksanakan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 700 m', normalisasi/restorasi sungai sepanjang 8 km serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 27 orang.

Tujuan strategis ke 2 misi 6 yakni terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan, diukur dengan indikator kinerja ketaatan terhadap RTRW/RDTR dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 28,57 % kriteria sangat rendah dan tidak memenuhi target kinerja. Realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai yang sama yakni sebesar 20,00 %. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.49
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	60,00	20,00	**33,33**	70,00	20,00	**28,57**

Sasaran 16

Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang

Persentase kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW, adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan II "terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan" yang merupakan misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektifitas pembangunan di seluruh wilayah daerah dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi.

Tabel 2.50
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Penataan dan Pengendalian Tata Ruang

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	60,00	60,00	**100,00**	70,00	70,00	**100,00**

Realisasi kinerja penataan dan pengendalian tata ruang pada tahun 2024 sebesar 70,00%, diperoleh dari luas penerbitan dokumen keterangan tata ruang /luas permohonan dokumen keterangan tata ruang. Capaian kinerja tahun 2024 sudah mencapai dari target RPJMD sebesar 70,00%. Target kinerja sebesar 70,00% ditentukan berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dimana pada pasal 149 tertulis bahwa persetujuan pemanfaatan ruang untuk pemohon yang masuk kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terbit secara otomatis melalui aplikasi *Online Single Submission*

(OSS) yang diterbitkan oleh aplikasi pemerintah pusat dengan melampirkan pernyataan mandiri.

Penerbitan secara otomatis tersebut menjadi dasar Dinas PUTR menentukan target hanya 70,00 % mengingat penerbitan dokumen keterangan tata ruang sebahagian diterbitkan oleh aplikasi OSS bukan lagi melalui dokumen keterangan tata ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUTR.

Pada tahun 2024, permohonan dokumen penerbitan tata ruang sebanyak 57.960 Ha baik dalam hal permohonan izin non usaha dan usaha *(bukan merupakan usaha UMKM).* Permohonan dimaksud kemudian disandingkan dengan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (Kawasan Perkotaan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita) yang dimana dari hasil tersebut, Dinas PUTR mengeluarkan surat penerbitan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan pola ruang yang tercantum pada RTRW maupun RDTR sebanyak 40.752 Ha

Adapun pencapaian target indikator tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan pencapaian target indikator tersebut terdapat beberapa langkah diantaranya :

a. Melakukan koordinasi antar lintas sektoral yang terkait.
b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap *stakeholder*.
c. Melakukan pengendalian terhadapan pemanfaatan dan penggunaan ruang melalui proses perizinan.
d. Melakukan revisi terhadap RTRW yang mempunyai persentase penyimpangan diatas 20% yang terkait dengan pola penggunaan lahan.

Tujuan strategis ke 3 misi 6 yakni terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup, diukur dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian tahun 2024 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja.

Tabel 2.51
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,05	77,81	**100,00**	78,00	81,53	**100,00**

Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijkan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran 17

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah/daerah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Tutupan Lahan.

Tabel 2.52
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,05	77,81	**100,00**	78,00	81,53	**100,00**

IKLHD Kabupaten Tapanuli Utara merupakan nilai komposit dari Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Sesuai tabel diatas, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 100 % kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi kinerja sebesar 81,53 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang diperoleh dari penjumlahan kumulatif Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah sebagai berikut :

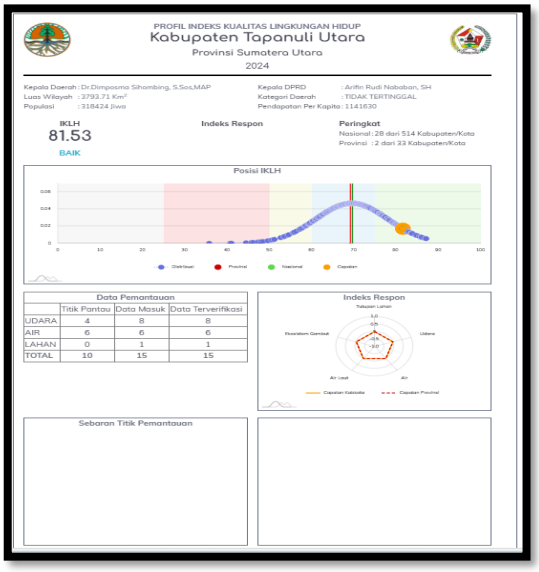

IKLH Kabupaten/Kota = (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKTL)
= (0,376x70,00) + (0,405x94,75) + (0,219x76,89)
= 26,32+38,37+16,84
= **81,53**

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2023, sebagaimana pada grafik berikut :

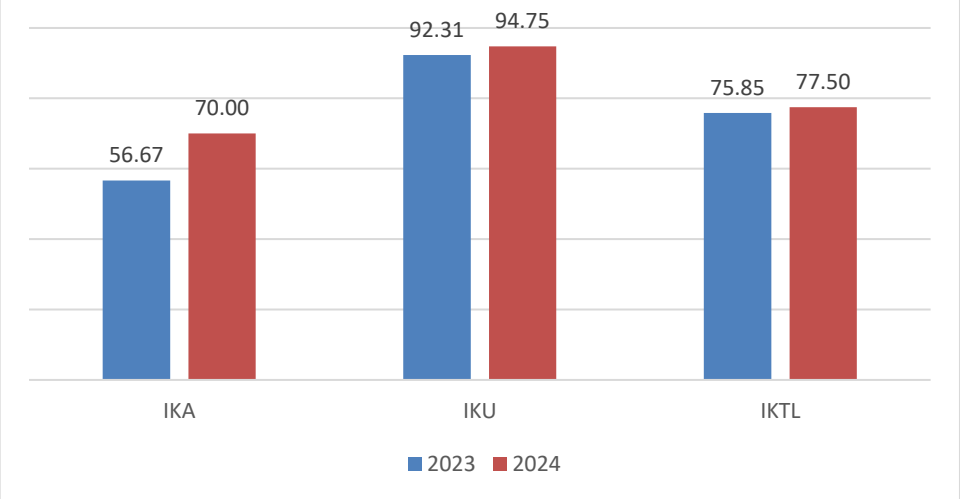

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yaitu merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA diperoleh dengan pengujian sampel air sungai yang telah ditetapkan titik pantaunya, dalam hal ini titik pantau yang ditetapkan adalah pada Sungai Sigeaon. Beberapa parameter yang diuji untuk menetapkan nilai IKA antara lain : pH DO, BOD, COD, TSS, PO_4, Fecal Coli dan Coliform dengan rumus yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu :

$$IPj = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 R + (\frac{Ci}{Lij})^2 M}{2}}$$

Dimana :

Lij	: Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
Ci	: Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
IPj	: Pencemaran bagi peruntukan (j)
IPj	: (Ci/Lij, C2/L2j,…)
(Ci/Lij) Maksimum	: Nilai maksimum dari Ci/Lij
(Ci/Lij) Rata-rata	: Nilai rata-rata dari Cij/Lij

Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ≤ IPj ≤ 1,0 : baik (memenuhi baku mutu)
b. 1,0 ≤ IPj ≤ 5,0 : cemar ringan
c. 5,0 ≤ IPj ≤ 10,0 : cemar sedang
d. IPj ≥ 10,0 : cemar berat

Nilai IKA tahun 2023 yang didapat adalah sebesar 56,67 dengan kondisi ‘sedang’ atau ‘cemar ringan’ sedangkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 70,00 dengan kondisi ‘baik’ atau ‘memenuhi baku mutu’ dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar 13,33 poin. Dari nilai tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan nilai IKA dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 13,33 poin. Penetapan nilai IKA yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021, maka nilai IKA yang didapat pada tahun 2024

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 70,00 yang menggambarkan kondisi kualitas air “baik” (hasil dari analisa laboratorium terlampir).

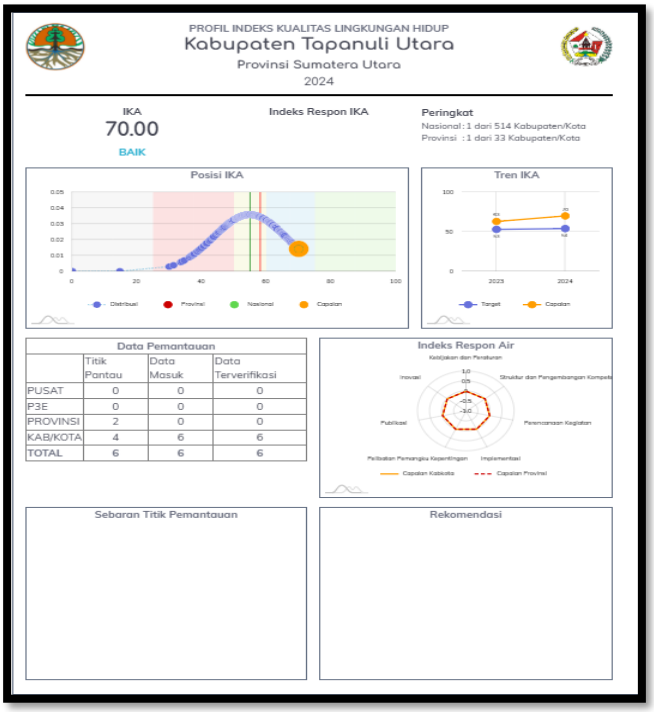

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang menggambarkan kondisi kualitas udara yaitu nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dimana nilai IKU ini didapat berdasarkan hasil analisa pengkuran udara ambien pada titik sampling yang sudah ditentukan dan diuji di laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Parameter yang diukur untuk mendapat nilai IKU adalah dengan pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* yaitu sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NO2) dengan kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (empat) titik yaitu :

1. Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas dimana untuk titik ini passive sampler dipaparkan pada lokasi simpang 4 (empat) bundaran kota Tarutung.

2. Daerah atau Kawasan industri, dimana untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi kegiatan PT. Sarulla Operation limited di Kecamatan Pahae Julu.
3. Pemukiman padat penduduk, untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi pemukiman penduduk di Gang Abadi Aek Ristop Kecamatan Tarutung.
4. Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi, untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi Kantor Kodim 0210 Tarutung.

Cara perhitungan nilai IKU adalah :

Data Indeks Kualitas Udara (IKU) = 100 – (50/0.9 x (PU-0,1))

dimana (PU = 50% Indeks SO2+ Indeks NO2)

(PU = Indeks Pencemar udara)

Nilai SO_2 dan NO_2, merupakan hasil sampling kualitas udara yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara (sampling) dengan pengujian laboratorium oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Nilai IKU tahun 2023 adalah sebesar 92,31dan menggambarkan Kualitas Udara dengan kondisi ‘sangat baik’ sedangkan nilai IKU untuk tahun 2024 adalah 94,75 melebihi target yang ditetapkan yaitu 89,06 menggambarkan kualitas udara dengan kondisi ‘sangat baik’. Nilai IKU tahun 2024 dibandingkan nilai IKU tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,44 poin tetapi masih sama-sama menggambarkan kualitas udara dengan kondisi sangat baik.

Pembobotan Indeks Kualitas Udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 diberikan batasan sebagai berikut:

a. 90-100 = sangat baik
b. 70-90 = baik
c. 50-70 = sedang
d. 25-50 = kurang
e. 0-25 = sangat kurang

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan ukuran yang menggambarkan luas tutupan lahan bervegetasi di suatu daerah, perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ini dihitung kawasan hutan dan ditambahkan dengan semak belukar dan belukar rawa yang berada di Kawasan hutan, sempadan sungai, Danau dan pantai, lereng > 25 % ruang terbuka hijau, kebun raya dan tanaman keanekaragaman hayati

Adapun jenis kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung peningkatan nilai IKTL adalah program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordionasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi serta program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH. Untuk penghitungan nilai IKTL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan menggunakan analisis citra satelit dan hasil analisis diberikan kepada daerah kabupaten/Kota yang akan menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

Nilai IKTL tahun 2023 adalah 75,85 dan menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan dengan kondisi 'baik' dan pada tahun 2024 nilai IKTL adalah 76,89. Nilai IKTL 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,04 poin dengan kondisi 'baik', tetapi nilai IKTL ini belum memenuhi target nilai IKTL tahun 2024 yaitu sebesar 77,50

Hal tersebut terjadi karena kurangnya data yang digunakan dalam mengisi kelengkapan data untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diisi melalui Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup RI, dimana untuk menghitung IKTL Kabupaten Tapanuli Utara diperlukan beberapa data dan fasilitas yang harus ada, antara lain :

1. SK Ruang Terbuka Hijau;
2. Taman Keanekaragaman Hayati;
3. Kebun Raya;
4. Minimnya dana rehabilitasi lahan kritis.

Pembobotan Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 diberikan batasan sebagai berikut:

a. 90-100 = sangat baik
b. 70-90 = baik
c. 50-70 = sedang
d. 25-50 = kurang
e. 0-25 = sangat kurang

Sasaran 18

Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif

Sistem penanggulangan bencana yang responsif adalah sistem yang dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan dan mempercepat pemulihan. Sistem ini dapat diwujudkan dengan berbagai upaya seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Upaya pengelolaan resiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulan bencana pada periode tertentu.

Sasaran meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks risiko bencana, dengan capaian tahun 2024 sebesar 97,03 % kriteria sangat tinggi dan tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.53
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Risiko Bencana	Persen	114	118	**96,49**	112,00	115,33	**97,03**

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2024 sebesar 97,03 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023. Realisasi kinerja sebesar 115, 33 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 118, dengan keduanya menggambarkan kelas risiko bencana Kabupaten Tapanuli Utara berada pada kelas risiko sedang. Realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2024 diperoleh dari Surat Deputi

Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menyampaikan hasil Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana gambar berikut:

Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Nias	Tidak menilai	211.70
Mandailing Natal	0.29	214.80
Tapanuli Selatan	0.53	141.20
Tapanuli Tengah	0.37	181.49
Tapanuli Utara	0.35	115.33
Toba Samosir	0.27	107.20
Labuhanbatu	0.28	151.20
Asahan	0.35	148.57
Simalungun	0.22	80.07
Dairi	0.43	116.00
Karo	0.48	110.22
Deli Serdang	Tidak menilai	121.26
Langkat	0.27	142.62
Nias Selatan	0.24	193.97
Humbang Hasundutan	0.33	127.20
Pakpak Bharat	0.42	105.26
Samosir	0.30	114.00
Serdang Bedagai	0.34	124.00
Batu Bara	0.27	143.20
Padang Lawas Utara	0.30	137.70
Padang Lawas	Tidak menilai	152.76
Labuhanbatu Selatan	0.25	131.20
Labuhanbatu Utara	0.29	155.20
Nias Utara	Tidak menilai	214.00
Nias Barat	Tidak menilai	210.80
Kota Sibolga	0.33	165.92
Kota Tanjung Balai	0.37	107.26
Kota Pematangsiantar	0.24	91.20
Kota Tebing Tinggi	0.44	90.05
Kota Medan	0.70	84.50
Kota Binjai	0.22	103.20
Kota Padang Sidimpuan	0.38	122.57
Kota Gunungsitoli	0.39	199.01

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020 tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2023, yakni pada angka 118,00, selanjutnya di tahun 2024 menjadi 115,33. Hal ini disebabkan kecenderungan nilai kapasitas penanggulangan bencana daerah yang konstan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) ini dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu, bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Rumus berikut :

$$\text{RISIKO (R)} = \text{Bahaya (Hazard)} \times \frac{\text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity)}}$$

Dimana bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Misi 7 *Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri*

Dalam mewujudkan misi ke 7 ditetapkan tujuan meningkatnya kapasitas desa dengan indikator kinerja indeks desa membangun. Indeks Desa Membangun adalah indeks pengukuran terhadap tungkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Capaian tahun 2024 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja.

Tabel 2.54
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kapasitas Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6100	0,6315	**100,00**	0,6200	0,6535	**100,00**

Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2024 sebesar 0,6535 diperoleh dari publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Realisasi ini

menggambarkan status IDM Kabupaten Tapanuli Utara merupakan desa berkembang artinya bahwa desa – desa di Kabupaten Tapanuli Utara telah mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.

Sasaran 19

Meningkatkan status desa

Sasaran meningkatkan stasus desa capaiannya sebesar 100,00 kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi jumlah desa naik status sejumlah 41 desa diperoleh dari publikasi Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.55
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Status Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah desa naik status	Desa	30,00	25,00	**83,33**	35,00	41,00	**100,00**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada prinsip prinsip yang semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu di dorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan Desa dapat melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya atau istilah Desa membangun. Pemerintah pusat maupun tingkat Kabupaten mendorong adanya otonomi desa dengan memberikan

perhatian yang sebesar besarnya pada pembagunan di pedesaan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Sesuai dengan RPJMD tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatkan status desa dengan indikator desa naik status. Tahun 2024 jumlah desa naik status di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 41 Desa dengan target 35 Desa dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 2.56
Daftar Desa Kabupaten Tapanuli Utara Naik Status Tahun 2024

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	TARUTUNG	PARBUBU I	0,7056	BERKEMBANG	0,8087	MAJU
2	TARUTUNG	HUTAPEA BANUAREA	0,6776	BERKEMBANG	0,7348	MAJU
3	TARUTUNG	HUTAURUK	0,5883	TERTINGGAL	0,6384	BERKEMBANG
4	TARUTUNG	SIHUJUR	0,5779	TERTINGGAL	0,6195	BERKEMBANG
5	TARUTUNG	HUTATORUAN III	0,586	TERTINGGAL	0,6048	BERKEMBANG
6	ADIAN KOTING	PAGARAN LAMBUNG IV	0,5797	TERTINGGAL	0,6083	BERKEMBANG
7	ADIAN KOTING	PANGARAN PISANG	0,6989	BERKEMBANG	0,76	MAJU
8	ADIAN KOTING	BANUAJI I	0,6865	BERKEMBANG	0,7851	MAJU
9	ADIAN KOTING	PANGARAN LAMBUNG I	0,6456	BERKEMBANG	0,7351	MAJU
10	SIPOHOLON	RURA JULU TORUAN	0,4341	SANGAT TERTINGGAL	0,4984	TERTINGGAL
11	PAHAE JULU	SIBAGANDING	0,6849	BERKEMBANG	0,7087	MAJU
12	PAHAE JULU	HUTA BARAT	0,6505	BERKEMBANG	0,7141	MAJU
13	PAHAE JAE	SILANGKITANG	0,6914	BERKEMBANG	0,7175	MAJU
14	SIBORONG-BORONG	SIBORONG BORONG II	0,5692	TERTINGGAL	0,6124	BERKEMBANG

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
15	PAGARAN	LUMBAN JULU	0,5857	TERTINGGAL	0,6302	BERKEMBANG
16	PAGARAN	BANUALUHU	0,706	BERKEMBANG	0,7102	MAJU
17	PAGARAN	LUMBAN INA INA	0,5673	TERTINGGAL	0,6359	BERKEMBANG
18	PARMONANGAN	AEK RAJA	0,6962	BERKEMBANG	0,7073	MAJU
19	SIPAHUTAR	SABUNGANNIHUTA IV	0,556	TERTINGGAL	0,6456	BERKEMBANG
20	SIPAHUTAR	SABUNGANNIHUTA I	0,6103	BERKEMBANG	0,7448	MAJU
21	SIPAHUTAR	SIPAHUTAR I	0,6898	BERKEMBANG	0,714	MAJU
22	SIPAHUTAR	SIPAHUTAR II	0,6846	BERKEMBANG	0,7648	MAJU
23	SIPAHUTAR	TAPIAN NAULI III	0,567	TERTINGGAL	0,6119	BERKEMBANG
24	SIPAHUTAR	ONAN RUNGGU III	0,6273	BERKEMBANG	0,7206	MAJU
25	SIPAHUTAR	SIABAL-ABAL I	0,6829	BERKEMBANG	0,719	MAJU
26	SIPAHUTAR	AEK NAULI II	0,5876	TERTINGGAL	0,7773	MAJU
27	SIPAHUTAR	TAPIAN NAULI II	0,5406	TERTINGGAL	0,6598	BERKEMBANG
28	SIPAHUTAR	ONAN RUNGGU IV	0,586	TERTINGGAL	0,6014	BERKEMBANG
29	SIPAHUTAR	SIABAL-ABAL II	0,6311	BERKEMBANG	0,7706	MAJU
30	SIPAHUTAR	AEK NAULI I	0,5817	TERTINGGAL	0,6729	BERKEMBANG
31	SIPAHUTAR	TAPIAN NAULI I	0,5724	TERTINGGAL	0,6768	BERKEMBANG
32	SIPAHUTAR	SABUNGANNIHUTA V	0,5441	TERTINGGAL	0,6083	BERKEMBANG
33	SIPAHUTAR	SIABAL-ABAL IV	0,5557	TERTINGGAL	0,6578	BERKEMBANG
34	PANGARIBUAN	SILANTOM TONGA	0,5937	TERTINGGAL	0,6659	BERKEMBANG
35	PANGARIBUAN	SILANTOM JULU	0,5783	TERTINGGAL	0,6505	BERKEMBANG
36	PANGARIBUAN	PURBATUA	0,5597	TERTINGGAL	0,6263	BERKEMBANG
37	PANGARIBUAN	SIBINGKE	0,5583	TERTINGGAL	0,6694	BERKEMBANG
38	PANGARIBUAN	PADANG PARSADAAN	0,5832	TERTINGGAL	0,6054	BERKEMBANG
39	PANGARIBUAN	RAHUT BOSI ONAN	0,5803	TERTINGGAL	0,647	BERKEMBANG
40	PANGARIBUAN	SIGOTOM TIMUR	0,5192	TERTINGGAL	0,6213	BERKEMBANG
41	GAROGA	PARINSORAN	0,5989	TERTINGGAL	0,6549	BERKEMBANG
42	MUARA	HUTAGINJANG	0,5819	TERTINGGAL	0,696	BERKEMBANG
43	MUARA	SAMPURAN	0,5898	TERTINGGAL	0,6965	BERKEMBANG

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
44	MUARA	SILANDO	0,6313	BERKEMBANG	0,7092	MAJU

Untuk meningkatkan status desa, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga Pemerintah Desa dapat mengalokasikan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pada APBDesa sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa dalam Desa Membangun. Lembaga Desa terdiri dari : Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Manfaat status desa yang dikeluarkan dari data IDM menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa Tahun berikutnya. Perkembangan satus desa sesuai hasil pemutakhiran idm menjadi salah satu dasar pengalokasian dana desa tahun berikutnya oleh Kementerian Keuangan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial

Misi 8 ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government***

Perkembangan teknologi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan internet di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah menyikapinya dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. *E-government* tidak berupa website semata yang hanya memuat informasi dari pemerintah daerah tetapi merupakan salah satu cara menuju *Good Governance* yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan dan akuntabel. *E-government* juga bertujuan untuk menciptakan kenyaman masyarakat dalam menerima layanan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih berdaya guna hal yang mutlak dilaksanakan pemerintah daerah adalah reformasi birokrasi. Dalam mewujudkan tercapainya misi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government ditetapkan 2 tujuan yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, capaian tahun 2024 sebesar 95,95% kategori sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.57
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,00	60,67	**99,46**	62,50	59,97*	**95,95**

* *Data sementara*

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Indeks yang menggambarkan implementasi program reformasi birokrasi oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 25 Februari 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, bahwa hasil evaluasi sementara Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni 59,97 poin kategori/predikat CC. Realisasi sementara tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan nilai 60,67 predikat B.

Sasaran 20

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja diukur dengan pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja, dengan capaian 90,19% kriteria tinggi. Capaian tahun 2024 menurun dibandingkan capaian tahun 2023.

Tabel 2.58
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01	62,25	**89,36**	70,01	63,14	**90,19**

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN – RB Nomor B/72/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas

kinerja Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 63,14 predikat B. Rincian hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.59
Rincian Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,44
2	Pengukuran Kinerja	30	19,49
3	Pelaporan kinerja	15	10,32
4	Avaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,89
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**63,14**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 62,56 disebabkan beberapa rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022 telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan berbagai upaya perbaikan yakni melakukan reviu pohon kinerja pemerintah daerah dan sebagian perangkat daerah, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemda dan sebagian perangkat daerah, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melalui website taputkab.go.id., pelaksanaan evaluasi internal akuntabilitas terhadap 44 perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah dan perangkat daerah telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi internal SAKIP oleh Inspektorat Daerah. Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bila dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada grafik berikut :

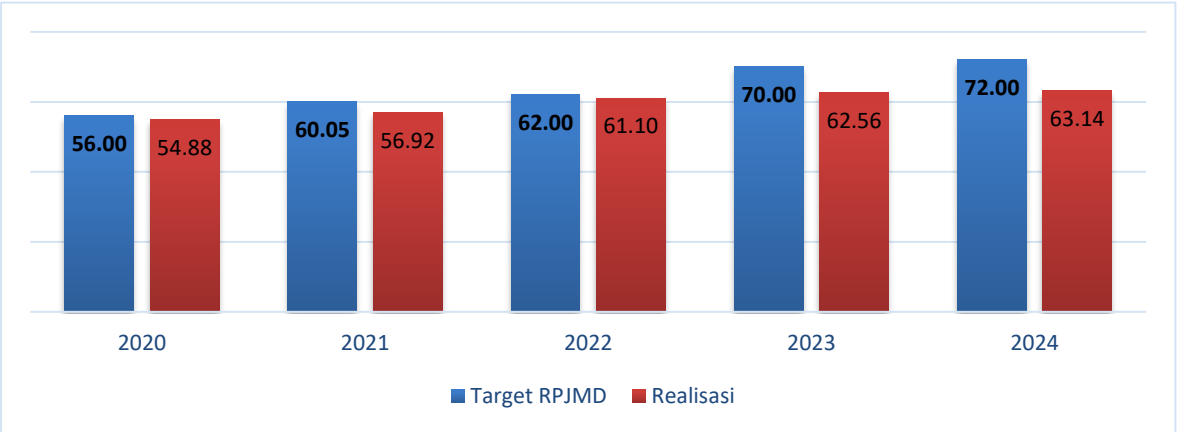

Dari grafik diatas, bahwa realisasi nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi belum optimal sehingga belum mampu mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran dan kinerja yang selaras dan tepat. Penyebab tidak tercapainya target kinerja yakni masih rendahnya kualitas dan keselarasan perencanaan di level pemerintah daerah dan perangkat daerah, pohon kinerja dan penjenjangan kinerja (cascading) belum logis dan selaras antara pemerintah daerah dan perangkat daerah. Upaya yang dilakukan agar target akhir RPJMD predikat AKIP BB dapat tercapai yakni menindaklanjuti rekomendasi Deputi RB-Kunwas Kementerian PANRB antara lain :

a. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
b. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada perangkat daerah meliputi Renstra, IKU dan PK;
c. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
d. Memastikan penentuan target pada perangkat daerah dapat diukur, menantang dan *achievable* untuk mendukung peningkatan kinerja;
e. Membangun aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran;
f. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai;
g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat

informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan

h. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja dan kebutuhan anggarannya.

Sasaran 21

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolhen keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Harapan dari pengelolaan keuangan yang baik adalah terciptanya *good and clean government*. Sasaran meningkatnya kualitas tata kelola keuangan diukur dengan pencapaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Capaian tahun 2024 sebesar 100,00 % sesuai target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi.

Tabel 2.60
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	**100,00**	WTP	WTP*	**100,00**

Realisasi indikator kinerja dalam pengukuran kinerja tahun 2024 menggunakan realisasi kinerja tahun 2023. Opini BPK terhadap laporan

keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP (*Unqualified Opinion*) adalah pendapat yang diberikan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan pada laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, ketentuan tersebut menganut basis *accrual*, bahwa seluruh komponen Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan basis akrual. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan WTP ke 10 kali secara berturut sejak tahun 2014.

Keberhasilan memperoleh predikat Opini WTP 8 tahun berturut turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan, kerjasama dan kerja keras semua perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan, peningkatan SDM dengan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Selain itu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan dan Barang Milik Daerah) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat membantu melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah. Khusus untuk

Aplikasi Perencanaan Penganggaran menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Sasaran 22

Meningkatkan pendapatan daerah

Sasaran meningkatkan pendapatan daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat pertumbuhan pendapatan daerah, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,01 % kriteria capaian kategori tinggi dan tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.61
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,5	3,18	**100,00**	3,00	2,58	**86,01**

Definisi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada indikator ini bermaksud menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang, terdiri dari a) pendapatan pajak daerah; b) pendapatan retribusi daerah; dan c) lain-lain PAD yang sah. Realisasi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 2,58 % diperoleh dari formula realisasi PAD tahun 2024 dikurangi realisasi PAD tahun 2023 dibagi realisasi PAD tahun 2023.

$$\text{Tingkat Pertumbuhan PAD} = \frac{Realisasi\ PAD\ tahun\ n - \text{Realisasi PAD tahun n} - 1}{Realisasi\ PAD\ tahun\ n - 1}$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan PAD} = \frac{1.437.105.480.848{,}40 - 1.400.956.430.711{,}50}{1.400.956.430.711{,}50}$$

$$2{,}58\ \% = \frac{36.149.050.136{,}90}{1.400.956.430.711{,}50}$$

Sasaran 23

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), capaian tahun 2024 sebesar 98,86 % kriteria sangat tinggi tetapi tidak memenuhi target kinerja. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,43	**97,72**	3,51	3,47	**98,86**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, bahwa Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yakni 3,47 poin kategori B- bermakna Baik Dengan Catatan, peringkat 246 dari 360 pemerintah kabupaten se Indonesia. Realisasi IPP tahun 2024 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni 3,43 poin dengan kategori sama yakni B- bermakna baik dengan catatan. Secara umum definisi Kategori Baik Dengan Catatan yakni unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sudah memiliki sarana prasaran yang cukup, memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan; dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

Interval nilai, kategori dan makna Indek Pelayanan Publik, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.63
Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan

Pada evaluasi pelayanan publik tahun 2024, perangkat daerah sebagai sampel evaluasi yakni Dinas Sosial dengan Indeks Pelayanan Publik 3,08 ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dengan Indeks Pelayanan Publik 3,4 dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dengan Indeks Pelayanan Publik 3,92. Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja yakni komitmen dan dukungan pimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembentukan tim percepatan pencapaian target pembangunan tahun 2024 dan dukungan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Upaya yang dilakukan agar target kinerja meningkat yakni berkoordinasi dengan Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB guna menindaklanjuti rekomendasi /saran perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tapanuli Utara, menyusun rencana kerja peningkatan indeks pelayanan publik. Kinerja lain dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meraih nilai 83,27 Zona Hijau, Kategori B Kualitas Tinggi. Realisasi ini meningkat sebanyak 1,69 poin dari tahun 2023 dengan nilai 81,58 Zona Hijau dan Kategori B Kualitas Tinggi.

Sasaran 24

Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditetapkan sasaran meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut profesional dan berintegritas sehigga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Pencapaian sasaran meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN. Capaian tahun 2024 sebesar 100,00%. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.64
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	39,00	77,60	**100,00**	40,00	77,60	**100,00**

Realisasi IP ASN tahun 2024 sebesar 77,60 diperoleh dari penghitungan mandiri BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara pada aplikasi https://ip-jasn.bkn.go.id, dan belum dilakukan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja

dan Disiplin. Berdasarkan penghitungan IP ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN, sebagai berikut :

a. Nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi
b. Nilai 81 – 90 berkategori tinggi
c. Nilai 71 – 80 berkategori sedang
d. Nilai 61 – 70 berkategori rendah
e. Nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah

Realisasi IP ASN Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 31,08 kategori sangat rendah, diperoleh berdasarkan penghitungan 4 dimensi berikut:

Tabel 2.65
Penghitungan IP ASN Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Dimensi Indeks Profesionalitas ASN	Bobot	Nilai 2024	% Capaian
Dimensi Kualifikasi	25,00	20,39	81,56
Dimensi Kompetensi	40,00	27,11	67,77
Dimensi Kinerja	30,00	25,09	83,63
Dimensi Disiplin	5,00	5,00	100,00
Total	**100,00**	**77,60**	

- Dimensi kualifikasi capaian terhadap bobot yakni 81,56% disebabkan kualifikasi pendidikan ASN didominasi pendidikan strata 1, persentase 62,72%; SLTA-D-2 persentasenya 15,74%; kualifikasi pendidikan D-3 D-4 persentasenya 13,45%; kualifikasi pendidikan strata 2, persentasenya 7,05%; kualifikasi pendidikan dibawah SLTA, persentasenya 1,03%; dan kualifikasi pendidikan strata 3 persentase 0,00%.
- Dimensi kompetensi capaian terhadap bobot yakni 67,77% capaiannya sedang disebabkan keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat, seminar dan workshop sehingga ASN yang mengikuti diklat sangat kecil yang mengakibatkan skor kompetensi tidak tercapai.
- Dimensi kinerja capaian terhadap bobot yakni 83,63% disebabkan realisasi kinerja setiap ASN umumnya realisasi sesuai target kinerja.

- Dimensi disiplin capaian terhadap bobot 100,00% sangat baik, menunjukkan ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan kedua misi ke 8 yakni mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan. Capaian tahun 2022 sebesar 100,00% kriteria realisasi sangat tinggi dan memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 2.66
Pengukuran Kinerja Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Nyaman

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	**100,00**

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tahun 2024 sebesar 100,00% dengan jumlah kasus sebanyak 276 kasus gangguan trantibum dan keseluruhan telah ditidaklanjuti/diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara. Gangguan trantibum tahun 2024 yakni :

Razia Rokok Ilegal	2	kasus
Razia Pupuk bersubsidi	56	kasus
Penertiban ODGJ	6	kasus
Penertiban penebangan kayu ilegal	4	kasus
Penertiban tambang/galian C	21	kasus
Penertiban spanduk/baliho	16	kasus
Penertiban IMB Bangunan	4	kasus

Penegakan Perbup 40 Tahun 2020	136	kasus
Razia Penyakit Masyarakat	9	kasus
Penertiban/ Razia Anak Gepeng	5	kasus
Penertiban Pedagang Kaki Lima Pajak/ Pasar	10	kasus
Operasi Kasih Sayang	7	kasus

Dalam pencapaian tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, ditetapkan sasaran strategis meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan 2 indikator kinerja persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya,ideologi, politik,ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) dan persentase penurunan gangguan trantibum.

Sasaran 25

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban diperoleh rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,00% kriteria sangat tinggi. Kinerja capaian tahun 2024 sama dengan kinerja tahun 2023.

Tabel 2.67
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya,ideologi, politik,ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	**100,00**
Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	5,00	**100,00**	5,00	5,00	**100,00**

Pengukuran sasaran kinerja terhadap 2 indikator yakni persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya,ideologi, politik,ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) capaiannya 100,00 % kriteria

sangat tinggi dan memenuhi target kinerja, indikator kinerja persentase penurunan gangguan trantibum capaiannya 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi dan memenuhi target kinerja.

Penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik,ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) adalah penanganan atau penyelesaian potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik dan ekonomi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Formula yang digunakan adalah jumlah konflik yang ditangani /difasilitasi dibagi jumlah konflik yang dilaporkan dan disajikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{Jumlah\ Konflik\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ Konflik\ yang\ dilaporkan} \text{ x } 100\%$$

Adapun jumlah konflik yang dilaporkan dan yang difasilitasi penanganannya pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 konflik, dimana bentuk konflik yang terjadi adalah sebagai berikut :

a. Konflik/sengketa tanah : 8 konflik
b. Konflik tapal batas desa : 1 konflik
c. Aksi unjuk rasa/demontrasi : 8 konflik
d. Perijinan tambang galian C : 1 konflik

Pada tahun 2023, jumlah konflik yang dilaporkan dan yang difasilitasi penanganannya sebanyak 4 konflik. Terjadinya peningkatan jumlah konflik yang difasilitasi penanganannya pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah karena adanya dukungan dari kecamatan dalam memfasilitasi berbagai laporan konflik yang diterima oleh kecamatan dari masyarakat dan diteruskan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk memfasilitasi penanganan konflik tersebut. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung adanya peran aktif dari Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam menangani konflik serta laporan dari masyarakat terkait potensi konflik yang akan muncul.

Penurunan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2024 tersebut di dukung oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraannya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dalam upaya menciptakan suasana linkungan yang aman kondusif serta koordinasi yang semakin baik dengan aparat terkait khususnya dengan kepolisian dalam penangangan pelanggaran perda dan perkada adalah merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja tersebut. Pada dasarnya semua laporan pengaduan, baik temuan ataupun rekomendasi dari pelapor dapat ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam, hasil dari laporan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Estimasi pelaksanaan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 dengan target 100% dari setiap laporan pengaduan, dapat ditindaklanjuti dalam watu 24 jam.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, diperoleh 15 sasaran strategis sudah efisien dalam mencapai target kinerja dan 10 sasaran strategis tidak efisien. Analisis efisiensi dilakukan terhadap sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target kinerja atau capaian sebesar 100,00%. Analisis efisiensi ditunjukkan pada tabel 2.68 berikut :

Tabel 2.68
PENGUKURAN KINERJA SASARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2024				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi I Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan											
1	**Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan**		**Indeks Ketahanan Pangan**								
	1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	38.57	38.57	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	7,693,985,150.00	7,444,602,917.00	96.76	#VALUE!	Efisien
						Pengelolaan perikanan budidaya	2,217,064,650.00	2.137.690.675,00	#VALUE!		
						Penanganan kerawanan pangan	200,000,000.00	197.626.250,00	#VALUE!		
	2	Meningkatkan diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	99.78	99.78	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	439,999,920.00	433.651.775,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pengawasan keamanan pangan	25,000,000.00	24.996.696,00	#VALUE!		
Misi II Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal											
1	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah**		**Pertumbuhan ekonomi**								
	1	Meningkatkan nilai investasi	Nilai Investasi	82.34	82.34	Pengembangan iklim penanaman modal	71,293,000.00	68.614.150,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pelayanan penanaman modal	99,796,000.00	71.966.000,00	#VALUE!		
						Promosi penanaman modal	81,402,900.00	80.325.066,00	#VALUE!		
						Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	548,632,800.00	479.227.596,00	#VALUE!		
						Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	74,008,200.00	72.942.000,00	#VALUE!		
	2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	100.00	100.00	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	12,156,188,200.00	11.842.665.226,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
	3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	89.71	89.71	Perencanaan dan pembangunan industri	3,773,945,000.00	3.200.183.704,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
	4	Peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	100.00	100.00	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	347,352,900.00	331.914.363,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
						Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	422,930,293.00	409.084.461,00	#VALUE!		
	5	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	100.00	100.00	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	327,305,200.00	326.002.000,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	100,000,000.00	98.054.750,00	#VALUE!		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2024				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi III Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan											
1	**Meningkatnya sistem pendidikan daerah**		**Indeks Pendidikan**								
	1	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	100.00	99.90	Pengelolaan pendidikan	66,648,202,704.00	7.343.189.780,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
			Harapan lama sekolah	99.71							
			Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	100.00		Pembinaan perpustakaan	181,707,600.00	140.761.166,00	#VALUE!		
2	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**		**Indeks Kesehatan**								
	1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	100.00	100.00	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	40,800,175,608.00	28.297.474.529,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,233,079,700.00	573.286.092,00	#VALUE!		
						Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	556,815,200.00	440.355.901,00	#VALUE!		
						Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	90,000,000.00	89.378.000,00	#VALUE!		
			Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*Fertility Rate*)	100.00		Pembinaan Keluarga Berencana	4,179,167,500.00	3.669.245.550,00	#VALUE!		
Misi IV Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan											
1	**Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing SDM**		**Tingkat Pengangguran Terbuka**								
	1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	100.00	100.00	Pelatihan kerja dan produktivitas angkatan kerja	592,642,700.00	572.076.715,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
Misi V Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Budaya, Rohani dan Agrowisata											
1	**Meningkatkan jumlah wisatawan**		**Jumlah wisatawan**								
	1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	99.38	99.38	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	2,050,026,377.00	1.811.437.907,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
						Pemasaran pariwisata	665,037,575.00	651.175.201,00	#VALUE!		
						Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	441,475,356.00	427.415.856,00	#VALUE!		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2024				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi VI Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup											
1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah**		**Indeks Infrastruktur Daerah**								
	1	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	84.16	84.16	Penyelenggaraan jalan	2,296,392,377.00	2.245.722.200,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
	2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	99.42	99.42	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3,087,241,631.00	3.053.329.183,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
						Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	702,823,300.00	691.169.850,00	#VALUE!		
						Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	7,132,397,600.00	7.127.924.430,00	#VALUE!		
						Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	3,087,123,810.00	2.903.958.080,00	#VALUE!		
						Pengembangan perumahan	87,033,400.00	85.759.500,00	#VALUE!		
						Kawasan permukiman	536,999,800.00	438.368.021,00	#VALUE!		
	3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	100.00	100.00	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	820,202,238.00	780.172.823,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
	4	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	100.00	100.00	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	541,965,121.00	476.961.498,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
2	**Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan**		**Ketaatan terhadap RTRW/RDTR**								
	1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	100.00	100.00	Penyelenggaraan penataan ruang	281,869,500.00	216.292.139,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
3	**Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang baik**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**								
	1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100.00	100.00	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	204,297,650.00	201.079.014,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
	2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Risiko Bencana (IRB)	97.03	97.03	Penanggulangan Bencana	847,094,770.00	823.229.260,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
Misi VII Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri											
1	**Meningkatnya kapasitas desa**		**Indeks Desa Membangun**								
	1	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	100.00	100.00	Peningkatan kerjasama desa	414,917,100.00	401.948.448,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Administrasi pemerintahan desa	1,772,923,800.00	1.750.230.470,00	#VALUE!		
						Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	710,512,309.00	700.774.838,00	#VALUE!		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2024				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi VIII	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem E-Government**										
1	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**		**Indeks Reformasi Birokrasi**								
	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	90.19	90.19	Penyelenggaraan pengawasan	1,891,130,000.00	1.772.280.000,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
						Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	380,000,000.00	379.920.700,00	#VALUE!		
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	670,154,799,176.00	603,666,035,914.00	90.08		
						Perekonomian dan pembangunan	1,716,828,000.00	1,701,660,683.00	99.12		
						Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	9,172,918,500.00	8.957.383.703,00	#VALUE!		
						Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	13,330,112,700.00	13.154.871.557,00	#VALUE!		
	2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100.00	100.00	Pengelolaan keuangan daerah	6,178,415,575.00	5.915.484.045,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pengelolaan barang milik daerah	777,360,300.00	525.956.527,00	#VALUE!		
	3	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	100.00	100.00	Pengelolaan pendapatan daerah	1,021,134,100.00	997.714.352,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
	4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	86.00	86.00	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1,744,512,900.00	1.721.492.658,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pengelolaan aplikasi informatika	475,995,500.00	469.694.503,00	#VALUE!		
						Perlindungan dan jaminan sosial	426,999,900.00	405.526.621,00	#VALUE!		
						Rehabilitasi sosial	290,473,500.00	285.567.025,00	#VALUE!		
						Penanganan bencana	314,999,800.00	304.356.800,00	#VALUE!		
						Pendaftaran penduduk	570,982,000.00	563.291.178,00	#VALUE!		
						Pencatatan sipil	35,426,000.00	30.602.600,00	#VALUE!		
						Pengelolaan arsip	60,000,000.00	52.878.500,00	#VALUE!		
	6	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	100.00	100.00	Kepegawaian daerah	1,696,188,300.00	1.652.125.521,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Pengembangan SDM	611,902,000.00	610.001.716,00	#VALUE!		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2024				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	**Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman**		**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**								
	1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	100.00	100.00	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	917,372,900.00	909.914.750,00	#VALUE!	#VALUE!	Efisien
						Peningkatan peran partai dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya publik	22,661,833,663.00	871.239.063,00	#VALUE!		
						Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	31,539,200.00	31.054.350,00	#VALUE!		
						Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	465,303,500.00	458.804.100,00	#VALUE!		
			Persentase penurunan gangguan trantibum	100.00		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2,490,672,750.00	2.486.819.025,00	#VALUE!		
						Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	359,849,900.00	358.786.400,00	#VALUE!		
	Rata-rata capaian kinerja sasaran				**94.61**	**Rata-rata capaian kinerja anggaran**				**######**	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya konstribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya konstribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara dengan uraian sebagai berikut :

3.1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

3.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional)

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP. DIPA-125.01.3.690705/2024 TA. 2024

2. Gambaran Umum

1) Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara, Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kab. Tapanuli Utara, Penguatan cadangan pangan Nasional dan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

Program Dekonsentrasi merupakan salah satu Instrumen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan di daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat), Program ini bertujuan mempercepat Pencapaian target Pembangunan Nasional dan Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan dari Dana Dekonsentrasi Pemerintah Pusat di Kabupaten Tapanuli Utara antara lain penyusunan Prognosa Neraca Pangan. Prognosa Neraca Pangan wilayah merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan yang mencerminkan surplus dan defisit pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Komoditas pangan stratgis yang dipantau dalam neraca pangan adalah beras, jagung, kedelai, cabai rawit, ccabai besar, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam gula pasir dan minyak goreng. Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah salah satu langkah Pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi harga pangan di daerah. Pelaksanaan kegiatan SPHP di Kabupaten melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melalui kerjasama Pemerintah dengan BULOG dan produsen pangan yang

berupaya menekan harga pangan dasar seperti beras, minyak goreng, gula dan telor ayam ras. Kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi Geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan Pangan dan Gizi sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam program penyusunan, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi ditingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam Undang-undang No. 18/2012 tentang pangan dan PP No. 17/2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dimana pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan system informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. FSVA disusun berdasarkan 3 aspek ketahanan Pangan yaitu ketersediaan, Keterjangkauan/akses, dan Pemanfaatan Pangan yang mencakup 6 indikator yang digunakan dalam FSVA sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan Pangan.

2) Bidang urusan yang ditugas pembantuan : Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.
3) Jumlah Kegiatan : 4 (empat) kegiatan
4) Anggaran Tugas Pembantuan : Rp. 84.120.000.-

3.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1) Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Keterlambatan data yang diberikan Perangkat Daerah yang menyebabkan Pengumpulan data menjadi lama dan penyusunan laporan menjadi terkendala.
- Data yang tersedia di Perangkat Daerah kurang lengkap sehingga pembuatan laporan menjadi terkendala.

2) Upaya Penyelesaian

Meminta langsung ke Perangkat Daerah terkait agar data dibutuhkan, dan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1.	Badan Pangan Nasional	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor : 125.01.3.6907 05/2024 Tahun Anggaran 2024	Program : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	84.120.000	83.327.000	99	100	100
			1. Kegiatan : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Output : Laporan Neraca Pangan Wilayah Rincian Kegiatan : Menyusun laporan Neraca Pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	12.260.000	11.545.000	94	100	100
			2. Kegiatan : Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	38.700.000	38.698.000	99	100	100

No	Pemerintah Pusat/ provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
			Output : Laporan harga pangan pokok Rincian Kegiatan : Menyusun laporan pangan Pokok di Kabupaten Tapanuli Utara							
			3. Kegiatan : Penguatan cadangan pangan Nasional Output : Laporan cadangan pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	9.660.000	9.600.000	94	100	100
			4. Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Output : Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	23.500.000	23.484.000	99	99	100

No	Pemerintah Pusat/ provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
			Rincian kegiatan: Menyusun Peta FSVA Kab. Tapanuli Utara							
	Jumlah.....					**84.120.000**	**83.327.000**	**99**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

3.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara

3.2.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

1. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
4) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

2 Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa;
2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;
3) Membantu Pemerintah Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa apabila ada kendala/kesulitan;
4) Memfasiltasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
5) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola Dana Desa dan melaporkan hasil pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati Tapanuli Utara.

3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.1 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan yaitu penyampaian laporan/dokumen dari desa tidak tepat waktu, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dari Pemerintah Pusat.

3.2 Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan supaya Desa dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan/dokumen yang diperlukan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Pusat	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023	Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	199.823.835.000	199.129.952.200	99,65	241 Desa	100

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
		tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. 4. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2024.								

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

3.2.2 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

1. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap desa, menyusun dan membuat pedoman umum pelaksanaan ADD kabupaten;
2) Melaksanaan sosialisasi tentang ADD;
3) Membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk, memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana ADD di tingkat desa;
4) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim pendamping tingkat kecamatan;
5) Membantu pemerintahan desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;
6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
7) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati Tapanuli Utara.

3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.1 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan yaitu Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

3.2 Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Kecamatan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat dan Pemerintah Desa.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Kabupaten	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.	Alokasi Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	73.165.743.100	58.816.076.618	80,38	241 Desa	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PENERAPAN SPM

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

1. Pengumpulan data

Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia meliputi :

a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan

b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, dokumen RKPD, dokumen Renstra PD, dan dokumen Renja PD.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPM di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Tapanuli utara sebagaimana formulir 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang dituangkan dalam buku laporan penerapan SPM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

B. PENCAPAIAN SPM

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)
2	Pendidikan Dasar
3	Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	11.349
2	Pendidikan Dasar	63.426
3	Pendidikan Kesetaraan	30

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	11.349	7.997	70,46
2	Pendidikan Dasar	63.426	60.416	89,37
3	Pendidikan Kesetaraan	30	30	100

4.1.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	7.015.904.525
2	Pendidikan Dasar	79.303.006.948
3	Pendidikan Kesetaraan	693.680.000

4.1.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara ada sebanyak 75 Orang

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Aggaran yang bersumber DAU untk melaksanakan Kegiatan SPM terkai Peningkatan Mutu Guru Seperti Guru-guru PAUD yang masih didominasi yang belum S1	Belum Ada solusi yang dilaksanakan karena keterbatasan dengan anggaran

4.1.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			**87.012.591.473**	**86.191.743.142**	**99,06%**
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**47.256.637.948**	**47.029.104.428**	**99,52%**
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	503.986.000	492.130.000	97,65%
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	422.860.000	422.860.000	100%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	285.970.000	285.970.000	100%
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	79.570.000	78.420.000	98,55%
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	842.773.000	801.800.000	95,14%
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.686.981.248	1.580.400.000	93,68%
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	149.999.900	138.190.900	92,13%
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	39.174.013.800	39.174.013.800	100,00%
9	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.000.050.000	990.194.000	99,01%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	97.363.000	97.363.000	100%
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.013.071.000	2.967.762.728	98,50%
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**32.046.369.000**	**32.031.934.650**	**99,95%**
12	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	186.540.000	186.540.000	100%
13	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	532.311.000	527.633.000	99,12%
14	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1.287.993.000	1.285.410.000	99,80%
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2.689.666.000	2.684.580.650	99,81%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	180.000.000	180.000.000	100%
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	719.895.000	719.895.000	100%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	192.834.000	192.834.000	100%
19	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	100.000.000	98.670.000	98,67%
20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Paket	171.315.000	171.059.000	99,85%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	Siswa				
21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	25.412.840.000	25.412.840.000	100%
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	173.245.000	173.245.000	100%
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	49.730.000	49.730.000	100%
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	200.000.000	199.498.000	99,75%
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	150.000.000	150.000.000	100%
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**7.015.904.525**	**6.468.824.564**	**92,20%**
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.853.950.000	1.630.800.000	87,96%
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	189.999.800	145.565.264	76,61%
28	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	4.921.954.925	4.643.754.400	94.35%
29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	49.999.800	48.704.900	97,41%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**693.680.000**	**661.879.500**	**95,42%**
30	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	693.680.000	661.879.500	95,42%

4.1.7 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			85,73%
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**					**67,80%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**(80%)**	**56,37%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11.349	7.997	**3.352**	**70,46%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**(20%)**	**11,43%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**57,15%**
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	76,92	23,08	76,92%
	2. Angka partisipasi murni	%	100	51,22	48,78	51,22%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	92	21	71	22,83%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat	%	41	31	10	75,61%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(D-IV)					
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	15	15	0	100%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	41	34	7	82,93%
	7. Indeks distribusi guru	%	41	34	**7**	**82,93%**
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	41	6	**35**	**14,63%**
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	41	3	**38**	**7,32%**
2.	**Pendidikan Dasar**					**89,37%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**(80%)**	**76,20%**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	63.426	60.416	**3.010**	**95,25%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**(20%)**	**13,17%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**65,85%**
	SD (2024)					**61,29%**
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100,61	**-0.6100**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99,11	**0.8900**	**99.11 %**
	3. Kemampuan literasi	Nilai	100	66,49	**33.5100**	**66.49 %**
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	100	59,88	40,12	59,88%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	100	54,81	45,19	54,81%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	45,52	54,48	45,52%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	71,97	28,03	71,97%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	71,17	26,83	73,17%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	54,66	45,34	54,66%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	3.466	2.516	950	72,59%
	11. Indeks distribusi guru	%	3.466	2.516	950	72,59%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	3.466	822	2.644	23,72%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	3.466	77	3.389	2,22%
	SMP (2024)					**70,41%**
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	107	**-7**	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99,4	**0.6**	99,40%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	100	69,76	**30,24**	69,76%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	100	65,08	34,92	65,08%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	100	65,68	34,32	65,68%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	59,74	40,26	59,74%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69,87	30,13	69,87%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	73,38	26,62	73,38%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	57,24	42,76	57,24%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	1.136	1.124	12	98,94%
	11. Indeks distribusi guru	%	1.136	1.124	12	98,94%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	1.136	587	549	51,67%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	1.136	64	1.072	5,63%
3.	**Pendidikan Kesetaraan**					**100%**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**(80%)**	**80,00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**(20%)**	**20%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100%

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.697
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.016
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.058
4	Pelayanan Kesehatan Balita	19.815
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	64.288
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	91.596
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	40.155

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.720
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.284
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	624
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4.827
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.961

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.697	4.369	108,79
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.016	3.775	94,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.058	3.791	93,42
4	Pelayanan Kesehatan Balita	19.815	18.624	93,99
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	64.288	63.472	98,73
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	91.596	111.082	121,27
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	40.155	39.787	99,08
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.720	10.712	99,93
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.284	2.284	100,00
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	624	734	117,63
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	4.827	4.827	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.961	6,617	95.06

4.2.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.610.711.600
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.826.875.400
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	568.303.400
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.808.495.800
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	228.660.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	129.262.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	171.141.200
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.086.844.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	562.256.534
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	418.615.950
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1.441.609.600
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	128.140.000

4.2.4 Dukungan Personil

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/Dokter Sp. Obstetri dan Ginekologi (75), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Farmasi (67), Tenaga Gizi (46)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter/Dokter Sp. Obstetri dan Ginekologi (75), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Farmasi (67), Tenaga Gizi (46)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter/dokter Sp. Anak (75), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Kefarmasian (67), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (22), Tenaga Gizi (46), Kader Kesehatan (2058)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter (72), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Gizi (46), Guru PAUD (709), Kader Kesehatan (2058)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter gigi (93), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Gizi (46), Tenaga Kefarmasian (67), Tenaga Kesehatan Masyarakat (70), Guru (520), Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor (2058)
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter (21), Bidan (252), Perawat (21), Tenaga Gizi (21), Tenaga Kesmas (21), Kader Kesehatan (1260)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter (72), Bidan (1010), Perawat (547), Tenaga Gizi (46), Tenaga Kesmas (53), Kader Kesehatan (2058)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter (49), Bidan (989), Perawat (334), Tenaga Gizi (35), Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku (18), Tenaga Kefarmasian (34), Tenaga Kesehatan Masyarakat (77)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter (49), Bidan (989), Perawat (334), Tenaga Kefarmasian (34), Tenaga Kesehatan Masyarakat (77), Tenaga Gizi (35), Analis Teknik Laboratorium Medik (14)
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter (1), Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (4), Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa (0), Tenaga profesional lainnya (0)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru (30), Perawat (28), Tenaga Kefarmasian (23), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Analis Teknik Laboratorium Medik (16),

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
		Radiografer (2), Kader Kesehatan (202)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin (27), Bidan (21), Perawat (23), Analis Teknik Laboratorium Medik (16), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Kader Kesehatan (202)

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan ANC guna memantau kondisi ibu hamil dan janin, mendeteksi komplikasi kehamilan sejak dini serta melakukan pemeriksaan secara mandiri masih rendah	Kunjungan Bidan Home care dan memberikan edukasi terkait manfaat dan tujuan ANC serta peran Bidan dalam pelaksanaan P4K yaitu : melakukan pendataan ibu hamil untuk mengetahui jumlah ibu haml dalam merencanakan persalinan yang aman.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kurangnya ketrampilan Petugas Kesehatan dalam pertolongan persalinan dalam penganan komplikasi persalinan serta kurangnya pengetahuan ibu bersalin terkait perawatan ibu hamil,persalinan dan pasca persalinan	Meningkatkan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan seperti on The Job Training kegawatdaruratan yang dilaksanakan di Rumah Sakit dan pendampingan Tim Ahli dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak bagi dokter,Bidan,Perawat dalam penanganan kelahiran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pendanaan yang ditampung untuk pemeriksaan skrining hipotyroid kogenital pada bayi baru lahir dengan sasaran pusdatin tahun 2024 sebanyak 6.129 bayi lahir sedangkan jumlah bayi lahir real di tahun 2024 : 3.791 bayi. Dan tidak keseluruhan bayi lahir tersebut di periksa SHK karena pelaksanaan dan pengadaan BMHP SHK dilaksanakan mulai dari Juli 2024.	Untuk pengadaan BMHP agar dipercepat sehingga pemeriksaan segera dilakukan ke seluruh bayi baru lahir. Pelatihan kepada Petugas kesehatan agar lebih paham pengambilan sampel SHK pada bayi baru lahir.
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rendahnya kunjungan ibu datang membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya	Melakukan kampanye cegah stunting kepada ibu balita agar rutin membawa balitanya ke posyandu
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Kurangnya pengetahuan pengelola UKS dalam pelaporan bulanan serta masih ada wilayah puskesmas yang sulit dijangkau oleh petugas, sehingga tidak semua siswa tercover mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Membuat pertemuan dengan Pengelola UKS puskesmas tentang pelaporan dan mengusulkan kepada puskesmas agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah mengikutsertakan bidan desa di wilayah kerja masing-masing

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat dan Diabetes Mellitus terbatas mengakibatkan kurangnya minat usia produktif datang ke Posbindu, masih kurang pahamnya petugas Posbindu untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi ASIK karena pergantian pengentrian Laporan dari SIPTM ke ASIK.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol, asam urat & Diabetes mellitus.
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kurangmya Keterampilan Pengetahuan Petugas Kesehatan Pengelola Lansia dalam memahami Perawaan Jangka Panjang Pada Usia Lanjut	Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Kesehatan Pengelola lansia dengan melaksanakan pembinaan teknis dan penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang Lansia

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat dan Diabetes Mellitus terbatas mengakibatkan kurangnya minat usia produktif datang ke Posbindu, masih kurang pahamnya petugas Posbindu untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi ASIK karena pergantian pengentrian Laporan dari SIPTM ke ASIK.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol, asam urat & Diabetes mellitus.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Petugas pengelola program Keswa Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, masih kurang pahamnya petugas Keswa Puskesmas untuk melakukan pengentrian laporan ke aplikasi SIMKEWA.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola ODGJ Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan dengan SIMKEWA.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Catridge TCM masih kurang, SDM Analis laboratorium masih kurang	Pengadaan Catridge TCM dan penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rapid 1 HIV skrining masih kurang, SDM Analis laboratorium masih kurang	Pengadaan Rapid 1 HIV skrining dan penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas

4.2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	**PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	948.635.000	948.371.000	99,97
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	211.213.500	199.558.500	94,48
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.687.480.000	1.671.785.000	99,07
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.520.000	42.170.000	99,18
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	632.785.100	609.063.850	96,25

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.078.000	88.078.000	100,00
2	**PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.389.966.000	1.385.806,000	99,70
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	224.790.000	103.491.000	46,04
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.119.400	198.091.800	93,39
3	**PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.810.400	62.810.400	100,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	398.385.000	45.934.000	11,53
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	107.108.000	57.963.295	54,12

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
4	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	39.210.000	39.210.000	100,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.230.631.000	1.228.976.000	99,87
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.460.490.800	3.454.470.200	99,83
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.164.000	72.774.000	93,10

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
5	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	228.660.000	228.425.000	99,90
6	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	129.262.000	124.075.000	95,99
7	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.080.000	7.080.000	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34.469.200	34.469.200	100,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	129.592.000	129.057.000	99,59
8	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.904.000	23.904.000	100,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.062.940.000	1.062.835.000	99,99
9	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	514.006.534	502.650.000	97,79
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.250.000	48.190.000	99,88
10	**PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000	143.271.490	95,51
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.200.000	21.100.000	99,53
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	40.258.000	38.848.000	96,50
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.157.950	194.171.500	93,73
11	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	879.429.600	871.072.000	99,05
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	398.500.000	398.245.000	99,94
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.680.000	144.841.000	88,49
12	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	95.190.000	94.275.000	99,04
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	32.950.000	30.090.000	91,32

4.2.7 Capaian Indiktor Kinerja/Jenis Layanan SPM :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**96,51%**
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				**90,90%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**74,41%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.697	4.369	328	93,02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16,48%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**81,25%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.697	4.369	328	93,02%
2	Tablet tambah darah **(180 tablet x jumlah ibu hamil)**	845.460	786.420	59.040	93,02%
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.697	4.369	328	93,02%
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.697	3.836	861	81,67%
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.697	3.836	861	81,67%
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	4.697	228	4.469	4,85%
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	4.697	3.836	861	81,67%
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	4.697	3.836	861	81,67%
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.697	1.606	3.091	34,19%
10	Media KIE	4.697	3.836	861	81,67%
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	313	291	22	92,97%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	75	75	0	100,00%
13	Tenaga kesehatan : Perawat	547	547	0	100,00%
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	1.010	1.010	0	100,00%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	67	67	0	100,00%
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	4.697	3.836	861	81,67%
	JUMLAH				
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				**93,47%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75.20%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.016	3.775	241	94,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,27%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**91,33%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Formulir partograf	4.016	3.775	241	94,00%
2	Kartu ibu (rekam medis)	4.016	3.775	241	94,00%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	4.016	1.606	2.410	39,99%
4	Media KIE	4.016	3.775	241	94,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	75	75	0	100,00%
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	1.010	1.010	0	100,00%
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	547	547	0	100,00%
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	67	67	0	100,00%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
	JUMLAH				
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				**93,29%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**74,74%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	4.058	3.791	267	93,42%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,55%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**92,76%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	4.058	3.791	267	93,42%
2	Vitamin K1 injeksi	4.058	3.791	267	93,42%
3	Salep/tetes mata antibiotik	4.058	3.791	267	93,42%
4	Formulir bayi baru lahir	4.058	3.791	267	93,42%
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	4.058	3.773	285	92,98%
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.058	1.606	2.452	39,58%
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	4.058	3.788	270	93,35%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	75	75	0	100,00%
9	Tenaga kesehatan : Bidan	1.010	1.010	0	100,00%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	547	547	0	100,00%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	67	67	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	22	22	0	100,00%
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
14	Kader Kesehatan	2.058	2.058	0	100,00%
	JUMLAH				
4.	**Pelayanan Kesehatan Balita**				93,44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75,19%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	19.815	18.624	1.191	93,99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,25%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**91.27%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	19.815	18.624	1.191	93,99%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	19.815	18.624	1.191	93,99%
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	19.815	18.624	1.191	93,99%
4	Vitamin A Biru	3.476	3.132	344	90,10%
5	Vitamin A Merah	29.410	29.410	0	100,00%
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	4.658	3.312	1.346	71,10%
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	18.632	14.515	4.117	77,90%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	9.316	8.826	490	94,74%
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	13.974	11.347	2.627	81,20%
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	5.505	5.505	0	100,00%
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	5.558	5.558	0	100,00%
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	5.650	5.650	0	100,00%
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	42.516	40.198	2.318	94,55%
14	Peralatan Anafilaktik	21	21	0	100,00%
15	Formula Terapi Gizi Buruk	52	13	39	25,00%
16	Tenaga medis : Dokter	72	72	0	100,00%
17	Tenaga kesehatan : Bidan	1.010	1.010	0	100,00%
18	Tenaga kesehatan : Perawat	547	547	0	100,00%
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
20	Guru PAUD	709	709	0	100,00%
21	Kader Kesehatan	2.058	2.058	0	100,00%
	JUMLAH				
5.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				**98,51%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78,98%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	64.288	63.472	816	98,73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,52%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**97,61%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	21	21	0	100,00%
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	21	21	0	100,00%
3	Kuesioner skrining kesehatan	64.288	63.472	816	98,73%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	64.288	63.472	816	98,73%
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	64.288	63.472	816	98,73%
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	23.147	16.478	6.669	71,19%
7	Alat Pemeriksaan Hb	21	21	0	100,00%
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	3.478	3.478	0	100,00%
9	Media promosi kesehatan	474	425	49	89,66%
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	24.130	24.130	0	100,00%
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	93	93	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Bidan	1.010	1.010	0	100,00%
13	Tenaga kesehatan : Perawat	547	547	0	100,00%
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	67	67	0	100,00%
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	70	70	0	100,00%
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	520	520	0	100,00%
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor	2.058	2.058	0	100,00%
	JUMLAH				
6.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				**98,76%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	91.596	111.082	-19.486	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18,76%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**93,82%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21	21	0	100,00%
2	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	21	21	0	100,00%
3	Alat : Tensimeter	252	252	0	100,00%
4	Alat : Glukometer	252	252	0	100,00%
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	21	21	0	100,00%
6	Alat : Tes strip gula darah	91.596	111.082	-19.486	121,27%
7	Alat : Lancet	91.596	111.082	-19.486	121,27%
8	Alat : Kapas alkohol	91.596	111.082	-19.486	121,27%
9	Alat : KIT IVA Tes	21	21	0	100,00%
10	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	21	21	0	100,00%
11	Kit Opthalmologi Komunitas	252	184	68	73,02%
12	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	21	21	0	100,00%
13	Alat Pelayanan KB	3.133	3.124	9	99,71%
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	30	30	0	100,00%
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	3.093	3.093	0	100,00%
	c. Vasectomi Set	10	1	9	10,00%
14	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	252	252	0	100,00%
15	Vaksin Tetanus Difteri (td)	62.152	6.166	55.986	9,92%
16	Tenaga medis : Dokter	21	21	0	100,00%
17	Tenaga kesehatan : Bidan	252	252	0	100,00%
18	Tenaga kesehatan : Perawat	21	21	0	100,00%
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	21	21	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
20	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100,00%
21	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1.260	1.260	0	100,00%
	JUMLAH				
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				99,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,27%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	40.155	39.787	368	99,08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,99%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**99,93%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	252	252	0	100,00%
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	21	21	0	100,00%
3	Alat pemeriksaan kolesterol	21	21	0	100,00%
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	40.155	39.787	368	99,08%
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	21	21	0	100,00%
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	21	21	0	100,00%
7	Media KIE	21	21	0	100,00%
8	Tenaga medis : Dokter	72	72	0	100,00%
9	Tenaga kesehatan : Bidan	1.010	1.010	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
10	Tenaga kesehatan : Perawat	547	547	0	100,00%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	46	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	0	100,00%
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2.058	2.058	0	100,00%
	JUMLAH				
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				**99,94%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,94%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10.720	10.712	8	99,93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252	252	0	100,00%
2	Obat Hipertensi	611.700	611.700	0	100,00%
3	Tensimeter	252	252	0	100,00%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	21	21	0	100,00%
5	Media promosi kesehatan	21	21	0	100,00%
6	Tenaga medis : Dokter	49	49	0	100,00%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	989	989	0	100,00%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	334	334	0	100,00%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	35	35	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	18	18	0	100,00%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	34	34	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	0	100,00%
	JUMLAH				
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	2.284	2.284	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Obat Diabetes Melitus	152.000	152.000	0	100,00%
2	Fotometer atau Glukometer	21	21	0	100,00%
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1.133.300	1.133.300	0	100,00%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	22	22	0	100,00%
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252	252	0	100,00%
6	Tenaga medis : Dokter	49	49	0	100,00%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	989	989	0	100,00%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	334	334	0	100,00%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	34	34	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	0	100,00%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	35	35	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	14	14	0	100,00%
	JUMLAH				
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**				**95,56%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	624	734	-110	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**15,56%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**77,78%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	21	21	0	100,00%
2	Penyediaan Psikofarmaka	53.026	53.026	0	100,00%
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	1	1	0	100,00%
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1	1	0	100,00%
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	0	100,00%
6	Tenaga kesehatan : Dokter	1	1	0	100,00%
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	29	29	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	21	0	21	0,00%
9	Tenaga profesional lainnya	21	0	21	0,00%
	JUMLAH				
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**				**99,68%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**80,00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.827	4.827	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19,68%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**98,41%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	300	300	0	100,00%
2	Reagen Zn TB	284	284	0	100,00%
3	Masker bedah dan Masker N95	19.000	19.000	0	100,00%
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	19.000	19.000	0	100,00%
5	Katrid tes cepat molekuler	4.827	4.827	0	100,00%
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	21	21	0	100,00%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21	21	0	100,00%
8	Tuberkulin	700	700	0	100,00%
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	30	30	0	100,00%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	28	28	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	23	23	0	100,00%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100,00%
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	21	16	5	76,19%
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	2	2	0	100,00%
15	Kader Kesehatan	202	202	0	100,00%
	JUMLAH				
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				**95,27%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76,05%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	6.961	6.617	344	95,06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,23%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**96,14%**
		-1	**-2**	**-3**	
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	300	300	0	100,00%
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	6.961	6.617	344	95,06%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	6.961	6.617	344	95,06%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	6.961	6.617	344	95,06%
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27	27	0	100,00%
6	Tenaga kesehatan : Bidan	21	21	0	100,00%
7	Tenaga kesehatan : Perawat	23	23	0	100,00%
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	21	16	5	76,19%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	21	21	0	100,00%
10	Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	202	202	0	100,00%

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	318.424
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	318.424

2. Realisasi pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	318.424	273.328	85,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	318.424	297.135	93,31

4.3.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	15.385.517.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	8.062.400.000

4.3.4 Dukungan Personil

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Fungsional tertentu (1 Orang), Fungsional Umum (2 Orang)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Fungsional tertentu (1 Orang), Fungsional Umum (2 Orang)

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.
		Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
		Sulitnya masyarakat dalam menyerahkan lahan ataupun Lokasi pembangunan dalam penerapan SPM	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.
		Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.
		Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
		Sulitnya masyarakat dalam menyerahkan lahan ataupun Lokasi pembangunan dalam penerapan SPM	-

4.3.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**15.385.517.000**	**15.041.397.927**	**97,76**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**15.385.517.000**	**15.041.397.927**	**97,76**
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10.335.517.000	10.121.099.497	97,93
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	5.050.000.000	4.920.298.430	97,43
2	**PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**8.062.400.000**	**8.061.082.128**	**99,98**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	**8.062.400.000**	**8.061.082.128**	**99,98**
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.912.400.000	7.911.219.500	99,99
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	150.000.000	149.862.628	99,91

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SERAPAN (%)
			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			

4.3.7 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*			*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS MADYA**			**88,83%**
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				84,79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**(80%)**	**68,67%**
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	318.424	273.328	45.096	85,84%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**16,12%**
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	JARINGAN PERPIPAAN				

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*			*4*
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	67.666	786.420	14.708	78,28%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	67.666	50.163	17.503	74,13%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	9.552	8.597	955	90,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM	9.552	7.642	1.910	80,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*			*4*
	bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau				
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				**92,87%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**(80%)**	**74,65%**
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	318.424	297.135	21.289	93,31%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**18,22%**
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	91,33%
		1	**2**	**3**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				**91,10%**
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	79.606	74.285	5.321	93,32%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*			*4*
	bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	31.842	25.473	6.369	80,00%

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100

4.4.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0

4.4.4 Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara urusan Perumahan Rakyat sebanyak 6 orang dengan uraian :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 1 orang
- Jabatan fungsional : 1 orang
- Jabatan pelaksana : 1 orang

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) serta peralatan penunjang yang memadai pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Penambahan personil atau menambah jumlah staf yang memiliki kemampuan teknis pada OPD pengampu SPM.
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Minimnya dana yang tersedia pada Dinas pengampu SPM dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM	Dibutuhkan penambahan dana pada bidang yang menangani Program penyelenggaraan penerapan SPM.
		Sulitnya medan yang harus di tempuh ke daerah terpencil untuk melakukan pendataan	Peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam memberikan data kepada OPD pengampu SPM terkait kondisi serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.

4.4.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persen**	**0**	**0**	**0%**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Kegiatan**	**0**	**0**	**0%**
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	8. Pendataan dan Verifikasi Calon	Dokumen	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**0**	**0**	**0%**
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi	Rumah Tangga	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				
	9. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

Untuk Tahun 2024 pemenuhan pelayanan dasar SPM untuk urusan perumahan rakyat tidak dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan rasionalisasi anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1 Tarutung 22411 Provinsi Sumatera Utara
Telepon (0633) 20719 Faximile (0633) 21440
Post-el sekda@taputkab.go.id; Laman http://www.taputkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 900.1 / 0820 / 1-4.2 / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. Drs. Indra Sahat Hottua Simaremare, M.Si
Pangkat	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP	:	19720330 199203 1003
Jabatan	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan ini menerangkan, bahwa:

1. Sampai dengan akhir Triwulan I (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2024 tidak terjadi bencana alam besar yang mengakibatkan korban atau kerusakan yang luar biasa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat akibat Rasionalisasi APBD Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Surat pernyataan dapat berubah apabila di kemudian hari terjadi perubahan APBD Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19720330 199203 1003

Tembusan:
1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

4.4.7 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*			*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100%**
1.	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			**(100%)**	**100%**
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**(100%)**	**100%**

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 SUB URUSAN TRANTIBUM

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56	56	100

4.5.1.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.775.443.150

4.5.1.4 Dukungan Personil

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	29	0	128	0	0
2	Penegakan Perda/Perkada	29	0	128	0	0

4.5.1.5 Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Anggaran yang bersumber untuk melaksanakan Kegiatan SPM	Belum Ada solusi yang dilaksanakan karena keterbatasan dengan anggaran

4.5.1.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			**6.775.443.150**	**6.775.443.150**	**100%**
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**6.500.119.150**	**6.500.119.150**	**100%**
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	6.500.119.150	6.500.119.150	100%
2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**275.324.000**	**275.324.000**	**100%**
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	60.000.000	60.000.000	100%
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	50.000.000	50.000.000	100%
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	165.324.000	165.324.000	100%

4.5.2.1.1 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						**91,15%**
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					91,15%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	56	56	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	11,15%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**55,73%**
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	64	64	42	34,38%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	6	6	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan	Orang	0	0	0	0%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100%

4.5.2 SUB URUSAN KEBENCANAAN

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	323.652 Orang
2	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	849 Orang
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	538 Orang
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Posko (PUSDALOPS)

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
2	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			

4.5.2.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0
2	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	143.692.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	22.400.000

4.5.2.4 Dukungan Personil

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	Program Penanggulangan Bencana	28 ASN dan PPPK, 10 Orang Satgas, 1 Driver dan 1 PHL (4 Orang S2, 20 Orang S1, 2 Orang D3, Dan 14 Orang SMA/SMK

4.5.2.5 Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1	**PENGUMPULAN DATA**
	• Pengumpulan data yang terlalu rinci dengan menyebutkan *by name by adress* sangat menyulitkan BPBD sebagai pengampu data SPM
2	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**
	• Penghitungan kebutuhan masih dirumuskan di BNPB atau nasional, kemungkinan penghitungan kebutuhan dapat dilaksanakan
3	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**
	• KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Penanggulanagan bencana tahun ini tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran
4	**PELAKSANAAN**
	• Banyak kegiatan SPM tidak dapat dilaksanakan karena pemkab taput sedang refocusing anggaran
5	**LAIN - LAIN**
	DATA KOSONG

4.5.2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	PAGU
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**241.092.000**	**233.805.050**	**96,98%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**0**	**0**	**0%**
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0%**
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**75.000.000**	**73.272.300**	**97,70%**
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	PAGU
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	75.000.000	73.272.300	97,70%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	PAGU
			Kabupaten/Kota				
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**75.000.000**	**73.272.300**	**97,70%**
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**143.692.000**	**138.538.200**	**96,41%**
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	82.000.000	80.217.200	97,83%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	4.000.000	629	15,73%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	PAGU
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	57.692.000	57.692.000	100,00%
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**143.692.000**	**138.538.200**	**96,41%**
	4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**22.400.000**	**21.994.550**	**98,19%**
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	20.000.000	19.815.150	99,08%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	2.400.000	2.179.400	90,81%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Orang	0	0	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	PAGU
			Bencana Kabupaten/Kota				
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**22.400.000**	**21.994.550**	**98,19%**
	JUMLAH PROGRAM				**241.092.000**	**233.805.050**	**96,98%**

4.5.2.7 Capaian Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					**96,02%**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					**95,60%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80,00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**323.652**	**323.652**	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**15,60%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**78,01%**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana **(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)**	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan	Orang	323.652	323.652	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*
	terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`					
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana **(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)**	Orang	849	849	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	756	91	665	12,04%
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**					**92,46%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80,00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**323.652**	**323.652**	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**12,46%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**62,28%**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana **(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)**	Unit	57	52	5	91,23%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) **(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)**	Orang	4.500	1.500	3.000	33,33%
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80,00%**
			Jumlah Total	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	
			Yang Harus Dilayani	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS	**Orang**	**538**	**538**	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*
	DILAYANI :					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20,00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100,00%**
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana **(terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)**	Posko	1	1	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana **(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)**	Orang	538	538	0	100,00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana **(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)**	Dokumen	120	120	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas **(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)**	Layanan	0	0	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	0	100,00%

4.5.3 SUB URUSAN KEBAKARAN

4.5.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

4.5.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	120

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	120	120	100

4.5.3.3 Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	210.000.000

4.5.3.4 Dukungan Personil

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PETUGAS				
		PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	5	Kabid Damkar dan Linmas	54	-	0
			Kaseksi Pencegahan Damkar			
			Analis Kebakaran			
			Pranata Pemadam Kebakaran			
			Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran			

4.5.3.5 Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Anggaran yang bersumber untuk melaksanakan Kegiatan SPM	Belum Ada solusi yang dilaksanakan karena keterbatasan dengan anggaran

4.5.3.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			**210.000.000**	**210.000.000**	**100%**
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**210.000.000**	**210.000.000**	**100%**
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	210.000.000	210.000.000	100%

4.5.3.7 Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						94,90%
1.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					**94,90%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**(80%)**	**80%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**120**	**120**	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**(20%)**	**14,90%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**74,51%**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi **(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)**	Layanan	31	31	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi **(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)**	Dokumen	4	4	0	100%
	1. Sarana prasarana pemadam kebakaran **(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)**	Unit	54	41	13	75,93%
	2. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia **(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)**	Orang	90	64	26	71,11%
	3. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(korban jiwa langsung)					
	4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran **(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)**	Layanan	0	0	0	100%

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target pencapaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	58
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	54
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	73
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	17
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150

2. Realisasi Capaian :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	58	58	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	54	54	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	73	73	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	17	8	47,06
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150	145	96,67

4.6.3 Alokasi Anggaran

NO		JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1		**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**	**140.771.000**
	1)	Penyediaan Permakanan	2.950.000
	2)	Penyediaan Sandang	24.410.000
	3)	Penyediaan Alat Bantu	37.810.000
	4)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.120.000
	5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	24.035.650
	6)	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	20.365.350
	7)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Infuk Kependudukan, Akta Lahir, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	0
	8)	Pemberian Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	2.940.000
	9)	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	0

NO		JENIS LAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)
	10)	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.200.000
	11)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.760.000
	12)	Pemberian Layanan Rujukan	16.180.000
2		**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**	**156.546.800**
	1)	Penyediaan Permakanan	62.946.800
	2)	Penyediaan Sandang	2.475.000
	3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.925.000
	4)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	65.200.000
	5)	Pelayanan Dukungan Psikososial	0

4.6.4 Dukungan Personil

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Bidang Rehabilitasi Sosial (1 orang Kepala Bidang, 2 orang analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, 1 orang Pekerja Sosial Ahli Pertama dan 1 orang Analis Layanan Umum)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Bidang Rehabilitasi Sosial (1 orang Kepala Bidang, 2 orang analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, 1 orang Pekerja Sosial Ahli Pertama dan 1 orang Analis Layanan Umum)
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Bidang Rehabilitasi Sosial (1 orang Kepala Bidang, 2 orang analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, 1 orang Pekerja Sosial Ahli Pertama dan 1 orang Analis Layanan Umum)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Bidang Rehabilitasi Sosial (1 orang Kepala Bidang, 2 orang analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, 1 orang Pekerja Sosial Ahli Pertama dan 1 orang Analis Layanan Umum)

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH SDM TERSEDIA
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 orang Kepala Bidang, 1 orang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, 1 orang Analis Dampak Sosial serta dibantu 17 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA))

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Tidak adanya pendataan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Tidak adanya pendataan kepada Anak Telantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Tidak adanya pendataan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Tidak adanya pendataan kepada Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dan kurangnya anggaran untuk penanganan dan pendataan	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyampaian Laporan Bencana Alam dan Sosial tidak disertai dengan Data yang lengkap dan terperinci	Pelatihan kepada Pegawai / SDM Dinsos dan Anggaran SPM dapat di Prioritaskan

4.6.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	%
Dinas Sosial				297.317.800	252.118.070	84,80
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			140.771.000	97.385.770	
	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			140.771.000	97.385.770	69,18
	1	Penyediaan Permakanan	Orang	2.950.000	2.940.000	99,66
	2	Penyediaan Sandang	Orang	24.410.000	3.000.000	12,29
	3	Penyediaan Alat Bantu	Orang	37.810.000	30.210.000	79,90
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	3.120.000	1.400.000	44,87
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Orang	24.035.650	20.118.900	83,70

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	%
		Spiritual Dan Sosial				
	6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Orang	20.365.350	19.795.500	97,20
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Infuk Kependudukan, Akta Lahir, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
	8	Pemberian Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	2.940.000	2.360.000	80,27
	9	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	0	0	0
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	4.200.000	380.000	9,05
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	4.760.000	2.830.000	59,45
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen	16.180.000	14.351.370	88,70
2	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			156.546.800	154.732.300	98,84
	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			156.546.800	154.732.300	98,84
	1	Penyediaan Permakanan	Orang	62.946.800	61.132.300	97,12
	2	Penyediaan Sandang	Orang	2.475.000	2.475.000	100,00
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	25.925.000	25.925.000	100,00
	4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	65.200.000	65.200.000	100,00
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	0	0	0

4.6.7 Capaian Kinerja/Jenis Layanan SPM :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS MADYA**			**86,25%**
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					95,64%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	58	58	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15,64%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	78,21%
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	58	58	**0**	**100,00%**
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	4	4	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	1	**1**	**50,00%**
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6	1	**5**	**16,67%**
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	7	7	**0**	**100,00%**
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	0	**3**	**0,00%**
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	18	18	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	12	12	**0**	**100,00%**
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	**0**	**100,00%**
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	**0**	**100,00%**
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	**0**	**100,00%**
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	1	**1**	**50,00%**
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					94,61%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	54	54	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14,61%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	73,06%
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	54	54	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	**0**	**100,00%**
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	4	2	**2**	**50,00%**
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6	4	**2**	**66,67%**
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	0	**2**	**0,00%**
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	12	**8**	**60,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	12	12	**0**	**100,00%**
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	**0**	**100,00%**
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	6	6	**0**	**100,00%**
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	0	**1**	**0,00%**
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	4	**-3**	**100,00%**
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					92,41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	73	73	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**12,41%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	62,05%
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	73	73	**0**	**100,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	2	2	**0**	**100,00%**
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	5	7	**-2**	**100,00%**
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6	4	**2**	**66,67%**
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	8	8	**0**	**100,00%**
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	0	**3**	**0,00%**
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	18	**2**	**90,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	19	19	**0**	**100,00%**
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	0	**1**	**0,00%**
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	**0**	**100,00%**
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	0	**2**	**0,00%**
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	1	**1**	**50,00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	0	**1**	**0,00%**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					51,76%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**37,65%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17	8	**9**	**47,06%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14,12%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	70,59%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	17	8	9	47,06%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100%
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2	2	0	100%
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	1	1	50,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	0	2	0%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	2	3	-1	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2	2	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	0	1	0%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	1	1	50,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	3	-2	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100%
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	3	-2	100%
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					96,84%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77,33%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	145	**5**	**96,67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,51%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	97,54%
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	145	145	0	100%
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	57	50	7	87,72%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	57	57	0	100%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	1	1	0	100%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	150	150	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dan disesuaikan dengan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah Atasan serta kebutuhan dan harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berbagai faktor lain. Namun kami akan tetap berusaha dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada masa yang akan datang.

Kami berharap Pemerintah Atasan dapat memberikan evaluasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperbaiki penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian penyampaian penyampaian LPPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Sisingamangaraja No. 100 TARUTUNG 22411 Provinsi Sumatera Utara
Telp. (0633) 21580 Faksimile (0633) 21580
Post-el : inspektur @taputkab.go.Id, laman : http: //www.taput kab. go. id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2024 Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tarutung, 26 Maret 2025

Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904221989031003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Sisingamangaraja No. 100 TARUTUNG 22411 Provinsi Sumatera Utara
Telp.(0633) 21580 Faximile (0633) 21580
Post-el : inspektur @taputkab.go.Id, laman : http: //www.taput kab. go. id

Tarutung, 27 Maret 2025

Nomor : 700/0572/6-1.1/III /2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Yth. Bupati Tapanuli Utara
u.p. Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

di -

Tarutung

Berdasarkan surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 100.1.7/0691/TAPEM-KS/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 Hal Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada surat.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan seperlunya.

Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904221989031003

Tembusan :
Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung 22411
SUMATERA UTARA Telp. (0633) 21580
Website : http : //www.taput kab. go. id ; E – mail : inspektorat @ taputkab. go. Id

Tarutung, 27 Maret 2025

Nomor : 700/0574/6-1/6-1.1./III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Kepada :
Yth, Bupati Tapanuli Utara
u.p Sekretaris Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

Di -
Tarutung

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 079 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Penugasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 700.1.7/0691/TAPEM-KS.III/2025 Perihal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
e. Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 079 Tahun 2025 untuk Melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian kinerja Makro

a) Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia Tapanuli Utara sebesar 77,48% pada Tahun 2024 mengalami Peningkatan sebesar 0,62% dari tahun 2023 dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,86%.

b) Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024 bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang berada dibawah kemiskinan sebesar 8,21%.

c) Angka Pengangguran

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (open unemployment) mengalami kenaikan 0,18/% dari tahun 20203 sehingga menjadi sebanyak 1,21%.

d) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 sebesar 4,77%, terjadi peningkatan jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 sebesar 4,75%.

e) Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk ini didasarkan pada kurva negara yaitu sebuah kurva pengeluaran komulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) degan distribusi uniform yang mewakili persentase komulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada.

Patokan Nilai Koefisien Gini Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan 0,5 Tingkat ketimpangan rendah Tingkat ketimpangan sedang Tingkat ketimpangan tinggi Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (*decille*). Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 sebesar 0,2620 yang artinya Koefisien Gini di Kabupaten Tapanuli Utara masih cenderung mendekati Angka 0 (nol) sehingga distribusi pendapatan masih agak merata.

Ketimpangan Pendapatan Penduduk Tahun 2024 yang diukur dengan Gini Ratio mengalami penurunan sebesar Rp0,020 dibanding Tahun 2023 yaitu 0,262 menjadi 0,242 Tahun 2024 artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 relatif lebih merata dibandingkan dengan tahun 2023.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil
1.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,02%	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	97%	Dinas Pendidikan
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	94,65%	Dinas Pendidikan
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	-	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.08	Dinas Kesehatan
		2. Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan
		3. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,02%	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94%	Dinas Kesehatan
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93%	Dinas Kesehatan
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92%	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99%	Dinas Kesehatan
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	121%	Dinas Kesehatan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99%	Dinas Kesehatan
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	118%	Dinas Kesehatan
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95%	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0977	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	62.75%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		6. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	47.26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		7. Rasio tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Perumahan	1. Hunian untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		2. Fasilitasi hunian Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		3. Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,61%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,	0%	Dinas Perumahan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan Utilitas Umum)		Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	155 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	155 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	538	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	11,4 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja
6	**Sosial**	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas Sosial
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial
7	**Tenaga Kerja**	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	16,39%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	10.76	Dinas Ketenagakerjaan
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	360%	Dinas Ketenagakerjaan
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	Dinas Ketenagakerjaan
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam kabupaten/kota	63,90%	Dinas Ketenagakerjaan
8	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1.428%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	10,0735676%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,5384804%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		6. Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	81,53	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	22%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan Hidup
12	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	1. Perekaman KTP elektronik	100%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		2. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1(stu) hari yang memiliki KIA	52,63%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		3. Kepemilikan akta kelahiran	98.01%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		4. Jumlah Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	80%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
13	**Pemberdayaan Masyarakat Dan**	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	43%	Dinas Pemberdayaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Desa			Masyarakat dan Desa
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	9,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	283	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	100	Dinas Pengendalian Penduduk,

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	1. Rasio Konektivitas Kabupaten /kota	13.96	Dinas Perhubungan
		2. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,01	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	**Komunikasi Dan Informatika**	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	4,55%	Dinas komunikasi dan informatika
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	67%	Dinas komunikasi dan informatika
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	100	Dinas komunikasi dan informatika
17	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	156%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	163%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	**Penanaman Modal**	1. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten/kota	-52,900623%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	3.84%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,64%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	5 Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		2. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Persandian	1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	87%	Dinas Pendidikan
23	Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,96	Dinas Perpustakaan
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,11	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	Kearsipan	1. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	63,51%	Dinas Perpustakaan
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0%	Dinas Perpustakaan

2.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	98,88%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	31,91	Dinas Pariwisata
		2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke kabupaten/kota	6%	Dinas Pariwisata
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	0	Dinas Pariwisata
		4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	2,51%	Dinas Pariwisata
		5. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0.00147%	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	5.005 ton/ha	Dinas Pertanian
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakir Hewan Menular	2,4%	Dinas Pertanian
4.	Kehutanan	1. Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan Tahur	0	Dinas Lingkungan Hidup
5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko swalayan)	61,34969325%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	0,0156708%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian	1. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Kabupaten/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Rasio PAD	94,30%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,67	Inspektorat
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	71%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		6. Opini Laporan Keuangan	WTP 10 KALI	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	**Pengadaan**	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	84,88%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	**Kepegawaian**	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,83%	Badan Kepegawaian Daerah
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,35%	Badan Kepegawaian Daerah
		3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6.35%	Badan Kepegawaian Daerah
4	**Manajemen Keuangan**	1. Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	7%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		2. Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	66,05%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Assets Management	4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		4. Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,77%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	**Transparansi Dan Partisipasi Publik**	1. Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan *(Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)*	95,6%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		2. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah *(Public Access ti Fiscal Information)*	83%	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan SAKIP mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 memuat penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

MISI	PERDA NO 10/2021			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan	1	1	2	2
Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal	1	1	6	6
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	2	5
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan	1	1	2	3
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	3	3	7	7
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*	2	2	7	8
	12	**12**	**28**	**33**

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2024 terdiri dari 25 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	5,16
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,00
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	430,00
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.907,10
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,43
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,95
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	14,00
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,78
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,834
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	74,15
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*Fertility Rate*)	Tahun	2,87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29
11	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,50
12	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00
13	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,71
14	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25
15	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	66,00
16	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70,00
17	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	78,00
18	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	112,00
19	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	35,00
20	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01
21	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
22	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	3,00
23	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51
24	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40,00
25	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00

b. **Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dibuat skala pengukuran ordinal denganpemberian kriteria berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja lebih dari 100,00% maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % dengan kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00% didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	5,16	8,33	**38,57**	Sangat Rendah
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,00	89,80	**99,78**	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	430,00	354,07	**82,34**	Tinggi
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.907,10	3.122,22	**100,00**	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,43	2,18	**89,71**	Tinggi
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,95	16,29	**100,00**	Sangat Tinggi
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	14,00	14,29	**100,00**	Sangat Tinggi
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,31	**98,54**	Sangat Tinggi
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,78	13,74	**99,71**	Sangat Tinggi
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,834	1,033	**100,00**	Sangat Tinggi
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	74,15	74,36	**100,00**	Sangat Tinggi
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	2,87	2,85	**100,00**	Sangat Tinggi
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29	83,68	**100,00**	Sangat Tinggi
11	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,50	40,25	**99,38**	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
12	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00	68,17	**84,16**	Tinggi
13	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	87,15	**99,42**	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25	67,76	**100,00**	Sangat Tinggi
15	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	66,00	66,18	**100,00**	Sangat Tinggi
16	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70,00	70,00	**100,00**	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,00	81,53	**100,00**	Sangat Tinggi
18	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	112,00	115,33	**97,03**	Sangat Tinggi
19	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	35,00	41,00	**100,00**	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01	63,14	**90,19**	Tinggi
21	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	**100,00**	Sangat Tinggi
22	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	3,00	2,58	**86,00**	Tinggi
23	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,47	**98,86**	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
24	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40,00	77,60	**100,00**	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	**100,00**	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	5,00	**100,00**	Sangat Tinggi

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase desa/kelurahan rentan Pangan	Persen	9,52	8,73	**100,00**	5,16	8,33	**38,57**
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,00	89,10	**100,00**	90,00	89,80	**99,78**
Nilai investasi	Milliar Rupiah	175,00	1.076,401	**100,00**	430,00	354,07	**82,34**
PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.845,24	3.032,61	**100,00**	2.907,10	3.122,22	**100,00**
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,40	2,20	**91,67**	2,43	2,18	**89,71**
Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,85	15,81	**99,75**	15,95	16,29	**100,00**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase koperasi Berkualitas	Persen	9,00	13,39	**100,00**	14,00	14,29	**100,00**
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,24	10,09	**98,54**	10,28	10,31	**100,00**
Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,73	**99,64**	13,78	13,74	**99,71**
Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,46	0,81	**100,00**	0,834	1,033	**100,00**
Angka harapan hidup	Tahun	69,07	74,10	**100,00**	74,15	74,36	**100,00**
Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	3,60	2,87	**100,00**	2,87	2,85	**100,00**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,25	81,07	**98,57**	82,29	83,68	**100,00**
Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	39,00	38,97	**99,92**	40,50	40,25	**99,38**
Persentase jaringan jalan dalam kondisi Mantap	Persen	79,73	69,43	**87,08**	81,00	68,17	**84,16**
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumaha dan permukiman layak	Persen	86,71	86,60	**99,87**	87,66	87,15	**99,42**
Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	58,50	57,83	**98,85**	61,25	67,76	**100,00**
Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	62,00	63,56	**100,00**	66,00	66,18	**100,00**
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	40,00	20,00	**50,00**	70,00	70,00	**100,00**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,75	76,78	**100,00**	78,00	81,53	**100,00**
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	116,00	118,00	**98,28**	112,00	115,33	**97,03**
Jumlah desa naik status	Desa	26,00	52,00	**100,00**	35,00	41,00	**100,00**
Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,01	62,56	**89,36**	70,01	63,14	**90,19**
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	**100,00**	WTP	WTP*	**100,00**
Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,50	3,18	**100,00**	3,00	2,58	**86,00**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,43	**97,72**	3,51	3,47	**98,86**
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,00	60,30	**100,00**	40,00	77,60	**100,00**
Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	**100,00**
Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	5,00	**100,00**	5,00	5,00	**100,00**

3.I CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional)

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP. DIPA-125.01.3.690705/2024 TA. 2024

2. Gambaran Umum

1) Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara, Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kab. Tapanuli Utara, Penguatan cadangan pangan Nasional dan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

Program Dekonsentrasi merupakan salah satu Instrumen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan di daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat), Program ini bertujuan mempercepat Pencapaian target Pembangunan Nasional dan Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan dari Dana Dekonsentrasi Pemerintah Pusat di Kabupaten Tapanuli Utara antara lain penyusunan Prognosa Neraca Pangan. Prognosa Neraca Pangan wilayah merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan yang mencerminkan surplus dan defisit pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Komoditas pangan stratgis yang dipantau dalam neraca pangan adalah beras, jagung, kedelai, cabai rawit, ccabai besar, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam gula pasir dan minyak goreng. Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah salah satu langkah Pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi harga pangan di daerah. Pelaksanaan kegiatan SPHP di Kabupaten melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melalui kerjasama Pemerintah dengan BULOG dan produsen pangan yang berupaya menekan harga pangan dasar seperti beras, minyak goreng, gula dan telor ayam ras. Kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi Geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan Pangan dan Gizi sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam program penyusunan, kebijakan, serta pelaksanaan

intervensi ditingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam Undang-undang No. 18/2012 tentang pangan dan PP No. 17/2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dimana pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan system informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. FSVA disusun berdasarkan 3 aspek ketahanan Pangan yaitu ketersediaan, Keterjangkauan/akses, dan Pemanfaatan Pangan yang mencakup 6 indikator yang digunakan dalam FSVA sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan Pangan.

2) Bidang urusan yang ditugas pembantuan : Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.
3) Jumlah Kegiatan : 4 (empat) kegiatan
4) Anggaran Tugas Pembantuan : Rp. 84.120.000.-

3.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1) Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Keterlambatan data yang diberikan Perangkat Daerah yang menyebabkan Pengumpulan data menjadi lama dan penyusunan laporan menjadi terkendala.
- Data yang tersedia di Perangkat Daerah kurang lengkap sehingga pembuatan laporan menjadi terkendala.

2) Upaya Penyelesaian

Meminta langsung ke Perangkat Daerah terkait agar data dibutuhkan, dan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1.	Badan Pangan Nasional	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor : 125.01.3.690705/2024 Tahun Anggaran 2024	Program : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	84.120.000	83.327.000	99	100	100
			1. Kegiatan : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Output : Laporan Neraca Pangan Wilayah Rincian Kegiatan : Menyusun laporan Neraca Pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	12.260.000	11.545.000	94	100	100
			2. Kegiatan : Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	38.700.000	38.698.000	99	100	100

No	Pemerintah Pusat/Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
			Output : Laporan harga pangan pokok Rincian Kegiatan : Menyusun laporan pangan Pokok di Kabupaten Tapanuli Utara							
			3. Kegiatan : Penguatan cadangan pangan Nasional Output : Laporan cadangan pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	9.660.000	9.600.000	94	100	100
			4. Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Output : Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	23.500.000	23.484.000	99	99	100

No	Pemerintah Pusat/ provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
			Rincian kegiatan: Menyusun Peta FSVA Kab. Tapanuli Utara							
Jumlah.....						**84.120.000**	**83.327.000**	**99**	**100**	**100**

3.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

3.2.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

1. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
4) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

2 Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa;
2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;
3) Membantu Pemerintah Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa apabila ada kendala/kesulitan;
4) Memfasiltasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
5) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola Dana Desa dan melaporkan hasil pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati Tapanuli Utara.

3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.1 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan yaitu penyampaian laporan/dokumen dari desa tidak tepat waktu, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dari Pemerintah Pusat.

3.2 Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan supaya Desa dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan/dokumen yang diperlukan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Pusat	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.	Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	199.823.835.000	199.129.952.200	99,65	241 Desa	100

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
		2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.								

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
		4. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2024.								

3.2.2 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

1. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap desa, menyusun dan membuat pedoman umum pelaksanaan ADD kabupaten;
2) Melaksanaan sosialisasi tentang ADD;
3) Membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk, memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana ADD di tingkat desa;
4) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim pendamping tingkat kecamatan;
5) Membantu pemerintahan desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;
6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
7) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati Tapanuli Utara.

3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.1 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan yaitu Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

3.2 Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Kecamatan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat dan Pemerintah Desa.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Kabupaten	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.	Alokasi Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	73.165.743.100	58.816.076.618	80,38	241 Desa	100

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan bidang pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Pendidikan Dasar dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
3. Pendidikan Kesetaraan dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 13 (tigabelas) tahun ke atas.

4.1.1.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.1.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 12.758 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1.	Angka partisipasi sekolah	100%
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	281%
3.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	29%
4.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	15%
5.	Kecukupan formasi guru ASN	54%
6.	Indeks distribusi guru	54%
7.	Proporsi PTK bersertifikat	26%
8.	Proporsi PTK penggerak	26%
9.	Pengalaman pelatihan guru	26%

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 25.97% atau sebanyak 4.142 orang.

2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Angka partisipasi sekolah	92.29%
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	21%
mendapatkan minimal akreditasi B	
3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	26%
4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	15%
5. Kecukupan formasi guru ASN	29%
6. Indeks distribusi guru	29%
7. Proporsi PTK bersertifikat	6%
8. Proporsi PTK penggerak	0%
9. Pengalaman pelatihan guru mendapatkan minimal akreditasi B	3%

4.1.1.1.2 Pendidikan Dasar

Target Pencapaian

1. Penerima layanan dasar dengan target 65.067 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

2.1 Sekolah Dasar

1. Angka partisipasi kasar	100.75%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	100%
5. Kemampuan Numerasi	100%
6. Perbedaan Skor Literasi	3.71 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.89 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	100%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%
10. Kecukupan formasi guru ASN	3.466
11. Indeks distribusi guru	3.466
12. Proporsi PTK bersertifikat	2.143
13. Proporsi PTK penggerak	2.143
14. Pengalaman pelatihan guru	2.143

2.2 SMP

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	100%
5. Kemampuan Numerasi	100%
6. Perbedaan Skor Literasi	4.69 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.61 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	100%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%
10. Kecukupan formasi guru ASN	1.136
11. Indeks distribusi guru	1.136
12. Proporsi PTK bersertifikat	1.013
13. Proporsi PTK penggerak	1.013
14. Pengalaman pelatihan guru	1.013

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.78% atau sebanyak 60.009 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

2.1 Sekolah Dasar

1. Angka partisipasi kasar	100.75%
2. Angka partisipasi sekolah	99.29%
3. Angka Partisipasi Murni	89.47%
4. Kemampuan Literasi	53.81%
5. Kemampuan Numerasi	42.81%
6. Perbedaan Skor Literasi	3.71 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.89 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	66.73%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61.39%
10. Kecukupan formasi guru ASN	2.388
11. Indeks distribusi guru	2.388
12. Proporsi PTK bersertifikat	858
13. Proporsi PTK penggerak	40
14. Pengalaman pelatihan guru	1.028

2.2 SMP

1. Angka partisipasi kasar	107.69%
2. Angka partisipasi sekolah	99.36%
3. Angka Partisipasi Murni	99.36%
4. Kemampuan Literasi	59.69%
5. Kemampuan Numerasi	39.36%
6. Perbedaan Skor Literasi	4.69 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.61 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	66.16%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61.19%
10. Kecukupan formasi guru ASN	1.025
11. Indeks distribusi guru	1.025
12. Proporsi PTK bersertifikat	614
13. Proporsi PTK penggerak	54
14. Pengalaman pelatihan guru	715

4.1.1.1.3 Pendidikan

Kesetaraan Target

pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 132 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	0
5. Kemampuan Numerasi	0
6. Perbedaan Skor Literasi	0
7. Perbedaan Skor Numerasi	0
8. Indeks iklim keamanan	0
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0
10. Kecukupan formasi guru ASN	0
11. Indeks distribusi guru	100%
12. Proporsi PTK bersertifikat	0
13. Proporsi PTK penggerak	0
14. Pengalaman pelatihan guru	0

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 132 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	0
5. Kemampuan Numerasi	0
6. Perbedaan Skor Literasi	0
7. Perbedaan Skor Numerasi	0
8. Indeks iklim keamanan	0
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0
10. Kecukupan formasi guru ASN	0
11. Indeks distribusi guru	100%
12. Proporsi PTK bersertifikat	0
13. Proporsi PTK penggerak	0
14. Pengalaman pelatihan guru	0

Alokasi Anggaran,

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD sebesar Rp. 90.740.937.605,-

Dukungan Personil

Data personil Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 41 orang dengan uraian :

Eselon II : 1 orang
Eselon III : 5 orang Jabatan
fungsional : 7 orang Jabatan
pelaksana : 28 orang

Permasalahan

Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

4.2.1 Jenis Standar Pelayanan MInimal

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.889 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.889 Ampul
2.	Tablet tambah darah	4.889 Tablet
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.889 Paket
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.889 Paket
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.889 Paket
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.889 Paket

7. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.889 Paket
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.889 Buku
9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	61 Orang
10. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
11. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	4.889 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 76.27% atau sebanyak 4.661 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.661 Ampul
2. Tablet tambah darah	4.661 Tablet
3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.739 Paket
4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.739 Paket
5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.739 Paket
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	0 Paket
7. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.739 Paket
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.739 Buku
9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	61 Orang
10. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
11. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	4.661 Orang

4.2.3 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.317 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Formulir Partograf	4.317 Formulir
2. Kartu ibu (rekam medis)	4.317 Paket
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.204 Buku
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	61 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 77.91% atau sebanyak 4.204 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Formulir Partograf	4.204 Formulir
2. Kartu ibu (rekam medis)	4.204 Paket
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.204 Buku
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	61 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

4.2.4 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.330 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Vaksin Hepatitis B0	4.330 Vaksin
2. Vitamin K1 injeksi	4.330 Ampul
3. Salep/tetes mata antibiotik	4.330 Orang
4. Formulir bayi baru lahir	4.330 Formulir
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4.330 Orang
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.330 Buku
7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	60 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 78.23% atau sebanyak 4.234 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Vaksin Hepatitis B0	3.887 Vaksin
2. Vitamin K1 injeksi	4.234 Ampul
3. Salep/tetes mata antibiotik	4.234 Orang
4. Formulir bayi baru lahir	4.234 Formulir
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4.121 Orang
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.234 Buku
7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	60 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

4.2.5 Pelayanan Kesehatan Balita Target

Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 19.419 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	19.419 Dokumen
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	19.419 Formulir
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	4.317 Buku
4. Vitamin A Biru	1.611 Kapsul
5. Vitamin A Merah	15.541 Kapsul
6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	4.330 Vaksin
7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	5.994 Vaksin
8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	5.994 Orang
9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	5.994 Vaksin
10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	5.994 Vaksin
11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	5.994 Vaksin
12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	5.994 Vaksin

13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	6.035 Vaksin
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	6.035 Vaksin
15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	6.035 Vaksin
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	47.487 Unit
17. Peralatan Anafilaktik	21 Paket
18. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
19. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
20. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	336 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 78.21% atau sebanyak 18.985 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	18.985 Dokumen
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	18.985 Formulir
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	4.234 Buku
4. Vitamin A Biru	1.611 Kapsul
5. Vitamin A Merah	15.541 Kapsul
6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	3.546 Vaksin
7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	5.580 Vaksin
8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	5.401 Orang
9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	4.524 Vaksin
10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	5.280 Vaksin
11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	5.533 Vaksin
12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	5.533 Vaksin
13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2.634 Vaksin
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2.980 Vaksin

15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2.980 Vaksin
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	33.704 Unit
17. Peralatan Anafilaktik	21 Paket
18. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
19. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
20. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	336 Orang

4.2.6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 64.727 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Buku raport kesehatanku	21 Buku
2. Buku pemantauan kesehatan	21 Buku
3. Kuesioner skrining kesehatan	64.727 Dokumen
4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	64.727 Dokumen
5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	64.727 Formulir
6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	77 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
8. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	52 Orang
11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
12. Tenaga Non kesehatan : Guru	336 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 76.10% atau sebanyak 61.568 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Buku raport kesehatanku	21 Buku
2. Buku pemantauan kesehatan	21 Buku
3. Kuesioner skrining kesehatan	61.568 Dokumen
4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	61.568 Dokumen
5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	61.568 Formulir
6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	77 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
8. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	52 Orang
11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
12. Tenaga Non kesehatan : Guru	336 Orang

4.2.7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Target

Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 197.049 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Alat ukur berat badan	252 Unit
3. Alat : Alat ukur tinggi badan	252 Unit
4. Alat : Alat ukur lingkar perut	252 Unit
5. Alat : Tensimeter	252 Unit
6. Alat : Glukometer	252 Unit
7. Alat : Tes strip gula darah	197.049 Unit
8. Alat : Lancet	197.049 Unit
9. Alat : Kapas alkohol	197.049 Unit
10. Alat : KIT IVA Tes	21 Unit
11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
12. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
13. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
14. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang

15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	21 Orang
16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
17. Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai Kualifikasi tertentu	1.260 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 45.23% atau sebanyak 111.414 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Alat ukur berat badan	252 Unit
3. Alat : Alat ukur tinggi badan	252 Unit
4. Alat : Alat ukur lingkar perut	252 Unit
5. Alat : Tensimeter	252 Unit
6. Alat : Glukometer	252 Unit
7. Alat : Tes strip gula darah	111.414 Unit
8. Alat : Lancet	111.414 Unit
9. Alat : Kapas alkohol	111.414 Unit
10. Alat : KIT IVA Tes	21 Unit
11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
12. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
13. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
14. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	21 Orang
16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
17. Tenaga non kesehatan terlatih/ Mempunyai kualifikasi tertentu	1.260 Orang

4.2.8 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 40.489 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	40.489 Paket
2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	40.489 Paket
3. Buku kesehatan lansia	21 Buku
4. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	52 Orang
9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 75.48% atau sebanyak 38.199 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	38.199 Paket
2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	38.199 Paket
3. Buku kesehatan lansia	21 Buku
4. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	52 Orang
9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

4.2.9 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 10.720 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Tensimeter	252 Unit
3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
4. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
8. Obat Hipertensi	9.280 Paket

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.25% atau sebanyak 9.280 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Tensimeter	252 Unit
3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
4. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
8. Obat Hipertensi	9.280 Paket

4.2.10 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Target Pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 2.248 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Alat : Glukometer	439 Unit
2. Alat : Strip Tes Gula Darah	2.284 Unit
3. Alat : Kapas Alkohol	2.284 Unit
4. Alat : Lancet	2.284 Unit
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Orang

6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
7. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
12. Obat Diabetes Melitus	2.284 Paket

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 2.284 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Alat : Glukometer	439 Unit
2. Alat : Strip Tes Gula Darah	2.284 Unit
3. Alat : Kapas Alkohol	2.284 Unit
4. Alat : Lancet	2.284 Unit
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Orang
6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
7. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
12. Obat Diabetes Melitus	2.284 Paket

4.2.11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 2.248 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	22 Buku

2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0 Paket
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	22 Orang
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22 Media
5.	Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
6.	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	5 Orang
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	18 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 2.284 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	22 Buku
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0 Paket
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	22 Orang
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22Media
5.	Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
6.	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	5 Orang
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	18 Orang

4.2.12 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 5.481 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media

2. Reagen Zn TB	110 Paket
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7.000 Paket
4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	19.000 Paket
5. Catridge tes cepat molekuler	5.481 Paket
6. Formulir pencatatan dan pelaporan	21 Dokumen
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21 Dokumen
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit spesialis dalam/ dokter spesialis paru	25 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Medik (ATLM)	22 Orang
11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	13 Orang
12. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
13. Tenaga non kesehatan terlatih/ Mempunyai kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.34% atau sebanyak 5.025 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Reagen Zn TB	110 Paket
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7.000 Paket
4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	19.000 Paket
5. Catridge tes cepat molekuler	3.660 Paket
6. Formulir pencatatan dan pelaporan	21 Dokumen
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21 Dokumen
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit spesialis paru	25 Orang

9. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Medik (ATLM)	22 Orang
11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	13 Orang
12. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
13. Tenaga non kesehatan terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

4.2.13 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 6.495 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	6.495 Paket
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	6.495 Paket
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	6.495 Paket
5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Medis (ATLM)	22 Orang
9. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.17% atau sebanyak 5.616 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	5.616 Paket
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	5.616 Paket
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	5.616 Paket
5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Medis (ATLM)	22 Orang
9. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	202 Orang

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD sebesar Rp. 20.896.620.994,-

Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Seluruh bidang kesmas, Pemegang program ibu, bidan desa 15
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
4	Pelayanan kesehatan balita	

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kecamatan dan 21 Puskesmas
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	176 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	50 orang
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	47 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	42 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.3 URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pekerjaan umum

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.3.1.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 318.424 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	79.606 Sambungan Rumah/SR
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	79.606 Sambungan Rumah/SR
3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.718 Rumah Tangga
4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.718 Rumah Tangga

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 67.52% atau sebanyak 268.768 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	64.792 Sambungan Rumah/SR
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	62.706 Sambungan Rumah/SR
3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.407 Rumah Tangga

4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.419 Rumah Tangga

4.3.1.2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 318.424 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	79.606 Rumah Tangga
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	67.665 Rumah Tangga
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	8.358 Rumah Tangga
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	11.940 Rumah Tangga

5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	3.582 Rumah Tangga

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.65% atau sebanyak 293.132 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	62.664 Rumah Tangga
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	58.613 Rumah Tangga
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	7.689 Rumah Tangga
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	4.716 Rumah Tangga

5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.673 Rumah Tangga

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 10.092.482.231,-.

Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 6 orang dengan uraian :

Eselon II	:	1 orang
Eselon III	:	1 orang
Jabatan fungsional	:	2 orang
Jabatan pelaksana	:	2 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.4 URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan urusan bidang perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

1. Jenis Pelayanan Dasar

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.1.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.4.1.1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 100 rumah.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi Korban bencana	0 Rumah
2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 Rumah
3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0 Rumah
4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0 Rumah

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.60% atau sebanyak 87 rumah.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi Korban bencana	0 Rumah
2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	87 Rumah
3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0 Rumah
4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0 Rumah

4.4.1.2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 0 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0 Rumah
2. Subsidi uang sewa	0 Rumah
3. Penyediaan rumah layak huni	0 Rumah

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 0 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0 Rumah
2. Subsidi uang sewa	0 Rumah
3. Penyediaan rumah layak huni	0 Rumah

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD sebesar Rp. 87.999.800,-

Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara urusan Perumahan sebanyak 6 orang dengan uraian :

Eselon II	:	1	orang
Eselon III	:	1	orang
Jabatan fungsional	:	1	orang
Jabatan pelaksana	:	1	orang

Permasalahan dan Permasalahan Solusi

Permasalahan

Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.5 Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.5.1.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 825 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	64 Unit

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6 Dokumen
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan kualitas personil/SDM)	31 Orang
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0 Dokumen
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0 Orang
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 68.95% atau sebanyak 711 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c.perlengkapan operasional)	64 Unit

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6 Dokumen
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	31 Orang
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0 Dokumen
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0 Orang
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0 Orang

4.5.1.2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 323.652 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen

2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	323.652 Orang
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	323.652 Orang
4. Penyediaan dan pemasangan rambu Evakuasi Dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	756 Unit

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 11.12% atau sebanyak 45.000 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	323.652 Orang
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	45.000 Orang
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	91 Unit

4.5.1.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 323.652 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	40 Unit
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	4.000 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 11.12% atau sebanyak 45.000 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	30 Unit
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1.500 Orang

4.5.1.4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 78 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	78 Orang

3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	185 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0 Layanan
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3 Layanan

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 78 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	78 Orang
3. Melakukan respon cepat Darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	185 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0 Layanan
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2 Layanan

4.5.2.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 55 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	26 Layanan
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4 Dokumen
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	54 Unit
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	64 Orang
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0 Layanan

kebakaran/redkar)	
2. Prosedur operasional penanganan penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP KKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4 Dokumen
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	41 Unit
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam)	51 Orang
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0 Layanan
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0 Layanan

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.490.672.750,-

Dukungan Personil

1. a. **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk urusan Trantibumlinmas**

BIDANG PENEGAKAN PERDA		BIDANG TRANTIBUM	
Kepala Bidang Penegakan Perda	1 orang	Kepala Bidang Trantibum	1 orang
Kaseksi Penegakan Perda	-	Kaseksi Trantibum	1 orang
Kaseksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat	-	Kaseksi Opsdal	
Anggota Pol PP	50 orang	Anggota Pol PP	50 orang
Total	**51 orang**	**Total**	**52 orang**

b. **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk urusan pemadam kebakaran**

Kepala Kabid Damkar dan Linmas	1 orang
Kaseksi Damkar	1 orang
Kaseksi Linmas	1 orang
Anggota Damkar	57 Orang

2. **Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pelaksana Badan	1
	Sekretariat	1
	Kepala Sekretariat	1
	Staf	4
2	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3
	Staf	1
3	Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
	staf	3
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstrukdi	1

	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2
	Staf	1
5	Tenaga Non PNS	2
	Honor	1
	Satgas	1
		8

Permasalahan dan Solusi

Permasala
han

Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.6 URUSAN SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosialkhususny Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.6.1.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 84 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	84 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	34 Orang
4. Penyediaan sandang	34 Orang
5. Penyediaan alat bantu	34 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	34 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	84 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	84 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	34 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 84 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	84 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang
5. Penyediaan alat bantu	34 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	84 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	84 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.1.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 11 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	11 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanan	4 Orang
4. Penyediaan sandang	4 Orang
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	4 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	11 Orang

8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	4 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	11 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 65.45% atau sebanyak 9 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	9 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan Reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	9 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	9 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
12. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.1.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 67 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	67 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanan	41 Orang
4. Penyediaan sandang	41 Orang
5. Penyediaan alat bantu	41 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	41 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	67 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	67 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	41 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 67 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	67 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang

5. Penyediaan alat bantu	41 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	67 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	67 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.1.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 10 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	10 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	6 Orang
4. Penyediaan sandang	6 Orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2 Orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	6 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	6 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang

9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	2 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 32% atau sebanyak 4 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	4 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	4 Orang
4. Penyediaan sandang	4 Orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	4 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	4 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	2 Orang

4.6.1.4 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 432 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Penyediaan permakanan	432 Orang
2. Penyediaan sandang	65 Orang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	40 Orang
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20 Orang
5. Pelayanan dukungan Psikososial	167 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.07% atau sebanyak 373 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Penyediaan permakanan	373 Orang
2. Penyediaan sandang	65 Orang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	40 Orang
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20 Orang
5. Pelayanan dukungan Psikososial	167 Orang

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD sebesar Rp. 568.863.900,-

Dukungan Personil

a) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
   Sebanyak 7 orang yakni : 1 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala seksi (seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial) dan 3 orang fungsional umum serta 1 orang satuan bakti pekerja sosial (SAKTI PEKSOS) yang merupakan pendamping dari unsur Kementerian Sosial RI.

b) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Sebanyak 18 orang yakni : 1 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala seksi (seksi perlindungan sosial dan jaminan sosial) dan di bantu 15 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Jumlah total yang harus dilayani terjadi perubahan pada triwulan IV seiring dengan adanya perubahan pada P. APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Masih kurangnya tenaga SDM dan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

Solusi

1. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dan diharapkan dalam pengalokasian anggaran dapat ditingkatkan;
2. Diharapkan penambahan SDM dan peningkatan kualitas SDM serta menyediakan sarana prasarana.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi sistematika Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan materi yang disajikan pada laporan dimaksud.

Adapun hasil Reviu terhadap penyajian data dan akurasi terhadap perhitungan kinerja pada indikator kinerja kunci hasil maupun indikator kinerja kunci keluaran maupun keluaran pada masing – masing urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pendidikan

   Pada IKK Hasil "Tingkat Partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan tidak dapat diukur capaian kinerja disebabkan tidak didukung dengan data atas jumlah warga pada Kabupaten Tapanuli Utara yang berusia 7-18 Tahun pada tahun 2024.

2. Urusan Wajib Perumahan

   Pada IKK Hasil "Fasilitasi hujan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota" belum dapat diukur capaian kinerja disebabkan masih adanya pendukung untuk pengukuran capaian kinerja tidak disajikan yaitu Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni namun data pendukung untuk Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria menerima pelayanan telah disajikan.

2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

   a. Pada IKK Hasil "Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota" tahun 2024 belum dapat diukur capaian kinerjanya disebabakan variabel data pendukung Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten (ha) tidak disajikan dan data pendukung untuk Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) sebesar 1 hektar belum dapat diyakini karena belum menjelasakan lokasi dan perhitungan yang sebenarnya yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait atas luas kawasan permukiman rawan banjir.

   b. Pada IKK Hasil "Fasilitasi Hunian Penyediaan rumah ayak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota, Persentase Kawasan Kumuh dbawah 10 Ha yang ditangani, Jumlah perumahan yang sudah diengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilias Umum) tidak dapat diukur capaikan kinerja disebakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tidak memilki data terkait indikator dimaksud sehingga mempengaruhi kinerja pada urusan wajib Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Urusan Wajib Pertanahan

   IKK Hasil "Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya dengan izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, Tersedianya tanah untuk masyarakat dan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena tidak didukung dengan bukti-bukti data yang relevan terhadap pencapaian indikator kinerja tersebut.

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

IKK Hasil "Ketaatan Penanggungjawab usaha dana / atau Kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Capaian Kinerja sebesar 0% karena tidak didukung dengan data/infrmasi tentang usaha ketaatan usaha yang memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas PPLH dan PUULH yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

5. Urusan Pilihan Perdagangan

IKK Hasil "Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku" belum dapat diukur capaian kinerjanya karena tidak dapat menyajikan data atas pelaksanaan pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 yang merupakan tupoksi perangkat daerah tersebut.

6. Urusan Pilihan Peridustrian

IKK Hasil "Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Inidkator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIK" dan "Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait tidak dapat dihitung capaian kinerjanya karena tidak ada menyajikan data pendukung sebagai bahan dalam mengihitung capaian kinerja.

2. REKOMENDASI

Sesuai dengan kesimpulan tersebut kami rekomendasikan supaya :

1. Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setdakab Tapanuli Utara melakukan verifikasi dan pengujian terhadap data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapauli Utara dam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara karena masih terdapat capaian kinerja pada indikator kunci hasil tidak dapat dihitung capaian kinerjanya karena tidak didukung dengan data yang relevan dan memadai sehingga capaian kinerja yang dihasilkan benar-benar didukung dengan data yang valid dan sah sehingga nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Perangkat Daerah harus menyajikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan dan menata setiap data yang dimiliki dengan baik untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan penyelengaraan pemerintahan.
4. Setiap Perangkat Daerah dalam penyampaian Dokumen Capaian Kinerja pada IKK Hasil dan IKK Keluaran kepada Bagian Pemerintahan Setdakab Tapanuli Utara dengan tepat waktu beserta dengan data pendukung yang lengkap dan sah guna memudahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

BAB VI PENUTUP

Demikian hasil reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara diperbuat untuk menjadi bahan dan tindak lanjut.

Tarutung, Maret 2025

Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904221989031003